

Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd.

— *Buku Ajar* —

KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN



Judul :
Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan

Penulis
Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

Editor :
Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si

Desain Sampul
Atika Arfah Matondang

Cetakan Pertama ; Juli 2021
xii; 252 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-6402-16-0
E-ISBN : 978-623-6402-17-7 (PDF)
Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238
Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296
Email; umsupress@umsu.ac.id
Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Anggota IKAPI Sumut, No : 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020
Anggota APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya sehingga buku ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan ini dapat selesai dan hadir di tengah-tengah civitas akademika Universitas (Nama Universitas). Rasa terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan materi, penulisan hingga pada akhirnya buku ajar ini dapat dicetak dan dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Buku ini memuat pengertian dan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan; inovasi serta perubahan dalam pendidikan; analisis kebijakan di berbagai tingkat pendidikan; pendekatan dan model analisis kebijakan pendidikan; permasalahan pendidikan dan pembelajaran di berbagai tingkatan; pendidikan dan kebijakan politik; pendidikan abad 21; serta kekurangan dan kelebihan pendekatan dan model analisis kebijakan dan permasalahan; hingga contoh kasus sebuah kebijakan pendidikan mulai dari pembentukan, praktik hingga penanganan masalah yang dihadapi.

Melalui buku ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa (nama program studi) sebagai salah satu bentuk dasar pengetahuan sebagai jembatan penghubung antara pemahaman teoritis tentang analisis kebijakan pendidikan dan aplikasi penanganan permasalahan pendidikan.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi penyusunan, tata bahasa hingga substansi materi. Buku ajar ini masih memiliki ruang untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Sehingga kritik serta saran sungguh kami harapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Medan, 15 Juli 2021

Penulis

Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

PENGANTAR EDITOR

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan pola pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau lembaga yang oleh karenanya berusaha untuk mengejar tujuannya. Kebijakan merupakan hasil dari suatu keputusan yang dipikirkan dengan seksama dan hati-hati oleh pengambil keputusan pusat, bukan kegiatan berulang atau rutin yang diprogram berkaitan dengan aturan-aturan.

Tujuan dari ilmu kebijakan (*policy science*) tidak hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga ikut serta dalam perbaikan praktek demokrasi, yang nantinya membantu merealisasikan apa yang menjadi tujuan manusia.

Sementara kebijakan pendidikan merupakan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan tersebut. Defenisi sederhana, kebijakan pendidikan merupakan rumusan berbagai cara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan melalui berbagai kebijakan pendidikan.

Selain berbicara tentang kebijakan pendidikan, Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan ini terdiri dari XVI bab, , sebanyak 14 bab membahas perbagai persoalan pendidikan mulai dari Kebijakan Pendidikan, Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan, Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya, Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan, Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi, Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah, Permasalahan Pendidikan dan Pembelajaran di Berbagai Tingkatan, Pendidikan dan Kebijakan Politik Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia, Pendidikan Abad 21 dan Permasalahannya, Berbagai Pendekatan dan Model Analisis Kebijakan dan Permasalahannya, Kekurangan dan Kelebihan Pendekatan dan Model Analisis Kebijakan dan Permasalahannya, Studi Kasus; Kebijakan, Praktik, dan Penanganannya, sedangkan dua bab berisi tentang Evaluasi Pemahaman Tengah Semester, Evaluasi Pemahaman Akhir Semester.

Dalam penulisan buku ini, penulis yang memiliki track record di jenjang manajemen pendidikan mulai dari magister hingga doctor terlihat sangat memahami betul persoalan kebijakan pendidikan yang tentunya dibarengi dengan analisis kebijakan mulai dari pendidikan

dasar, menengah, kejuruan, pendidikan tinggi, bahkan persoalan pembelajaran di berbagai tingkatan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mumpuni, penulis dinilai *expert* dengan mengkaji tulisannya di bab yang membahas Berbagai Pendekatan dan Model Analisis Kebijakan dan Permasalahannya, Kekurangan dan Kelebihan Pendekatan dan Model Analisis Kebijakan dan Permasalahannya, Studi Kasus; Kebijakan, Praktik, dan Penanganannya.

Dari kajian-kajian ini maka pembaca akan mengetahui bagaimana bagaimana kebijakan yang merupakan keputusan pemerintah itu mempunyai sifat umum dan berlaku kepada semua lapisan masyarakat. Artinya, dengan kebijakan yang dibuat pemerinhtah itu, semau memahami bagaimana kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar, dengan mematuhi kebijakan-kebijakan itu. Penulis di sini menjelaskan dengan arah kebijakan pendidikan di Indonesia, karakteristik kebijakan sampai model-model proses pengembangan kebijakan. Tentunya disertai dengan praktik kebijakan pendidikan serta hasil dan penanganannya.

Buku ini memiliki perbedaan dengan buku-buku lainnya, dan diharapkan menjadi referensi bagi praktisi pendidikan, mahasiswa yang konsen terhadap pendidikan mulai tingkat sarajana, magister dan doctoral. Buku ini juga cocok untuk pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, hingga pejabat struktural di lingkungan kementerian pendidikan dan dinas pendidikan.

Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada penulis. Semoga ke depannya lebih berkarya lagi, dan karya-karyanya dapat mengisi kekurangan keilmuan khususnya dalam kebijakan pendidikan.

Medan, 21 Juli 2021

Editor
Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si,

DAFTAR ISI

PRAKATA _____	iii	E. Pendidikan Menengah _____	56
PENGANTAR EDITOR _____	iv	F. Kebijakan Pendidikan di Indonesia dari masa ke masa _____	58
DAFTAR ISI _____	vi	V	
DAFTAR GAMBAR _____	x	ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEJURUAN _____	67
I		A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan _____	67
KEBIJAKAN PENDIDIKAN _____	1	B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan _____	69
A. Pengertian dan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan _____	1	C. Model Kemitraan di Bidang Pendidikan Kejuruan _____	73
B. Landasan Pemikiran Kebijakan Pendidikan _____	3	D. Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di SMK _____	74
C. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan _____	5	E. Kebijakan Pendidikan Model Sekolah _____	77
D. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan _____	8	F. Kebijakan Pendidikan Model Magang _____	77
E. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan _____	9	G. Kebijakan Pendidikan Model School-based Enterprise _____	78
F. Model Lain Proses Perumusan Kebijakan _____	15	H. Evaluasi Pemahaman _____	79
G. Evaluasi Pemahaman _____	18	VI	
II		ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI _____	81
INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN _____	19	A. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Tinggi _____	81
A. Pendahuluan _____	19	B. Perguruan Tinggi Kelas Dunia _____	84
B. Definisi Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan _____	20	C. Membuka Prodi, Menutup Mutu _____	87
C. Tujuan Inovasi Pendidikan _____	22	D. Kurikulum KKNi _____	89
D. Model Inovasi Pendidikan _____	23	E. Pengaturan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia _____	92
E. Beberapa Inovasi dan Perubahan Pendidikan di Indonesia _____	24	F. Evaluasi Pemahaman _____	95
F. Inovasi Pendidikan Lainnya _____	26	VII	
G. Evaluasi Pemahaman _____	34	ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH _____	97
III		A. Latar Belakang _____	97
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA _____	35	B. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah _____	98
A. Pengertian Pendidikan _____	35	C. Jenis-jenis Pendidikan Luar Sekolah _____	99
B. Pengertian Sosial Budaya _____	39	D. Peranan Pendidikan Luar Sekolah _____	100
C. Pengertian Perubahan Sosial Budaya _____	41	E. Komponen-komponen dalam Pendidikan Luar Sekolah _____	102
D. Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya _____	43	F. Program-program Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat _____	108
E. Pendidikan sebagai Instrumen Sosial Budaya _____	45	G. Evaluasi Pemahaman _____	116
F. Evaluasi Pemahaman _____	47	VIII	
IV		EVALUASI PEMAHAMAN TENGAH SEMESTER _____	117
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH _____	49	A. Soal pilihan ganda _____	117
A. Pendahuluan _____	49	B. Soal essay _____	121
B. Konsep Dasar Analisis Kebijakan _____	50	IX	
C. Pendidikan Dasar: Esensi dan Karakteristik _____	51	PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI BERBAGAI TINGKATAN _____	123
D. Praktik Pendidikan Dasar di Indonesia _____	53	A. Imbas Globalisasi untuk Sekolah Menengah _____	123
		B. Masalah Pemerataan Pendidikan _____	124
		C. Sarana dan Prasarana Pendidikan _____	125
		D. Acuan Mutu Pendidikan Nasional _____	125
		X	

BERBAGAI PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS PERMASALAHAN PENDIDIKAN _____	141	F. Model Analisis Kebijakan _____	199
A. Pendekatan Analisis Permasalahan Pendidikan _____	141	G. Uji Pemahaman _____	203
B. Model Analisis Permasalahan Pendidikan _____	151	XIV	
C. Evaluasi Pemahaman _____	155	KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN _____	205
XI		A. Kekurangan Dan Kelebihan Pendekatan Analisis Kebijakan _____	205
PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN POLITIK KAJIAN REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA _____	157	B. Kekurangan Dan Kelebihan Model Analisis Kebijakan Menurut Para Ahli _____	212
A. Pengertian Politik _____	157	C. Kesimpulan _____	220
B. Hubungan Pendidikan dan Politik _____	160	D. Evaluasi Pemahaman _____	221
C. Pendidikan dan Kebijakan Politik Era Reformasi _____	163	XV	
D. Permasalahan Kebijakan Politik Bidang Pendidikan _____	163	STUDI KASUS: KEBIJAKAN, PRAKTIK, DAN PENANGANANNYA _____	223
E. Kebijakan Politik Pendidikan Terkini: Merdeka Belajar _____	165	A. Pengertian Studi Kasus _____	223
F. Evaluasi pemahaman _____	172	B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia _____	224
XII		C. Model-Model Proses Pengembangan Kebijakan _____	228
PENDIDIKAN ABAD 21 DAN PERMASALAHANNYA _____	173	D. Praktik Kebijakan Pendidikan _____	230
A. Pendahuluan _____	173	E. Hasil dan Penanganan _____	232
B. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21 _____	174	F. Evaluasi Pemahaman _____	234
C. Empat Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21 _____	176	XVI	
D. Pembelajaran Abad 21 Bagi Daerah Terpencil _____	178	EVALUASI PEMAHAMAN AKHIR SEMESTER _____	235
E. Pembelajaran Abad 21 Bagi Daerah Berkembang _____	180	A. Soal pilihan ganda _____	235
F. Permasalahan Eksternal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Globalisasi _____	181	B. Soal essay _____	239
G. Permasalahan Eksternal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Perubahan Sosial _____	182	DAFTAR PUSTAKA _____	241
H. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Sistem Kelembagaan Pendidikan _____	183	BIODATA PENULIS _____	249
I. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Profesionalisme Guru _____	184	TENTANG EDITOR _____	250
J. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Strategi Pembelajaran _____	185		
K. Mahalnya Biaya Pendidikan _____	185		
L. Uji Pemahaman _____	187		
XIII			
BERBAGAI PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN _____	189		
A. Analisis Kebijakan (Policy Analysis) _____	189		
B. Tujuan Analisis Kebijakan _____	190		
C. Bentuk Analisis Kebijakan _____	190		
D. Lingkup Kebijakan _____	191		
E. Pendekatan Analisis Kebijakan _____	194		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1.	Kriteria kebijakan pendidikan	5
2.	Siklus perumusan kebijakan	9
3.	Proses agenda setting masalah	10
4.	Proses perumusan masalah	11
5.	Aktor dalam perumusan kebijakan	11
6.	Bagan pengambilan keputusan (model rasional)	13
7.	Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	14
8.	Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (publik) William N. Dunn	15
9.	Kenyataan dalam perumusan kebijakan (inkremental)	16
10.	Garbage Can Model	17
11.	Proses inovasi	20
12.	Konsep Dasar Inovasi Pendidikan	23
13.	Model inovasi Top-Down	24
14.	Model inovasi Bottom-Up	24
15.	Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi	25
16.	Bagan Sistem Pendidikan	27
17.	Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	27
18.	Bagan Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan	30
19.	Perkembangan Kurikulum di Indonesia	33
20.	Tema Pengembangan Kurikulum 2013	34
21.	Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan	36
22.	Pendidikan formal: belajar di sekolah	37
23.	Pendidikan non-formal: kursus menjahit	38
24.	Pendidikan informal: belajar tidak di kelas	39
25.	Pendidikan informal: Belajar wayang dari kakek	39
26.	Contoh sosial budaya: adat-istiadat di Bali	40
27.	Perubahan sosial budaya: pasar tradisional ke online	42
28.	Perubahan sosial budaya: membajak sawah dari sapi ke mesin	42
29.	Perubahan sosial budaya dalam pendidikan	44
30.	Sistem Pendidikan	45

31.	Pendidikan: merobohkan tembok pembatas dan instrument sosial budaya	47
32.	Praktik Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/SD)	53
33.	Jenjang Pendidikan Formal di Indonesia	55
34.	Gambaran Tingkatan Sekolah Masa Pemerintahan Hindia-Belanda	60
35.	Contoh keahlian di Sekolah Kejuruan	68
36.	Contoh keahlian di Sekolah Kejuruan	69
37.	Gambaran proses belajar di Sekolah Kejuruan	70
38.	Contoh upaya reformasi dan penyesuaian kurikulum	73
39.	Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	74
40.	Pendidikan Sistem Ganda	76
41.	Skema pelaksanaan dual system di Sekolah Kejuruan	77
42.	Magang berbagai jenis kejuruan	78
43.	Contoh kebijakan unit produksi di SMKN 1 Cianjur	79
44.	Komponen-komponen pendidikan luar sekolah	102
45.	Keterbatasan Akses ke Sekolah di Daerah Tertinggal	132
46.	Alur manajemen sistem	145
47.	Model analisis interaktif	151
48.	Model Sistem Politik menurut David Easton	160
49.	Relasi Politik dan Pendidikan	161
50.	Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar	162
51.	Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar	166
52.	Konsep Pokok Kampus Merdeka	170
53.	Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21	178
54.	Perspektif analisis kebijakan	192
55.	Diagram alir perumusan masalah	193
56.	Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif	209
57.	Keuntungan dan kerugian dari teknik wawancara dan kuesioner	211
58.	Jenis penelitian kualitatif	223
59.	Contoh fungsi kebijakan pendidikan: status sekolah 'favorit'	225
60.	Contoh arah kebijakan: zonasi pendidikan	227
61.	Pendekatan Top Down dan Bottom Up	230
62.	Praktik Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan: Semasa Pandemi Covid-19	231

63.	Teknologi sebagai penghubung pendidikan secara globalisasi	232
64.	Gambaran pendidikan di negara berkembang	233

I

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian dan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani *polis* yang artinya negara kota. Kata ini berkembang dalam Bahasa Latin “*politic*” yang memiliki arti negara. Sedangkan dalam Bahasa Inggris Pertengahan terdapat kata “*policie*” yang merujuk kepada tindakan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Sehingga kebijakan diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau lembaga yang oleh karenanya berusaha untuk mengejar tujuannya.¹

Nichols dalam Fachruddin menyatakan bahwa kebijakan merupakan hasil dari suatu keputusan yang dipikirkan dengan seksama dan hati-hati oleh pengambil keputusan pusat, bukan kegiatan berulang atau rutin yang diprogram berkaitan dengan aturan-aturan. Pendapat lainnya diberikan oleh Klein dan Murphy dimana kebijakan adalah seperangkat tujuan, prinsip hingga peraturan yang membimbing suatu organisasi, atau dengan kata lain kebijakan merupakan keseluruhan dari petunjuk organisasi. Pengertian kebijakan lainnya oleh Hough merujuk kepada seperangkat tujuan, usulan, program, keputusan yang menghadirkan pengaruh serta undang-undang atau peraturan-peraturan.

Hal ini selaras dengan Lasswell (Dunn, 1981) bahwa tujuan dari ilmu kebijakan (*policy science*) tidak hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga ikut serta dalam perbaikan praktek demokrasi, yang nantinya membantu merealisasikan apa yang menjadi tujuan manusia. Kebutuhan yang hendaknya direalisasikan melalui kebijakan seperti yang dimaksudkan memiliki beberapa kriteria dimana kebutuhan tersebut meliputi:

- a) Kekuasaan (*power*), yaitu kebutuhan manusia untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan;

¹ Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta: Rineka Cipta. hal 75.

- b) Pencerahan (*enlightenment*), yaitu kebutuhan akan pemahaman dan pengetahuan;
- c) Kekayaan (*wealth*), kebutuhan terhadap material seperti penghasilan dan hak milik;
- d) Kesejahteraan (*well-being*), kebutuhan yang berupa kesehatan, rasa nyaman dan keselamatan;
- e) Keterampilan (*skill*), kebutuhan untuk memiliki kemampuan, atau kemahiran dalam menyelesaikan tugas;
- f) Rasa kasih sayang (*affection*), kebutuhan akan rasa cinta, persahabatan, solidaritas, dan kesetiaan;
- g) Penghargaan (*respect*), yaitu kebutuhan tentang kehormatan, status, reputasi dan tanpa diskriminasi;
- h) Kejujuran (*rectitude*), kebutuhan yang sesuai dengan etika moral dan agama.

Dengan demikian landasan kebijakan pendidikan adalah dimana konsep hukum mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan sehingga dalam prosesnya tercapai keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi.

Dalam upaya mencapai keselarasan sekaligus memenuhi kebutuhan tersebut, Duke dan Canady menjabarkan konsep kebijakan melalui delapan arah pemaknaan fungsi kebijakan dimana:

- 1) Kebijakan berfungsi sebagai penegas maksud dan tujuan dari diterbitkannya kebijakan tersebut;
- 2) Kebijakan berfungsi sebagai keputusan lembaga yang mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani dan memberikan pengaruh lainnya dalam lingkup kewenangan kebijakan tersebut;
- 3) Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresioner;
- 4) Kebijakan sebagai strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan;
- 5) Kebijakan sebagai perilaku atau tindakan yang bersanksi;
- 6) Kebijakan sebagai norma perilaku yang memiliki ciri konsistensi dan keteraturan dalam bidang tindakan substantif;
- 7) Kebijakan sebagai output dari sistem pembuat kebijakan; dan
- 8) Kebijakan sebagai pengaruh dari pembuatan kebijakan, yang ditujukan kepada pemahaman target kebijakan terkait dengan implementasi sistem.²

² Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 3

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari kebijakan pendidikan merupakan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertian sederhana, kebijakan pendidikan adalah rumusan berbagai cara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan melalui berbagai kebijakan pendidikan (Tilaar, 2009). Kebijakan pendidikan ditujukan untuk menjadi pedoman dalam melakukan tindakan, pengarahan kegiatan pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat serta pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga kebijakan pendidikan merupakan garis umum bagi pengambilan keputusan di setiap jenjang pendidikan maupun organisasi.

B. Landasan Pemikiran Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan muncul sebagai jawaban atas salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Tanpa terkecuali mereka yang memiliki hambatan fisik maupun mental, maupun kendala geografis juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Keadaan Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagai negara kepulauan dengan geografis yang luas dan menyebar, ditambah dengan masyarakatnya yang multi-etnis dan pluralistik serta tingkat ekonomi yang beragam, menjadi tantangan berat bagi pendidikan nasional untuk menyediakan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan setiap warga negara Indonesia.

Perencanaan sistem pendidikan nasional perlu dibuat dengan hati-hati dan seksama guna mengatasi permasalahan tersebut serta mampu mengatasi perubahan kebutuhan serta tuntutan akibat perubahan lingkungan baik secara domestik, nasional maupun global. Terlebih lagi di masa globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di seluruh pelosok dunia tak terkecuali Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi paradigma baru pengelolaan pendidikan dengan mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan yang telah ditentukan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Tanggung jawab pengelolaan pendidikan tidak lagi oleh pemerintah saja (baik pusat maupun daerah), tetapi juga telah menjadi tanggung jawab bersama dengan sekolah dan masyarakat dalam rangka memperoleh hasil dari pengambilan keputusan sedekat mungkin dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan, yaitu peserta didik dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Sebagai pedoman dalam menjalankan pengelolaan pendidikan, kebijakan hendaknya memenuhi karakteristik sebagaimana disebutkan berikut:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan yang jelas
Seperti kebijakan pada umumnya, kebijakan pendidikan juga harus memiliki tujuan yang jelas. Terutama tujuan pendidikan yang akan direalisasikan. Tujuan pendidikan tersebut harus jelas dan terarah sehingga memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memenuhi aspek legal-formal
Keberadaan kebijakan pendidikan pasti akan diberlakukan, oleh karenanya segala pra-syarat yang harus dipenuhi harus dituntaskan terlebih dahulu. Dengan demikian kebijakan pendidikan memiliki bukti keabsahan dan diakui secara legal dapat diberlakukan pada suatu wilayah. Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah agar secara resmi diakui dan berlaku di wilayah tersebut.
- 3) Memiliki konsep operasional yang matang
Agar kebijakan pendidikan tersebut dapat diimplementasikan, maka ia harus mempunyai manfaat operasional. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagai sebuah pedoman kebijakan pendidikan harus menjalankan fungsinya sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.
- 4) Dibuat oleh pihak yang berwenang membuat kebijakan
Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, para ahli dan semua yang terkait langsung dengan pendidikan harus ikut andil sehingga ketika kebijakan tersebut diperkenalkan dan diimplementasikan tidak menimbulkan cacat atau kerusakan terhadap pendidikan itu sendiri dan atau terhadap lingkungan di luar pendidikan.
- 5) Kebijakan pendidikan dapat di evaluasi
Sebagai suatu bentuk keputusan, kebijakan pendidikan juga harus dinilai apakah keputusan tersebut sudah tepat atau masih

perlu diperbaiki. Baik tidaknya suatu kebijakan pendidikan dapat dilihat dari hasil yang diperoleh setelah dihadapkan dengan kondisi realitas di lapangan. Apabila memberikan respon yang baik, kebijakan pendidikan tersebut dapat dipertahankan, atau dikembangkan. Namun apabila kebijakan pendidikan tersebut mengandung kesalahan, kebijakan tersebut haruslah segera diperbaiki. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan merupakan hal lazim guna mengukur keberhasilan.

- 6) Memiliki sistematika
Sebagai sebuah sistem, kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika jelas yang menyangkut seluruh aspek yang menjadi sarannya. Sistematika kebijakan dituntut untuk memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas tinggi sehingga kebijakan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan tidak memiliki struktur yang rapuh hanya gara-gara hilangnya serangkaian faktor atau karena terjadinya benturan satu sama lain. Hal ini guna menghilangkan resiko kecacatan hukum secara internal. Kebijakan pendidikan juga harus memiliki keterpaduan secara eksternal dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan politik; kebijakan moneter, dan lain-lain.



Gambar 1; Kriteria kebijakan pendidikan

C. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

Menurut (Nugroho, 2008) kebijakan merupakan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang menyampaikan tujuan pendidikan dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan definisi tersebut dapat diambil

contoh dari kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur, dan lain-lain. Kebijakan tersebut bersifat mengikat dan wajib bagi objek kebijakan. Melalui gambaran dari contoh kebijakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kebijakan dapat memiliki sifat makro, meso, dan mikro.

Perumusan kebijakan selaras dengan tujuan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam ayat-ayat selanjutnya kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dimana ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya kemudian dijabarkan melalui peraturan pemerintah.

Adapun ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 meliputi segala hal menyangkut penyelenggaraan sistem pendidikan seperti misalnya: (1) dasar, fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, (2) hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, (3) peserta didik, (4) jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, (5) bahasa pengantar, (6) wajib belajar, (7) standar nasional pendidikan, (8) kurikulum, (9) pendidik dan tenaga kependidikan, (10) sarana dan prasarana pendidikan, (11) pendanaan, (12) pengelolaan, (13) peran serta masyarakat, (14) evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, (15) pendirian satuan pendidikan, (16) penyelenggaraan pendidikan oleh negara lain, (17) pengawasan dan ketentuan pidana, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kebijakan terdiri dari komponen-komponen (Jones, 2007) sebagai berikut:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan, dalam kasus ini tujuan dari kebijakan pendidikan
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian/rencana yang spesifik untuk mencapai tujuan,
3. *Program*, yaitu upaya dari pihak berwenang untuk mewujudkan tujuan,
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan serta mengevaluasi program.
5. *Effect*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder)

Selanjutnya kebijakan pendidikan dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan sesuai dengan tataran serta jangkauan kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, serta pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun tingkatan tersebut dibagi menjadi empat tingkatan pendidikan, yaitu:

1. **Tingkatan Kebijakan Nasional**
Kebijakan nasional dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijakan dalam tingkat nasional juga dikenal dengan istilah kebijaksanaan administratif.
2. **Tingkatan Kebijakan Umum**
Kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif maupun bersifat negatif mencakup seluruh instansi bersangkutan atau wilayah. Disebut juga sebagai kebijakan eksekutif, karena dikeluarkan oleh mereka yang mengemban posisi eksekutif. Yang termasuk dalam kebijakan umum yaitu, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan serta Instruksi presiden
3. **Tingkatan Kebijakan Khusus**
Kebijakan khusus ini dikeluarkan sebagai kebijakan yang menjabarkan pelaksanaan kebijakan umum. Dengan demikian kebijakan khusus ini berdasarkan pada kebijakan yang berada di atasnya. Sama halnya dengan kebijakan umum, kebijakan khusus juga dikenal sebagai kebijakan eksekutif. Yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri dalam membantu Presiden.
4. **Tingkatan Kebijakan Teknis**
Sebagai kebijakan operasional di bawah kebijakan khusus, kebijakan teknis disebut sebagai kebijakan operatif. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini merupakan suatu pedoman pelaksanaan. yang berhak mengeluarkan kebijakan teknis ini adalah mereka yang berada di posisi eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pemimpin lembaga non departemen. Yang menjadi produk dari tingkat kebijakan khusus ini meliputi peraturan, keputusan serta instruksi pimpinan lembaga. Dengan berdasarkan kepada kebijakan teknis inilah, Gubernur, Kakanwil, Bupati hingga Kandep pada masing-masing bidang melaksanakan kebijakan yang disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi di daerah mereka masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan kebijakan dari pemerintah pusat di tingkat daerah

D. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Sebelum memulai proses perumusan suatu kebijakan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pendekatan yang digunakan dalam menyusun kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan sebagai rambu-rambu dalam menyusun kebijakan agar tidak melenceng dari tujuan perumusan itu sendiri. Pendekatan dalam perumusan kebijakan, dalam hal ini kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut (Rohman, 2009):

1. Pendekatan Kebutuhan Sosial (*Social Demand Approach*)

Social Demand Approach merupakan pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan berdasar kepada aspirasi, tuntutan serta aneka kepentingan yang mendesak dalam lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengambil kebijakan terlebih dahulu mendeteksi dan menyelami aspirasi yang tengah berkembang di masyarakat pada saat itu sebelum memulai merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat dengan kondisi tersebut. Pendekatan *social demand* atau kebutuhan sosial ini tidak hanya memperhatikan tuntutan masyarakat sebelum perumusan kebijakan pendidikan, namun juga memperhatikan tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan tersebut selesai dibuat dan diimplementasikan. Aspek partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting baik sebelum, saat maupun sesudah perumusan kebijakan pendidikan. Perumusan dengan menggunakan pendekatan model ini membuat perumusan kebijakan pendidikan bersifat pasif, yaitu dimana perumusan kebijakan baru dapat dilaksanakan apabila terdapat tuntutan dari masyarakat.

2. Pendekatan *Man-Power Approach*

Berbeda dengan pendekatan tuntutan sosial, pendekatan *man-power* ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional. Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pendekatan itu tidak memedulikan keberadaan dan seperti apa tuntutan masyarakat. Perumusan kebijakan pendidikan dilaksanakan oleh pengambil kebijakan berdasarkan dari apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan rasional serta pandangan kedepan dari sudut pandang mereka. Pendekatan ini melegitimasi kekuasaan pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Pendekatan jenis ini memang bersifat lebih otoriter dan terkesan kurang menghargai demokrasi. Namun demikian, pendekatan jenis ini juga membawa sisi positif dimana proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi lebih efisien dan memiliki dimensi usia jangka panjang.

E. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan

Sebagai suatu produk sebuah lembaga, perumusan suatu kebijakan tentu harus melalui beberapa proses sebelum akhirnya menjadi suatu kebijakan yang berlaku di dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan yang juga termasuk dalam kebijakan publik juga melalui tahapan-tahapan dalam proses perumusannya. Siklus dari proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 2 : Siklus perumusan kebijakan

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam perumusan kebijakan, idealnya harus melalui lima tahapan, yaitu tahap penyusunan agenda (*agenda setting*), perumusan kebijakan (*policy formulation*), pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), pengamatan dan penilaian (*monitoring and evaluation*) (Dunn W. , 1998). Uraian lebih jelas dari tiap-tiap tahap disampaikan seperti berikut ini:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda merupakan sebuah fase dan tahap strategis penting dalam perumusan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda yang berisi serta memilih masalah-masalah apa saja yang perlu menjadi prioritas sebagai bahan pembahasan. Pada tahap ini, masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk yang kemudian akan diseleksi untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini memberi ruang bagi pemaknaan masalah mana yang dapat dikategorikan sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik. Ketika suatu isu/ permasalahan telah

mendapatkan status sebagai masalah publik, dengan sendirinya isu tersebut akan menjadi prioritas ketimbang isu-isu lainnya.

No	Tataran	Masalah
1	Private Problem	masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas.
2	Public Problem	masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas.
3	Policy Issues	perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah.
4	Systematic Agenda	isu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan
5	Institutional Agenda	serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-2 yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Gambar 3: Proses agenda setting masalah

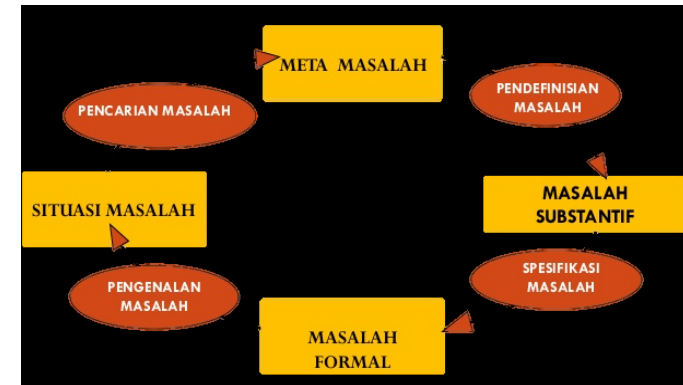
Dalam *agenda setting* juga memutuskan isu publik yang kemudian akan diangkat ke dalam suatu agenda pemerintahan. Isu kebijakan atau masalah kebijakan muncul sebagai akibat dari adanya silang pendapat di antara para aktor kebijakan mengenai suatu arah tindakan yang akan atau telah ditempuh. Bisa juga dikarenakan adanya pertentangan pandangan akan karakter/sifat terhadap permasalahan itu sendiri. Dunn (1990) menganggap isu kebijakan sebagai hasil atau fungsi dari perdebatan baik itu berkaitan tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian terhadap suatu masalah.

Tidak semua isu dapat menjadi suatu agenda kebijakan. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan, yaitu:

- isu tersebut telah mencapai suatu titik krisis di mana apabila isu tersebut dibiarkan akan menjadi sebuah ancaman serius;
- isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas dengan dampak dramatis;
- isu tersebut menyangkut emosi tertentu dari sudut pandang kepentingan banyak orang;
- isu tersebut memiliki dukungan media massa, dimana suatu isu telah menjadi sorotan dan disiarkan oleh media massa;
- isu tersebut memberikan dampak dalam skala luas;
- isu tersebut haruslah mengangkat permasalahan serta keabsahan dalam masyarakat;

g) serta menyangkut suatu permasalahan yang *update* atau terkini.

Tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan agenda kebijakan adalah tingkat urgensi, esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.



Gambar 4: Proses perumusan masalah

2. Perumusan kebijakan (*Policy Formulation*)

Masalah yang sudah dimasukkan ke dalam agenda kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut dibahas untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut merupakan hasil dari alternatif-alternatif atau berbagai pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini juga melibatkan persaingan antara berbagai pilihan alternatif kebijakan dari para pembuat (aktor) kebijakan agar bisa dipilih sebagai kebijakan untuk solusi memecahkan masalah.



Gambar 5: Aktor dalam perumusan kebijakan

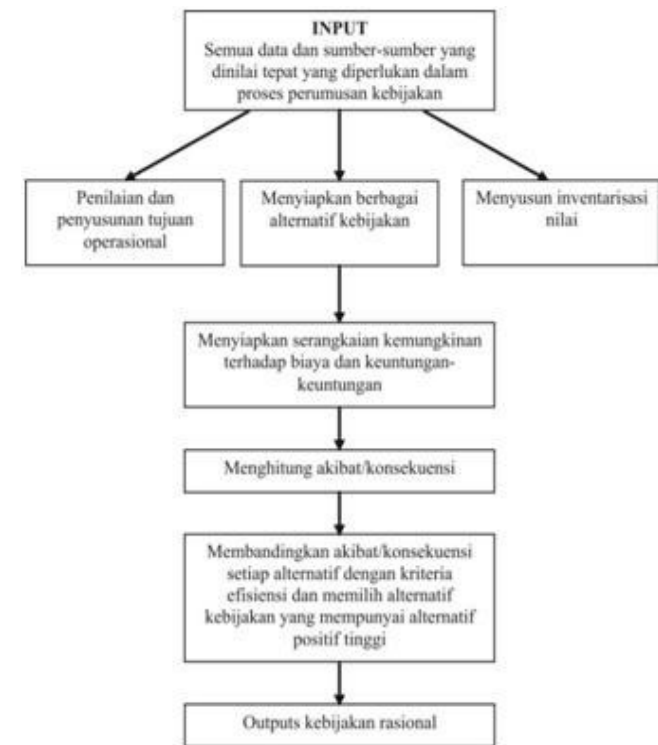
Dalam perumusan kebijakan, terdapat dua definisi formulasi yang dapat ditemukan, yaitu:

1. Formulasi efektif, dimana rumusan kebijakan yang diusulkan dianggap menjadi sebuah solusi yang valid, efisien dan dapat diterapkan. Ketika sebuah rumusan kebijakan ini dinilai tidak efektif atau tidak layak untuk diterapkan, maka rumusan kebijakan tersebut tidak perlu untuk diajukan lebih lanjut. Alternatif rumusan lainnya kemudian dapat menggantikan untuk kemudian dianalisis kelayakannya. Hal ini merupakan suatu tahap analisis dalam perumusan kebijakan.
2. Formulasi diterima, ketika arah rumusan kebijakan yang diusulkan memiliki potensi tinggi untuk diloloskan atau disahkan oleh pengambil keputusan yang sah. Pada umumnya, proses tersebut melalui suara terbanyak atau mayoritas dalam sebuah proses tawar menawar. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa rumusan kebijakan tersebut harus layak secara politis. Apabila suatu rumusan kebijakan memiliki kemungkinan untuk ditolak oleh pengambil keputusan, sebaiknya tidak perlu mengusulkan rumusan tersebut sejak awal. Tahap inilah yang disebut sebagai tahap politik perumusan kebijakan.
3. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Sebuah rumusan kebijakan harus melewati beberapa tahapan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan yang sah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sebuah rumusan kebijakan serta berbagai alternatif lainnya harus dianalisis dengan detail dan hati-hati. Analisis terhadap rumusan kebijakan meliputi analisis terhadap segala aspek mulai dari biaya-manfaat kebijakan, strategi implementasi, efek dan konsekuensi kebijakan, serta kontribusi terhadap masyarakat.

Setelah alternatif kebijakan dipilih sebagai kebijakan yang akan ditetapkan, dalam tahap decision making atau pengambilan keputusan ini juga terjadi proses adopsi/legitimasi kebijakan (policy adoption/legitimation). Tujuan dari proses legitimasi ini adalah untuk memberikan otorisasi kepada kebijakan tersebut dalam proses pemerintahan. Dengan adanya otorisasi atau legitimasi dari pemerintah ini, suatu kebijakan memiliki dasar yang kuat dalam masyarakat untuk dapat dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat.

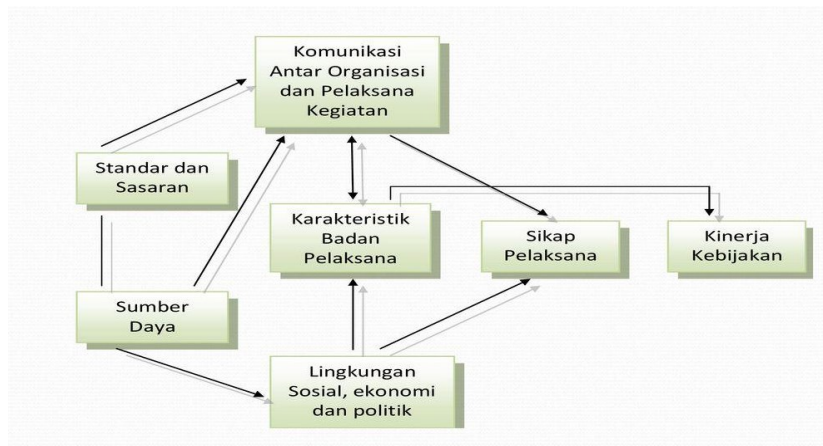
Proses pengambilan keputusan tersebut dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 6 : Bagan pengambilan keputusan (model rasional)

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Tahap ini merupakan tahap di mana alternatif kebijakan yang telah ditetapkan dan legitimasi tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini sebuah kebijakan sering menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan antara apa yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin dengan apa yang terjadi di lapangan. Guna mengupayakan implementasi kebijakan berjalan baik hingga mencapai keberhasilan, maka diperlukan penuntasan masalah yang menghambat implementasi pendidikan secepatnya. Menurut Anderson (Wahab, 1991) terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yaitu: (a) Aktor yang mengimplementasikan, (b) Hakikat proses implementasi, (c) Kepatuhan, dan (d) Efek atau dampak dari pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang terlibat di dalamnya dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 7: Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

Tipe Kriteria	Pernyataan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya Manfaat Bersih, Ratio Cost Benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Peralatan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok-kelompok berbeda?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks,
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan perefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Gambar 8 : Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (publik) William N. Dunn

5. Pengamatan dan Penilaian (Monitoring and Evaluation)

Evaluasi kebijakan juga memiliki definisi sebagai suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi serta dampak kebijakan tersebut. Evaluasi dilihat sebagai kegiatan fungsional. Yaitu evaluasi bukan hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan juga dilakukan pada keseluruhan proses kebijakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat mencakup tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program alternatif untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun pada tahapan dampak kebijakan.

Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan selama proses evaluasi menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut:

F. Model Lain Proses Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan seperti yang disampaikan sebelumnya merupakan sebuah proses perumusan kebijakan yang mengikuti model proses kebijakan rasional. Yaitu proses perumusan kebijakan yang menekankan sebagai proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir rasional. Proses siklus perumusan kebijakan diatas merupakan proses perumusan yang ideal. Namun pada kenyataannya, tidak semua kebijakan dapat dirumuskan melalui model rasional tersebut. Faktanya proses perumusan merupakan ajang tarik-menarik berbagai kepentingan dan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan. Sehingga memunculkan adanya model perumusan kebijakan yang lainnya. Model tersebut antara lain:

1. Model Inkremental (*Incremental Model*)

Dalam model inkremental, pencarian informasi terhadap permasalahan dilakukan secara terbatas, secara keseluruhan tidak dilakukan dengan sistematis dan terdapat banyak pihak atau kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sehingga cara atau upaya dalam mewujudkan tujuan kebijakan tidak dapat terlihat secara nyata dan jelas. Pilihan-pilihan dan alternatif kebijakan melalui model ini hanya dapat dinilai melalui penilaian tentang sejauh mana manfaat kebijakan tersebut terdistribusi. Dalam banyak kasus, kebijakan yang pada akhirnya dipilih merupakan kebijakan yang mendukung kelompok peserta serta seringkali mengabaikan kepentingan kelompok lain yang

secara kebetulan tidak terlibat dalam proses ini. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan pun tidak optimal dan harus diperbaiki secara terus menerus (Lindblom, 1959).

Perumusan kebijakan model inkremental ini terlihat lebih kompleks dan rumit karena pada prosesnya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan tanpa ada batasan yang jelas tentang penggambaran tujuan dan hasil serta dampak seperti apa yang ingin direalisasikan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan golongan yang saling tumpang tindih. Penggambaran tingkat kompleksitas dan kerumitan proses perumusan model inkremental ini dapat divisualisasikan seperti yang terlihat dari gambar berikut.



Gambar 9: Kenyataan dalam perumusan kebijakan (inkremental)

2. Model Tong Sampah (Garbage Can Model)

Dengan adanya kenyataan seperti itu dalam proses perumusan kebijakan, konsep tersebut semakin berkembang sehingga pada akhirnya melahirkan model ketiga, yaitu model “**tong sampah**” atau **Garbage Can**. Dinamai sebagai model tong sampah, karena dalam prakteknya, model ini mencampur aduk segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan. Model ini menegaskan bahwa terdapat tiga hal sebagai pemicu dirumuskannya sebuah kebijakan, yaitu:

- Masalah (*problem stream*), yaitu dimana sebuah perumusan kebijakan baru dianggap perlu karena muncul suatu masalah yang memerlukan penyelesaian ideal melalui penanganan sebuah kebijakan.
- Kebijakan sebelumnya atau terkait (*policy stream*), yaitu ketika sebuah kebijakan yang telah ada dan diimplementasikan dirasa

kurang mampu atau kurang optimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga diperlukan adanya kebijakan baru yang mendukung atau bahkan menggantikan kebijakan terdahulu.

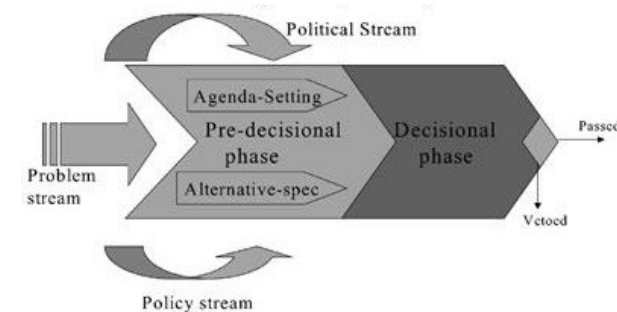
- Kepentingan politis (*political stream*), yaitu ketika sebuah kebijakan merupakan produk atau hasil dari sebuah kepentingan politik dari para aktor perumusan kebijakan.

Keberadaan ketiga aliran ini tercampur menjadi satu dan tidak dapat diduga kemana arah perkembangannya. Sehingga dapat terjadi perubahan yang cepat baik itu terhadap masalah-masalah, aktor maupun solusi yang diperkirakan (Cohen, March, & Olsen, 1972).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah kebijakan dapat diambil dengan adanya pengaruh-pengaruh atau motivasi dari hal-hal berikut ini (Kingdon, 1983):

- Decision by Oversight*, dimana sebuah keputusan diambil hanya sebagai bagian dari pengambilan keputusan (*for the sake of making a decision*), tanpa memperdulikan apakah keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah atau tidak.
- Decision by Flight*, keputusan yang dibuat tidak menyelesaikan permasalahan sampai tuntas, dan masih menyisakan pilihan atau alternatif.
- Decision by Resolution*, keputusan diambil untuk menyelesaikan masalah secara ad-hoc.

Sehingga menurut model ini, kebijakan sering tidak menyentuh esensi dari permasalahan. Hal ini terjadi dikarenakan para pengambil keputusan harus segera pindah ke ‘penyelesaian’ masalah berikutnya.



Gambar 10; Garbage Can Model

G. Evaluasi Pemahaman

1. Analisis kebijakan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui peranan kebijakan pendidikan dalam pengembangan serta peningkatan mutu sistem pendidikan di Indonesia. Jelaskan definisi, konsep dasar dan tujuan dari kebijakan pendidikan?
2. Sebuah kebijakan pendidikan dibuat sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tentang pendidikan yang muncul dalam masyarakat. Uraikan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi dibuatkannya kebijakan pendidikan?
3. Menurut saudara bagaimana fungsi kebijakan pendidikan di dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini?
4. Kebijakan pendidikan merupakan produk dari sebuah lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Sebagai sebuah produk, jelaskan bagaimana sebuah kebijakan pendidikan dibuat?
5. Kebijakan pendidikan sebagai jawaban atas tuntutan permasalahan pendidikan, jelaskan permasalahan pendidikan yang seperti apa dan bagaimana permasalahan tersebut dapat menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan pendidikan?
6. Jelaskan bagaimana proses penentuan alternatif kebijakan menjadi suatu keputusan kebijakan yang disetujui atau sah
7. Berikan contoh satu kebijakan pendidikan beserta latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut?

II

INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini, tak terkecuali di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari masih semrawutnya pendidikan nasional kita, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa pendidikan kita masih kacau dan tertinggal dengan negara lainnya. Menurut Mulyasa, pendidikan nasional kita belum berhasil dalam membentuk nilai-nilai karakter bangsa terhadap peserta didik, karena orientasi pendidikan kita lebih menekankan pada ranah kognitif. Hasil survei “Trends in International Math and Science” yang dilakukan oleh Global Institute pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi, sedangkan peserta didik Korea dapat mencapai 71%. Sebaliknya, 78% peserta didik Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara peserta didik Korea 10%.

Menghadapi permasalahan tersebut, perlu adanya inovasi dan perubahan dalam sistem pendidikan nasional kita, terutama yang berhubungan dengan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja.

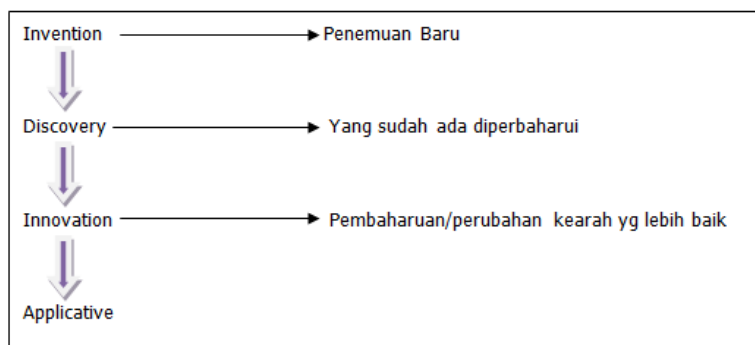
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia guna terwujudnya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan adalah inovasi atau pembaharuan dalam bidang pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam UUD 1945, undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, program-program, dan sebagainya.

Di antara kebijakan tersebut ada yang berkaitan dengan inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan inovasi dan perubahan dalam pendidikan yang pernah dilakukan antara lain Cara Belajar Siswa Aktif, Sekolah Persiapan Pembangunan, Guru Pamong, Sistem Pengajaran Modul, Sekolah Kecil, Sistem Belajar Jarak Jauh, Pengembangan Karier Guru (Sertifikasi), Penetapan Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan Lesson Study, penggantian PP No 19 tahun 2005 menjadi PP No 32 tahun 2013, dan perubahan Kurikulum KTSP (Kurikulum 2006) menjadi Kurikulum 2013.

B. Definisi Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan

Inovasi seringkali diartikan pembaharuan, penemuan, dan ada pula yang mengaitkannya dengan modernisasi. Menurut Nicholls, penggunaan kata perubahan dan inovasi sering tumpang tindih, pada dasarnya inovasi adalah ide, produk, kejadian atau metode yang dianggap baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau unit adopsi yang lain, baik itu hasil invensi maupun hasil discovery.

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan kita pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) invention dan discovery.



Gambar 11: Proses inovasi

Dalam kaitan ini, Ibrahim mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah.

Inovasi adalah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan secara sengaja dan berencana. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Istilah perubahan dan pembaruan terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah pada pembaruan ada unsur kesengajaan, sedangkan persamaannya adalah sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari sebelumnya. Nicholls (1983: 4) memberikan penjelasan tentang perbedaan antara inovasi dengan perubahan:

“Change refers to “continuous appraisal and improvement of existing practice which can be regarded as part of the normal activity while innovation refers to Idea, subject or practice as new by an individual or individuals, which is intended to bring about improvement in relation to desired objectives, which is fundamental in nature and which is planned and deliberate.”

Nicholls menekankan bahwa perubahan mengacu pada kelangsungan penilaian, penafsiran, dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan pendidikan yang ada yang dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa, sedangkan inovasi mengacu pada ide, obyek, atau praktik sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan.

Kata “baru” dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun, setiap yang baru itu belum tentu baik untuk setiap situasi, kondisi, dan tempat. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invention (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.

Inovasi juga sering diartikan dengan perubahan dan pembaharuan pendidikan, yang berarti bahwa dengan inovasi itu dunia

pendidikan dapat mengalami perubahan-perubahan serta penggantian-penggantian dengan hal yang baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan.

C. Tujuan Inovasi Pendidikan

Menurut Santoso (1974) tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Sedangkan, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektifitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan) dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya.

Arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap, yaitu:

1. Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut.
2. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, contohnya dengan meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
3. Mengusahakan peningkatan mutu yang dirasakan semakin menurun. Dengan sistem penyampaian yang baru, diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil memecahkan masalah.

Adapun masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat.
2. Laju eksplosif penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang.

3. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan kesempatan sangat terbatas.
4. Mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Belum luasnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuh suburnya suasana dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang.
6. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai.

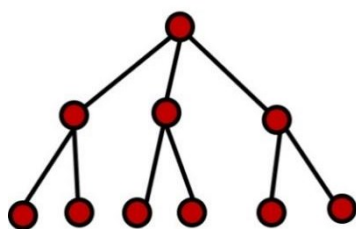


Gambar 12: Konsep Dasar Inovasi Pendidikan

D. Model Inovasi Pendidikan

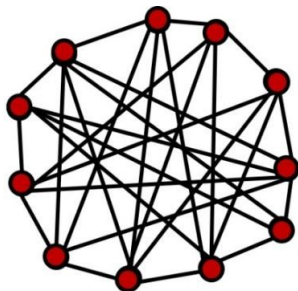
Secara umum, model inovasi dan perubahan dalam pendidikan ada dua, yaitu:

1. “Top-down model” yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional selama ini.



Gambar 13 model inovasi Top-Down

2. “Bottom-up model” yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.



Gambar 14 model inovasi Bottom-Up

E. Beberapa Inovasi dan Perubahan Pendidikan di Indonesia

Dalam bukunya Drs. H. Fuad Ihsan mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya inovasi pendidikan, antara lain:

- a. Proyek perintis sekolah pembangunan
Proyek ini bertujuan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan dan secara umum kerangka sistem pendidikan ini digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0172 Tahun 1974.
- b. Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan catatan bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepala perwakilan telah mampu

diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

- c. Proyek pamong
Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia.



Gambar 15: Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- d. SMP terbuka
Sekolah Menengah Pertama Terbuka adalah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Tugas SMPT sama dengan tujuan pendidikan umum SMP.
- e. Universitas Terbuka
UT didirikan berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 41 tanggal 11 Juni 1984, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980 dijabarkan pula struktur organisasi UT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/0/1984 setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-648/I/MENPAN/8/84. Tujuan didirikannya UT adalah untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi.

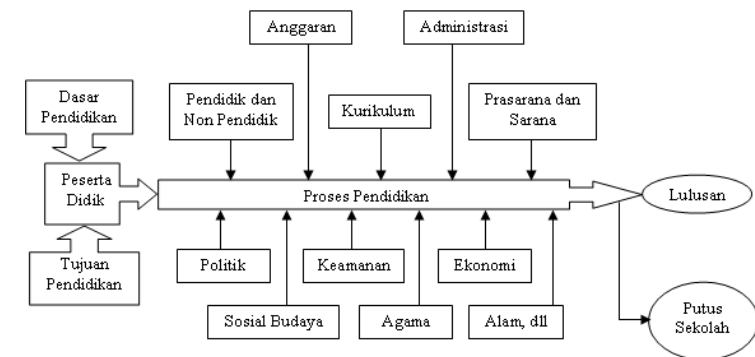
- f. Pembaruan sistem pendidikan kependidikan
Tujuannya adalah untuk menunjang pembangunan bangsa pada khususnya dan peningkatan kualitas hidup manusia pada umumnya.
- g. Kurikulum 1984
Perbaikan kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983. Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuannya.
- h. Kurikulum 1994
Yang membedakan kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya adalah pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar sembilan tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal serta penyempurnaan tiga kemampuan dasar yaitu membaca, menulis, dan menghitung yang fungsional.

F. Inovasi Pendidikan Lainnya

Selain beberapa upaya inovasi pendidikan yang telah dikemukakan di atas, masih banyak upaya inovasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Indonesia, di antaranya:

1. Sistem pendidikan

Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013. Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (Software) maupun perangkat keras (Hardware). Upaya tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang telah dilakukan penataan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013. Dalam inovasi sistem pendidikan ini pemerintah menginginkan visi, misi, dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus dapat mempertimbangkan dengan kebijaksanaan kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya, dan harus mendukung visi dan misi pendidikan nasional, serta harus mampu memelihara garis kebijaksanaan dari birokrasi yang lebih tinggi. Di samping itu, tujuan harus jelas, layak, dan dapat dicapai dengan kemampuan yang ada, serta memiliki wawasan tentang gambaran ideal kondisi pendidikan yang diharapkan di masa depan.



Gambar 16: Bagan Sistem Pendidikan

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah tersebut oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan konsideran dalam peraturan ini, perubahan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta perlunya komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.



Gambar 17: Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Jika kita mencermati isi PP No. 32 Tahun 2013 ini, terlihat perubahan-perubahan yang dilakukan tampaknya lebih cenderung berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan kurikulum dan key area pembelajaran (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian). Hal ini tampak jelas dengan disisipkannya BAB XIA yang secara khusus berisi pasal-pasal yang mengatur tentang kurikulum. Beberapa pasal dalam PP No. 19 tahun 2005 yang dihapus pun tampak lebih menggambarkan konsekuensi dari isi pasal-pasal yang dituangkan dalam BAB XIA ini.

Sementara untuk pasal yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan secara esensial tampaknya tidak banyak perubahan yang signifikan. Tidak terlalu keliru kiranya jika kita simpulkan bahwa lahirnya peraturan pemerintah ini, di antaranya dilatarbelakangi oleh semangat untuk mengganti kurikulum yang berlaku saat ini dengan tetap melanjutkan ujian nasional. Namun, ada hal yang menarik dan begitu terlihat dalam perubahan peraturan pemerintah ini, yaitu mengenai Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), dalam Peraturan Pemerintah baru ini, Ujian Nasional Pada tingkat SD dihapus. Menurut PP 32/2013 Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32/2013, Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini, bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang didalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat, yang sebelumnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Pasal 72 Ayat (1) PP ini, Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
3. Lulus ujian sekolah/madrasah;
4. Lulus Ujian Nasional.

Padahal kita ketahui bahwa ada keterkaitan antara Kurikulum dan UN. Proses Penilaian (Termasuk UN) adalah bagian dari kurikulum. UN dan Ujian Sekolah adalah bagian dari penilaian dan penilaian adalah alat evaluasi yang berfungsi sebagai umpan balik untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah baru ini juga merombak tentang delapan Standar Nasional Pendidikan. Persamaan antara PP 19/2005 dan PP 32/2013 yaitu bahwa dari delapan standar nasional pendidikan itu yaitu ada 4 standar yang masih dipertahankan dan tidak diubah, empat standar yang tidak diubah yaitu:

1. Standar tenaga pendidikan
2. Standar pembiayaan
3. Standar pengelolaan
4. Standar sarana dan prasarana

Sedangkan empat standar yang diubah dari PP 19 tahun 2005 oleh PP 32 Tahun 2013 yaitu:

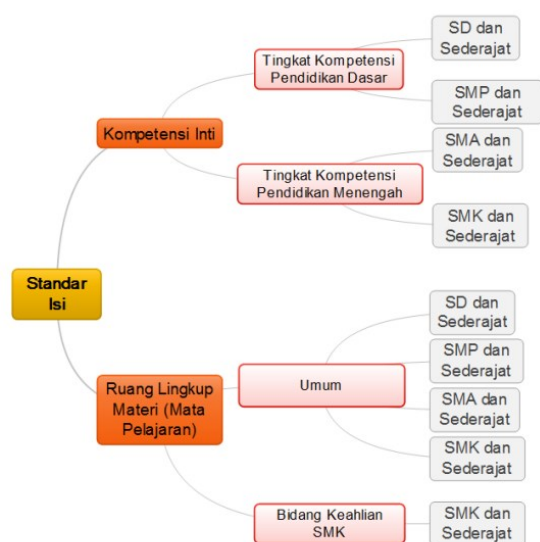
1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Lulusan
4. Standar Penilaian

Kita ketahui bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pada PP No 19 Tahun 2005 terdahulu tidak ada kata-kata BSNP. Menyangkut materi pendidikan sebagai bagian dari Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan, PP ini menegaskan bahwa ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Konsep keilmuan;
- c. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

Sementara Tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Tingkat perkembangan Peserta Didik;
- b. Kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
- c. Penguasaan Kompetensi yang berjenjang.



Gambar 18: Bagan Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 juga secara tegas menghapus Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 pada PP No. 19 Tahun 2005 yang diantaranya berisi tentang:

1. Pengelompokan mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (misalnya agama, kewarganegaraan, pendidikan jasmani, dsb);
2. Pengaturan kurikulum untuk agama, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Ketentuan mengenai beban belajar;
4. Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
5. Pengembangan kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan.

Yang paling penting untuk kita cermati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 adalah dalam standar penilaian hasil belajar. Peraturan Pemerintah baru ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk:

1. Menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
2. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
3. Memperbaiki proses pembelajaran.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidikan ini akan diatur dengan Peraturan Menteri,” begitulah yang disebutkan dalam Pasal 64 Ayat (2e) PP No. 32 Tahun 2013.

Itulah beberapa hal pokok yang perlu dicermati dari perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 ke Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013, tidak menutup kemungkinan banyak hal lagi yang berubah dalam ketentuan tersebut.

2. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dan hal pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bagian Umum dijelaskan bahwa pembaruan pendidikan memerlukan strategi tertentu, dan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional ini adalah “pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi”. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengatur bahwa; “(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.” Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 35 dinyatakan bahwa “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.”

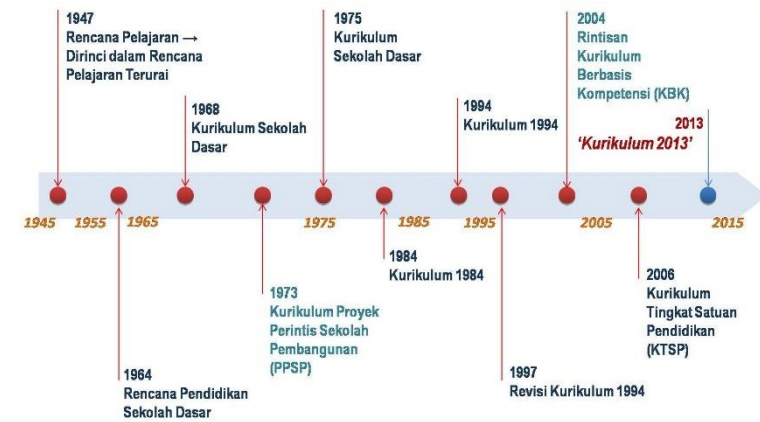
Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dialog mengenai pergantian kurikulum akhir-akhir ini dari Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai profesionalisme guru. Perubahan kurikulum sejak

Indonesia merdeka yang ke-11 kali mengikuti pola yang sama yaitu mengalir dari atas ke bawah. Dari konsep mengalir ke bawah dan harus dilaksanakan di sekolah oleh para guru. Perubahan tersebut ternyata bertentangan dengan hakikat ilmu pendidikan yaitu suatu ilmu yang teoritis praktis yang artinya pendidikan merupakan suatu proses yang diimplementasikan ke lapangan atau ke ruang kelas dan dari proses tersebut itu akan memberikan input kepada perubahan konsep. Oleh sebab itu kegagalan suatu konsep kurikulum terletak kepada implementasi guru di lapangan. Tidak mengherankan apabila berbagai kegagalan di dalam penyempurnaan kurikulum dipersalahkan atau terletak pada tanggung jawab para guru. Suksesnya Kurikulum 2013 akan terletak pada para guru dan bukan kepada siapapun juga.

Pada tahun 2012 yang lalu dunia pendidikan di Indonesia digegerkan dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam pendidikan nasional, antara lain mengenai pendidikan karakter bangsa yang sampai dewasa ini belum diketahui ujungnya. Belum selesai dengan pelaksanaan masalah tersebut, pemerintah melancarkan konsep Kurikulum 2013. Yang menyebabkan kegalauan dalam masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat intelektual ialah sangat singkatnya persiapan untuk melaksanakan Kurikulum 2013 tersebut. Dibutuhkan kurang dari setahun dalam persiapannya dan pemerintah bertekad untuk melaksanakan mulai tahun ajaran 2013. Rencana tersebut dirasakan terlalu tergesa-gesa melihat kepada kondisi lapangan pacu di Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau dengan kualitasnya yang beragam antara lain disebabkan kualitas tenaga gurunya yang belum tuntas dengan program sertifikasi.

Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah telah mengenal sepuluh kali perubahan, yang terakhir adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan sejak tahun 2006. Pengalaman apakah yang dapat kita petik dari perubahan-perubahan kurikulum di negara kita ini? Ternyata pergantian kurikulum yang silih berganti belum dapat menaikkan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian-penelitian internasional menunjukkan rendahnya mutu pendidikan nasional kita dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga. Fenomena yang mengatakan bahwa ganti menteri ganti kebijakan, ganti menteri ganti kurikulum memang benar adanya.



Gambar 19: Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Apa yang dikemukakan dalam konsep Kurikulum 2013 antara lain telah diluncurkan melalui Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Mengapa Kurikulum CBSA yang cukup modern tersebut tidak dilanjutkan atau gagal sebelum dilaksanakan? Di sini kita lihat secara konseptual CBSA dapat kita golongkan sebagai kurikulum super bahkan relevan sampai abad 21. Namun, nasib yang diderita oleh CBSA ternyata kurikulum super tersebut hanya terbatas diujicobakan, kemudian tanpa evaluasi diganti oleh kurikulum yang baru lagi. Pengalaman buruk ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk perubahan Kurikulum Nasional memerlukan jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam pelaksanaannya. Ternyata kurikulum seperti CBSA bukan hanya berkenaan dengan lapangan pacu atau mata pelajaran tetapi lebih-lebih lagi berkaitan dengan metodologi dalam proses pendidikan yang menekankan kepada peserta didik yang aktif di bawah bimbingan guru yang kreatif.

Dewasa ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami tantangan besar dan mendapat sorotan dunia. Amerika Serikat oleh lembaga American Academy of Sciences di dalam Jurnal Science bulan November 2012 yang lalu memuat artikel mengenai perubahan kurikulum di Indonesia antara lain dalam menyatukan ilmu-ilmu alam dan sosial sejak tingkat sekolah dasar dengan menerapkan prinsip tematik-integratif. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin mengembangkan minat peserta didik dalam ilmu-ilmu tersebut sejak dini dengan hanya merupakan bagian dari pengajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah menerapkan Kurikulum 2013 dengan mempersiapkan guru-guru pelaksanaannya dengan menatapnya di dalam

tempo 5 hari. Suatu optimisme yang luar biasa yang akan diletakkan di pundak guru untuk melaksanakan suatu konsep yang baru tanpa si pembuat konsep itu sendiri pernah melaksanakannya di dalam praktik.



Gambar 20: Tema Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri merupakan upaya dalam menghasilkan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Dalam prakteknya untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan dilakukan melalui penguatan terhadap aspek yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Pengembangan kurikulum sebaiknya terus dapat dilakukan guna mencapai keselarasan antara kebutuhan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat dunia.

G. Evaluasi Pemahaman

1. Jelaskan definisi inovasi pendidikan menurut para ahli!
2. Jelaskan pengertian invention dan discovery!
3. Sebutkan tujuan inovasi pendidikan Indonesia!
4. Sebutkan dan jelaskan upaya inovasi pendidikan menurut Drs. H. Fuad Ihsan!
5. Mengapa penerapan inovasi pendidikan sering mengalami kegagalan?

III

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

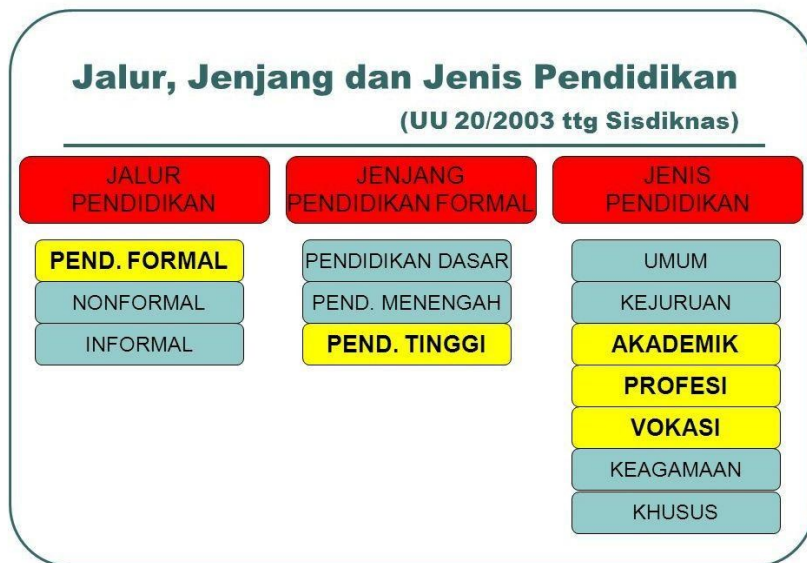
A. Pengertian Pendidikan

Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Dalam proses manusia membentuk peradaban, pendidikan menjadi bagian yang penting. Pada dasarnya, pendidikan dan peradaban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dengan mudah. Keduanya sudah saling bersinggungan dalam membentuk budaya dan kebudayaan.

Pendidikan secara umum adalah pembelajaran dari pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang selalu diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan serba sistematis dengan tujuan untuk mencapai taraf hidup tertentu atau untuk kemajuan yang dianggap lebih baik.

Melalui pendidikan kemudian karakter dapat dikembangkan dengan berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai-nilai keagamaan, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat pendidikan dapat diajarkan melalui bimbingan orang lain dan juga dapat dilakukan secara otodidak atau belajar sendiri. Pendidikan yang paling umum di berbagai daerah atau negara adalah dengan bersekolah. Di Indonesia salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang baik dan mulia, mempunyai jiwa dan raga yang tubuh, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis serta mempunyai tanggung jawab yang besar.

Bentuk-bentuk pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dapat diraih dengan menghadiri lembaga pendidikan seperti sekolah dan institusi-institusi yang dianggap kompeten. Pendidikan informal adalah pendidikan yang bisa didapatkan diluar lembaga sekolah.



Gambar 21: Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

1. Pendidikan formal³

Pada umumnya yang diketahui sebagai pendidikan formal adalah lembaga sekolah. Syarat sebagai lembaga pendidikan formal adalah pendidikan diadakan di tempat tertentu seperti gedung sekolah, teratur secara sistematis, mempunyai jenjang dan kurun waktu tertentu. Pendidikan formal biasanya berlangsung dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Pendidikan di lembaga formal adalah salah satu pilihan yang paling mudah bagi seseorang atau warga suatu negara untuk meningkatkan pengetahuan dan juga untuk membimbing serta membina generasi muda yang biasanya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dan kerjasama masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala yang menjadi aktivitas di dalamnya direncanakan dan dijalankan sesuai dengan apa yang disebut dengan kurikulum. Dengan adanya kurikulum akan memudahkan dalam membantu peserta didik. Manfaat kurikulum adalah:

³ Sumber daring: <https://andhiecka.wordpress.com/2011/11/29/pendidikan-formal-non-formal-dan-in-formal/>

- (1) Memudahkan peserta didik atau murid bergaul dengan guru, karyawan, teman sendiri, dan masyarakat sekitar.
- (2) Para peserta didik atau murid bisa belajar taat kepada peraturan atau menjadi disiplin.
- (3) Mempersiapkan peserta didik terjun ke masyarakat dengan memahami dan menjalankan norma-norma yang berlaku yang harus dipegang teguh.



Gambar 22 : Pendidikan formal: belajar di sekolah

Tujuan dari pengadaan lembaga pendidikan formal adalah sebagai tempat sumber ilmu pengetahuan, tempat untuk mengembangkan bangsa, dan tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu suatu hal yang penting sebagai bekal hidup di dalam masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan siap untuk membantu memberikan sumbangsih untuk masyarakat, baik daerah maupun pusat.

2. Pendidikan non-formal⁴

Lembaga pendidikan non-formal atau yang diketahui juga sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) adalah semua bentuk pendidikan yang penyelenggaraannya dengan sengaja, tertib dan terencana, serta berada di luar kegiatan sekolah formal. Komponen-komponen yang

⁴ Sumber daring: <https://andhiecka.wordpress.com/2011/11/29/pendidikan-formal-non-formal-dan-in-formal/>

diperlukan disesuaikan dengan keadaan peserta didik atau keadaan anak sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang dianggap memuaskan. Komponen-komponen penunjang lembaga pendidikan non-formal sebenarnya hampir sama dengan lembaga sekolah, antara lain seperti:

- (1) Tenaga pengajar seperti guru, tutor, atau pembimbing
- (2) Fasilitas
- (3) Cara penyampaian atau metode yang biasanya berbeda dari yang diajarkan di sekolah formal
- (4) Waktu yang dipergunakan yang relatif tidak sama dengan sekolah formal

Pendidikan non-formal biasanya meliputi pendidikan masyarakat, yang berkaitan dengan keolahragaan, dan pembinaan generasi muda.



Gambar 23: Pendidikan non-formal: kursus menjahit

3. Pendidikan informal⁵

Pendidikan informal biasanya berlangsung di tengah lembaga keluarga. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pendidikan informal juga terjadi lingkungan sekitar keluarga, seperti pasar, terminal, dan tempat-tempat umum lainnya di dalam masyarakat yang dapat berlangsung setiap hari tanpa ada batas waktu.

Sifat lembaga pendidikan informal ini bersifat, seperti di antaranya:

- (1) Tidak mempunyai suatu organisasi yang dengan ketat mengatur segala sesuatunya.

⁵ Sumber daring: <https://andhiecka.wordpress.com/2011/11/29/pendidikan-formal-non-formal-dan-in-formal/>

- (2) Pendidikan informal ini tidak mempunyai program waktu, tidak terbatas, dan tidak diperlukan evaluasi.
- (3) Pendidikan informal memberikan pengaruh yang kuat dalam pembentukan pribadi seseorang atau peserta didik yang tentu saja penting.

Bentuk pendidikan ini dapat berlangsung di luar sekolah, tetapi dapat juga berlangsung di dalam sekolah. Selain terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan informal yang tidak terbatas waktu dan tempat pun dapat terjadi di dalam sekolah ketika peserta didik atau seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk guru, teman. Bisa di saat waktu istirahat sekolah, bermain dengan teman, makan siang bersama teman, atau waktu saat harus berinteraksi dengan guru yang memberikan tindakan tertentu pada anak didik.



Gambar 24: Pendidikan informal: belajar tidak di kelas



Gambar 25: Pendidikan informal: Belajar wayang dari kakek

B. Pengertian Sosial Budaya

Sosial budaya berasal dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat

sekitar. Sedangkan, budaya berasal dari kata 'bodhya' yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Sedangkan, pengertian budaya menurut KBBI adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 26: Contoh sosial budaya: adat-istiadat di Bali

Menurut Andreas Eppink, sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sedangkan, Burnett melihat kebudayaan adalah keseluruhan berupa kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan olah pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat dan keseluruhan bersifat kompleks⁶.

Sosial budaya memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positifnya, antara lain:

- (1) Sebagai pedoman dalam hubungan manusia dengan komunitasnya atau kelompoknya.

⁶ Sumber daring: <https://sosialbudayapahoa.wordpress.com/>

- (2) Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang.
- (3) Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya.
- (4) Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.
- (5) Sebagai suatu ciri khas setiap kelompok manusia.
Dampak negatifnya dapat berupa:
 - (1) Menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam.
 - (2) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, seperti tingginya tingkat kriminalitas.
 - (3) Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat.
Sosial budaya atau kebudayaan ini pada dasarnya tercipta karena adanya interaksi antar manusia dengan alam sekitarnya.

C. Pengertian Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya oleh beberapa ahli diartikan seperti berikut⁷:

- (1) Max Weber
Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya.
- (2) Kingsley Davis
Perubahan sosial budaya yang mencakup perubahan segenap cara berpikir dan bertindak laku, yang ditimbulkan karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif.
- (3) W. Kornblum
Perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama.
- (4) Selo Soemardjan
Perubahan sosial budaya adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial yang dimaksud tersebut mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

⁷ Sumber daring: <https://sosialbudayapahoa.wordpress.com/>

(5) J. L. Gillin dan J. P. Gillin

Perubahan sosial adalah variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, dalam kebudayaan materil, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok.

Dari kelima pengertian perubahan sosial budaya tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata mereka menyebutkan adanya perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 27: Perubahan sosial budaya: pasar tradisional ke online



Gambar 28: Perubahan sosial budaya: membajak sawah dari sapi ke mesin

D. Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya

Kebudayaan atau sosial budaya sendiri dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan juga bisa dilihat sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Berdasarkan pengertian budaya maka dapat dilihat bahwa ini adalah sebuah konsep yang tidak dapat dilihat bentuknya. Meskipun tidak dapat dilihat, budaya dapat dirasakan dan sudah membentuk kehidupan manusia, seperti adat istiadat dan kebudayaan yang sudah berkembang serta sukar diubah. Sebagai sistem hasil dari akal budi, kebudayaan yang masyarakat miliki telah menjadi kekuatan yang tidak tampak dengan kemampuan menggiring dan mengarahkan manusia yang terlibat dan mendukung kebudayaan tersebut untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi kepunyaan mereka, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kesenian, dan masih banyak lainnya.

Akal budi atau budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu tentu saja merupakan hasil dari suatu proses yang kemungkinan berlangsung terus-menerus, berkelanjutan tanpa henti. Pendidikan menjadi bagian penting dalam membentuk budaya. Melalui pendidikan, pengetahuan yang membentuk akal budi dan budaya dapat diperoleh. Pengetahuan ini disampaikan melalui proses pendidikan yang tidak melulu terjadi di sekolah, tetapi juga bisa melalui pewarisan atau transmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga. Selain itu, pendidikan juga bisa terjadi melalui suatu proses berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya.

Pendidikan yang terjadi dalam berbagai macam proses inilah yang pada akhirnya terus bersinggungan dengan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana akal budi terbentuk yang akan juga mengubah kebudayaan suatu masyarakat, baik disadari maupun tidak. Begitu pun sebaliknya, pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya.

Melalui proses pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan yang mempunyai karakter berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan memelihara sebuah hubungan timbal balik yang menjadi penentu proses-proses perubahan tatanan sosial budaya yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Sebaliknya, yang terjadi di dalam masyarakat

sosial juga selalu mengalami dinamika perkembangan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor utama yang sudah menjadi bagian dalam membentuk pendidikan manusia.

Adanya pola pikir baru dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat modern sudah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk menghasilkan nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan sosial budaya yang sedang atau telah berkembang dalam masyarakat. Dalam kasus ini, pendidikan tak pelak menjadi suatu alat kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan sebetuk sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman yang semakin maju.

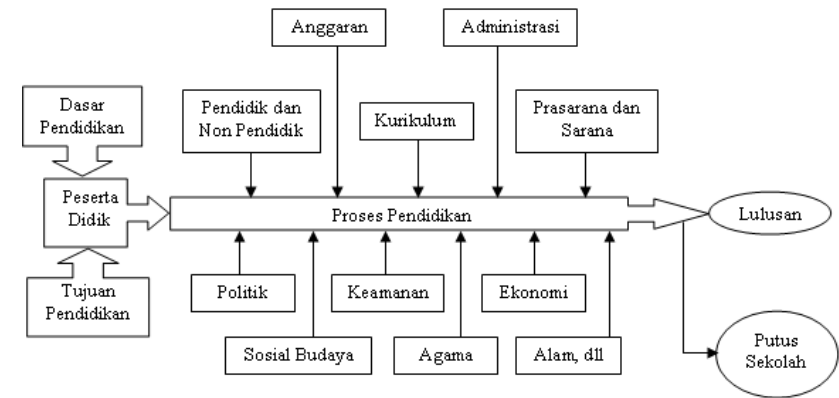
Sementara itu, sosial budaya yang juga berubah seiring abad globalisasi sekarang ini telah menyajikan nilai-nilai baru, pengertian atau definisi baru serta perubahan-perubahan di seluruh ruang lingkup kehidupan manusia yang waktu kedatangannya tidak pernah bisa diduga-duga. Sehingga, dunia pendidikan pada akhirnya juga menyesuaikan diri dengan perubahan sosial budaya dengan cara membekali diri melalui penciptaan perangkat pembelajaran yang relevan sesuai dengan tuntutan global. Hal-hal tersebut di antaranya:

- (1) Penguasaan teknologi informasi
- (2) Penyediaan SDM yang profesional
- (3) Terampil dan berdaya guna bagi masyarakat
- (4) Kemampuan dan kemahiran menerapkan IPTEK
- (5) Perwujudan tatanan sosial masyarakat yang terbuka
- (6) Mempunyai sifat humanis, demokratis, dan progresif dalam menghadapi kemajuan zaman.



Gambar 29 : Perubahan sosial budaya dalam pendidikan

E. Pendidikan sebagai Instrumen Sosial Budaya



Gambar 30 : Sistem Pendidikan

Pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari lingkup sosial budaya atau kebudayaan. Alam telah mendidik manusia menjadi suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan. Sebagai suatu bentuk hasil pembelajaran manusia dengan alam, kebudayaan atau sosial budaya menghasilkan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Dan, selama kehidupan manusia semakin berkembang, unsur-unsur kebudayaan selalu berubah menyesuaikan perkembangan zaman.

Pendidikan adalah salah satu agen yang berfungsi sebagai yang mentransmisikan produk budaya kepada anggotanya, khususnya para generasi muda. Dalam hal ini, pendidikan dimanfaatkan sebagai wahana pembelajaran dan wahana pengajaran nilai-nilai budaya. Dengan pendidikan yang berlangsung antara pendidik dan murid dapat dilihat sebagai proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Melalui simbol-simbol, kebudayaan dilestarikan dan dikembangkan. Dalam proses belajar-mengajar, simbol-simbol itu diturunkan dan dipelajari sehingga kebudayaan suatu masyarakat tertentu telah mendarah daging dalam kepribadian anggota-anggotanya.

Berikut ini diterangkan tentang pendidikan dan sosial budaya atau kebudayaan:

- (1) Kepribadian dalam proses sosial budaya/kebudayaan

Fungsi pendidikan dalam proses kebudayaan dapat ditemukan dalam perkembangan kepribadian manusia. Kepribadian manusia mempunyai pengaruh besar dalam terbentuknya kebudayaan. Manusia

sebagai individu adalah pencipta sekaligus tukang manipulasi kebudayaan. Hubungan kepribadian dan kebudayaan disebut dengan ‘sebab-akibat sirkuler’ yang dapat diartikan bahwa di antara keduanya terdapat suatu interaksi yang saling menguntungkan. Sederhananya, di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan di sisi lain kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Melalui hubungan ini pendidikan dapat dilihat bukan sebagai transmisi kebudayaan secara pasif tetapi juga sebagai proses pengembangan kepribadian yang kreatif.

Berbeda dengan hewan, apa yang diturunkan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah tingkah laku yang bisa dipelajari kembali berulang-ulang. Di sinilah pentingnya pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia dalam masyarakat sosial budaya. John Gilling menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalisis mengenai perkembangan kepribadian manusia:

- (1) Kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar
 - (2) Kebudayaan mendorong secara sadar maupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu.
 - (3) Kebudayaan mempunyai sistem “reward and punishment” terhadap perilaku-perilaku tertentu. Yang sesuai dengan sistem nilai kebudayaan akan mendapat reward atau hadiah, sedangkan yang tidak sesuai dengannya akan mendapatkan hukuman atau punishment.
 - (4) Kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar.
2. Penerusan kebudayaan

Transmisi kebudayaan adalah salah satu proses yang paling dikenal luas tentang sosial budaya atau kebudayaan. Dalam proses inilah kebudayaan diteruskan dari generasi satu ke berikutnya. Manusia juga dapat mengubah kebudayaan sehingga sifat kebudayaan tidaklah statis tetapi dinamis yang dapat secara terus-menerus berubah-ubah.

Menurut Fortes (Koentjaraningrat, 1991) terdapat tiga unsur utama dalam transmisi, yaitu:

- (1) unsur-unsur yang ditransmisi: nilai-nilai budaya, adat-istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat, berbagai kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi anggota masyarakat.
- (2) proses transmisi: proses-proses imitasi, identifikasi dan sosialisasi.
- (3) cara transmisi: melalui perbandingan.

3. Pendidikan dan Proses Pembudayaan

Melalui transmisi kebudayaan dapat dilihat nilai-nilai kebudayaan bukan hanya dipindahkan dari satu generasi ke generasi muda berikutnya dengan pasif. Pribadi-pribadi di dalamnya merupakan agen yang kreatif dan selalu bergerak secara dinamis, tidak pasif. Di dalam proses pembudayaan ini terdapat (1) inovasi dan penemuan, (2) difusi kebudayaan, (3) akulturasi, (4) asimilasi, dan (5) prediksi masa depan.



Gambar 31: Pendidikan: merobohkan tembok pembatas dan instrumen sosial budaya

F. Evaluasi Pemahaman

1. Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Dalam proses manusia membentuk peradaban, pendidikan menjadi bagian yang penting. Jelaskan dengan bahasa saudara sendiri, bagaimanakah keduanya saling bersinggungan?
2. Ada tiga jenis pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Jelaskan definisi dari ketiga jenis pendidikan tersebut!
3. Sosial budaya berasal dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Jelaskan pengertian dari kedua kata tersebut dan jabarkan tentang definisi sosial budaya sesuai dengan pemahaman saudara!
4. Perubahan sosial budaya terjadi di dalam masyarakat dan tidak dapat dihindarkan. Menurut saudara, bagaimanakah definisi perubahan sosial budaya secara sederhana?
5. Pendidikan dalam prosesnya juga berhubungan dengan perubahan sosial budaya. Sebutkan apa sebenarnya fungsi pendidikan di dalam perubahan sosial budaya! Bagaimana keduanya saling bersinggungan? Berikan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat sekitar saudara.

IV

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Dampak positifnya adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali berlawanan dengan nilai dan norma kehidupan yang telah ada di masyarakat. Dalam hal inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar mempunyai peran yang sangat penting untuk memelihara dan melindungi nilai dan norma kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan yang benar dan bermutu memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara jati diri dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi.

Oleh karena proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi “subjek” pengembangan IPTEK dan globalisasi.

Selain itu, pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan

pengembangan pendidikan dasar dan menengah harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam pemahaman terhadap pendidikan dasar dan menengah tersebut. Dengan pemahaman yang sinergis ini, diharapkan masa depan jenjang pendidikan di Indonesia akan lebih efektif dan bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

B. Konsep Dasar Analisis Kebijakan

Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan dapat dijelaskan sebagai proses menghasilkan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam definisi yang luas ini analisis kebijakan setua peradaban itu sendiri, dan mencakup berbagai bentuk pengkajian, dari penggunaan mistik atau tenaga gaib sampai ke ilmu-ilmu modern. Keuntungan dari rumusan yang umum ini adalah bahwa rumusan tersebut memungkinkan kita mengkaji variasi makna di masa lalu yang telah mewarnai proses pembuatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan menjadi *polisi* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul etimologis kata *policy* sama dengan dua kata penting lainnya: *police* dan *politics*. Inilah salah satu alasan mengapa banyak bahasa-bahasa modern, misalnya Jerman dan Rusia, hanya mempunyai satu kata (politik, politika) untuk dua pengertian *policy* dan *politics*. Ini juga merupakan salah satu faktor yang saat ini menimbulkan kebingungan seputar batas disiplin ilmu politik, administrasi negara, dan ilmu kebijakan, semuanya menaruh perhatian besar pada studi politik (*politics*) dan kebijakan (*policy*).

Ali Imron dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Carter V. Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai

pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri berubah, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh, menteri berganti, berubah pula kebijakannya.

C. Pendidikan Dasar: Esensi dan Karakteristik

Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di masa depan memerlukan berbagai input pandangan, antara lain: gagasan tentang pendidikan dasar masa depan. Sehubungan dengan pendidikan dasar masa depan tersebut, PBB melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI. Komisi melaporkan hasil karyanya dengan judul *Learning: The Treasure Within* (1996). Komisi memusatkan pembahasannya pada satu pertanyaan pokok dan menyeluruh, yaitu: jenis pendidikan apakah yang diperlukan untuk masyarakat masa depan? Rekomendasi dan gagasan komisi tersebut tentang pendidikan masa depan, khususnya pendidikan dasar merupakan salah satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

Komisi Pendidikan untuk Abad ke 21 melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor” untuk hidup. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak yang pada prinsipnya berlangsung dari usia sekitar 3 tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996).

Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan masyarakat dunia, termasuk di dalamnya lembaga satuan pendidikan. Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh

kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak asasi manusia.

Pada tahap awal, pendidikan dasar berusaha mengecilkan berbagai perbedaan yang alami dari berbagai kelompok masyarakat, seperti: perempuan, penduduk pedesaan, orang miskin di kota, minoritas etnik yang bersifat marginal, dan anak-anak yang tidak bersekolah dan bekerja. Pendidikan dasar dalam waktu yang sama bersifat universal dan spesifik. Pendidikan dasar harus memberikan hal umum yang mempersatukan semua manusia, sedangkan dalam waktu yang sama harus berkenaan dengan tantangan khusus dari setiap kelompok peserta didik yang sangat berbeda.

Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan “kualitas pendidikan” yang membagi dunia menjadi 2 kelompok, yaitu: kelompok negara industri dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta pengetahuan dan keterampilan yang tersedia dan kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka pendidikan dasar perlu untuk memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang.

Dengan mendefinisikan keterampilan kognitif dan efektif yang perlu dikembangkan, serta aspek pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pendidikan dasar, maka mungkin para ahli pendidikan dapat memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka.

Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa program pendidikan dasar yang bermutu hanya ditujukan untuk orang dan kelompok tertentu, terutama pada institusi pendidikan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dasar “favorit”. Pada lembaga persekolahan ini tidak cukup ruang bagi kelompok lain untuk mengakses pendidikan tersebut. Apabila dibiarkan, maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak bangsa.

Di samping itu, masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar, atau walaupun sekolah tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ide-ide “pendidikan untuk semua” yang antara lain membuat kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan dasar di manapun dan

kapanpun. Di samping itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya.

Untuk mencapai sasaran pendidikan dasar yang bermutu selama ini masih banyak bergantung pada lembaga pendidikan formal yang konvensional atau sejumlah lembaga pendidikan non formal, baik yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Padahal untuk menjangkau semua peserta didik, kemampuan lembaga tersebut terbatas mengingat beragamnya kondisi geografis dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk membelajarkan lebih banyak warga negara, perlu diupayakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan untuk menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran program pendidikan dasar 9 tahun.

D. Praktik Pendidikan Dasar di Indonesia

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di SD/MI dan tiga tahun di SMP/MTs atau satuan pendidikan yang sederajat.



Gambar 32: Praktik Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/SD)

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 tahun. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan *universal education* daripada *compulsory education*. *Universal education* berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan.

Bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia terdiri atas 10 wahana dan 4 rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu:

1. Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong.
2. Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu.
3. Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP.
4. Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Hasil yang telah dicapai cukup memuaskan ditunjukkan dengan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan SMP/MTs. Namun, akibat krisis ekonomi dan terjadinya konflik sosial di berbagai daerah yang mengganggu program-program pendidikan dasar, maka angka partisipasi menjadi terganggu. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan dan kemunduran, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional.

Sejak berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di

Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs.

Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar yang mencakup standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program PAUD, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Subdinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Selain itu, Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs.



Gambar 33 : Jenjang Pendidikan Formal di Indonesia

E. Pendidikan Menengah

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menengah adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan menengah.

Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

Secara umum, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan menengah yang tertuang meliputi kelompok mata pelajaran: agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; dan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP Nomor 19/2005 Pasal 7.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik sedangkan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: program Ilmu

Pengetahuan Alam; program Ilmu Pengetahuan Sosial; program Bahasa; program Keagamaan khusus untuk MA.

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya.

Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran dasar kejuruan, muatan lokal dan pengembangan diri.

Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran khusus.

Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas 8 sampai dengan sepuluh mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri.

Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai dengan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita dan tunadaksa, dan bina pribadi untuk peserta didik tunalaras.

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I pasal 1 ayat 1 disebutkan: guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (2006: 3). Dalam UU tersebut selanjutnya dikatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (2006: 10).

Guru mempunyai tugas ganda yang luas, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua perannya dengan baik. Menurut Armstrong dalam bukunya *Secondary Education* (1983: 406) peranan guru ada 6 yaitu:

- a. Guru sebagai instruktur
Tanggung jawab instruksional guru ialah berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif.
- b. Guru sebagai manajer
Guru sebagai manajer bertanggung jawab untuk mengatur semua tugas-tugasnya dalam mendidik anak di kelas yang artinya semua

komponen sekecil apapun yang ada di kelas harus diatur sedemikian rupa, karena ia berlangsung sebagai sebuah sistem, sehingga ia harus hati-hati dalam menyiapkan materi ajar, sarana prasarana, metode, pengaturan siswa di kelas dan lain-lain.

- c. Guru sebagai pembimbing
Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama. Sehubungan dengan perannya sebagai pembimbing, seorang guru harus mengenal kondisi siswanya dengan baik, berhubungan baik dengan orang tua siswa, bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah siswa, dan lain-lain.
- d. Guru sebagai evaluator
Penilaian merupakan suatu keharusan bagi seorang guru, untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru dalam menjalankan tugas kesehariannya yaitu mendidik tidak akan luput dari penilaian, baik aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif. Ketiga aspek ini dapat terwujud dengan baik jika seorang guru selama menjalankan tugasnya melakukan penilaian dengan baik.
- e. Guru sebagai anggota organisasi profesi
Tujuan utama dari organisasi profesi adalah membantu para guru untuk meningkatkan profesinya, karena bagaimanapun juga persoalan pendidikan yang begitu kompleks tidak akan bisa diselesaikan dengan beberapa guru tanpa melalui organisasi profesi, sehingga peranan dan tanggung jawab guru akan semakin jelas dan terarah (Armstrong, 1983: 419).
- f. Guru sebagai spesialis hubungan masyarakat
Guru harus mampu memainkan peran sebagai spesialis hubungan masyarakat, terutama dalam bekerja sama dengan orang tua siswa. Pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat positif dan negatif terhadap sekolah cenderung tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut memandang sekolah. Oleh karena itu, para guru harus tetap menjaga hubungan yang terbuka dan positif dengan para orang tua siswa di mana anak-anak mereka bersekolah.

F. Kebijakan Pendidikan di Indonesia dari masa ke masa

1) Zaman Pergerakan: Masa Kolonial Belanda

Di zaman kolonialisme, pendidikan sebagai cermin dari sistem ekonomi kolonial yang bersifat penghisapan bangsa atas bangsa. Pendidikan dirancang oleh kekuasaan politik kolonialisme yang

bersifat diskriminatif. Pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pendidikan bagi kaum kolonialis dan pendidikan bagi bangsa terjajah atau kaum pribumi.

Setelah VOC mengalami kemunduran, pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan Belanda, bersamaan dengan peristiwa tersebut terjadi pulalah perubahan pandangan tentang prinsip pendidikan baik di Eropa maupun Hindia Belanda. Salah satu prinsipnya adalah sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial Belanda. Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat.

Berawal dari prinsip inilah, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-anak bangsawan bumiputera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak akan menjadi penerus tangan-tangan penjajah sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia (Ary H. Gunawan, 1985: 11).

Pengaruh “Aufklärung” pada abad ke-18 dari Eropa memberikan angin segar untuk pendidikan di Indonesia. Paham ini menjadi pelopor dari sistem pendidikan bar, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang kemudian menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja atau penganut agama tertentu yang mengutamakan bagi warga gereja atau penganut agamanya masing-masing, maka paham ini memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat yang membebaskan kewajiban itu kepada negara (pemerintah) (Ary H. Gunawan, 1985: 12).

Sebagai pengaruh dari paham ini, terbitlah Keputusan Raja Belanda pada tanggal 30 September 1848 No 95 yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk membiayai pendirian sekolah-sekolah bumiputera di pulau Jawa yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri (Ary H. Gunawan, 1985: 12).

Berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 September 1892, termuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebijakan pendidikan dasar sebagai berikut. Sekolah dasar Bumiputera dibedakan menjadi:

- a. Sekolah Dasar Kelas Satu (De Eerste School) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak para pemuka, tokoh terkemuka, dan orang-orang terhormat bumiputera.

- b. Sekolah Dasar Kelas Dua (De Tweede Klasse School) adalah sekolah bagi anak-anak bumiputera pada umumnya, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat biasa pada umumnya (Ary H. Gunawan, 1985: 13).

Sekolah Dasar Kelas Satu itu kemudian menjadi ELS (Europe Lagere School) untuk anak-anak orang Belanda di Indonesia dan anak bangsawan; HIS (Hollandsch Inlandsche School) untuk anak-anak tokoh bumiputera, anak-anak pegawai negeri (ambtenaar) yang bergaji sekurang-kurangnya f.75,- sebulan atau bertitle Raden (Ary H. Gunawan, 1985: 16).



Gambar 34: Gambaran Tingkatan Sekolah Masa Pemerintahan Hindia-Belanda

Di samping kedua Sekolah Dasar Negeri elite tersebut terdapat pula sekolah elite di Tondano (1865-1872 sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, serta Probolinggo (1878) yang sering disebut dengan “Sekolah Raja” (Hoofdenschool). Terdapat tingkatan lanjutan Sekolah Raja, yaitu MOSVIA (setingkat SMTA) atau Middelbare Opleiding School Voor Indische Anbtenaren. Selain itu juga didirikan

Sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertukangan dan Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool). Pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah bagi wanita, yaitu (Hollandsch Burgerlijke School) untuk gadis Betawi. Selain itu didirikan pula Sekolah Dokter (Ary H. Gunawan, 1985: 18).

Kebijakan pendidikan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda melalui Politik Etis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

- b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

2) Pendidikan Masa Penjajahan Jepang

Pada awal pendudukan Jepang, sekolah-sekolah ditutup yang kemudian pada akhir April 1942 sekolah-sekolah dibuka kembali dengan sistem baru. Bekas sekolah desa (volk school), vervolgschool (sekolah lanjutan), volledige tweede klas school (sekolah pribumi lengkap), dan meisjes vervolgschool (sekolah lanjutan putri) dibuka kembali dengan dasar Undang-Undang No. 12.

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah militer Jepang di Indonesia sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda, karena semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Dengan menyederhanakan sistem pendidikan dan menghilangkan dualisme pendidikan pemerintah Jepang memperoleh dua keuntungan sekaligus.

Pertama, mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang rumit dan memerlukan kontrol yang ketat dari pemerintah, karena penyelenggaraan pendidikan yang berlapis-lapis. Kedua, dihapusnya dualisme pendidikan mendukung propaganda Jepang dalam rangka mengambil simpati masyarakat pribumi saat itu, bahwa tidak adanya pelapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan membuat semua warga Indonesia menjadi mengerti akan pentingnya pendidikan.

Apabila dilihat dari riwayat kedatangannya, setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak saat itulah, Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapusnya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial (dualisme pendidikan) di era penjajahan Belanda.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat), lama studi 6 tahun. Termasuk SR (Sekolah Rakyat) adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda; (2) Pendidikan Lanjutan, yang terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun; (3) Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian; (4) Pendidikan Tinggi.

Dalam menerapkan kebijakan pendidikannya, guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan the Triple Movement yang sudah dibentuk sebelumnya tetapi tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Namun demikian, Putera akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka menguji coba format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal.

Kebijakan untuk menyederhanakan sistem persekolahan oleh pemerintah Jepang menimbulkan banyak sekali dampak setelahnya. Pendidikan yang sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif menjadi lebih sederhana dan dinyatakan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, rupanya kebijakan tersebut kurang membawa dampak positif di masyarakat. Dampak pertama yang terlihat dari penerapan kebijakan tersebut adalah kebijakan peleburan mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian ditutup dan tidak beroperasi lagi.

Selain menghapus dualisme pendidikan dan menggantinya dengan kebijakan sekolah umum serta memberi kesempatan kepada seluruh lapisan untuk dapat mengakses pendidikan, pemerintah militer Jepang di Indonesia juga berusaha menghapuskan pengaruh Barat dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara menghapus Bahasa Belanda sebagai Bahasa pengantar di sekolah. Bahasa yang diperbolehkan saat itu adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang juga lebih ditekankan pada physical training, bukan mental disiplin.

Pendidikan militer ditekankan dalam rangka tercapainya target Jepang untuk memenangkan perang melawan sekutu.

3) Pendidikan Zaman Orde Lama

Segera setelah kemerdekaan, para pemimpin Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan nasional. Dicanangkanlah bahwa dalam 10 tahun ke depan pada waktu itu seluruh anak Indonesia harus bisa menikmati sekolah. Oleh karena itu, dilakukan berbagai pembenahan seperti penambahan jumlah pengajar, pembangunan gedung sekolah, dan sebagainya.

Pemerintah juga membagi tingkatan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Pada awal kemerdekaan, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat "nation and character building" dalam pendidikan Indonesia.

Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2. (Rianti Nugroho, 2008: 16). Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan.

4) Pendidikan Masa Orde Baru

Pendidikan pada masa kekuasaan Orde Baru menjadi salah satu kebijakan politik dan pemerintahan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan pada masa ini dijadikan sebagai salah satu sektor utama untuk menyokong pembangunan ekonomi Orde Baru. Target utama pembangunan pendidikan nasional pada Repelita I (1969-1974) adalah pendidikan dasar 9 tahun yang semakin meluas dalam waktu 15 tahun, serta perbaikan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan yang semakin terarah demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Muhammad Ali, 2009: 16).

Kebijakan inilah yang tertuang dalam GBHN tahun 1973. Sedangkan pada Repelita II (1974-1979), strategi kebijakan pendidikan nasional meliputi empat butir, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan (Mohammad Yamin, 2009: 99). Konsep

pendidikan nasional ini bertahan cukup lama, bahkan masih diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Selain itu, salah satu kebijakan yang paling populer dalam penyelenggaraan pendidikan pada era Orde Baru adalah upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Menurut A. Daliman (1995), program wajib belajar sebagai upaya untuk menuntaskan pendidikan dasar sebenarnya sudah mulai digagas sejak tahun 1950 meskipun belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pergolakan politik yang terjadi secara terus-menerus (A. Daliman, 1995: 138).

5) Perkembangan Pendidikan Pasca Reformasi 1998 – Sekarang

UUD yang digunakan adalah UUD 1945 yang diamandemen. Ketika Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan Nasional, timbul inisiatif dari DPR lewat komisi VI tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Konsep dari DPR tersebut disandingkan dengan konsep pemerintah yang merujuk kepada naskah akademik yang dirancang oleh Yahya Muhaimin. Naskah yang dirancang Yahya Muhaimin disahkan menjadi UU No. 25 Tahun 2000 berisi tentang Program Pembangunan Nasional (khusus bidang pendidikan).

Inisiatif DPR muncul sejak 27 Mei 2002, tetapi presiden baru pada bulan Februari 2003 mulai menunjuk Mendiknas mewakili pemerintah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama DPR. Pembahasan RUU Sisdiknas ini kembali menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan banyak kelemahan, tetapi juga terbelokkan pada masalah agama, hingga terjadi pengerahan massa. Bagaimanapun, akhirnya RUU Sisdiknas disahkan menjadi UU Sisdiknas dan diratifikasi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Juli 2003 sebagai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara umum, program pembangunan pendidikan atau agenda pendidikan nasional mencakup: (1) Pengelolaan pendidikan (manajemen); (2) Isi pendidikan (substansi) dan (3) Paradigma baru pendidikan. Penuntasan program pemerataan pendidikan melalui (1) Wajib Belajar Dikdas 9 tahun dan (2) Persiapan Wajar 12 tahun. Peningkatan mutu pendidikan melalui (1) Sarana prasarana; (2) Guru; (3) Kurikulum; (4) Akreditasi, evaluasi, supervisi, pengadaan Link & Match antara SMA dan SMK serta efektivitas dan efisiensi (*Good governance*) pendidikan.

A. Evaluasi Pemahaman

1. Jelaskan pengertian analisis kebijakan menurut Dunn!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor”!
3. Sebutkan 4 rumpun bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia pada tingkat SD maupun SMP!
4. Jelaskan masalah pendidikan yang ada di kabupaten/kota Anda dan kebijakan apa yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut!
5. Menurut Anda kebijakan pendidikan yang seperti apa yang tepat diterapkan di Indonesia!

V

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Analisis kebijakan adalah sebuah prosedur berpikir yang dalam kurun waktu yang lama telah dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Lamanya paling tidak sejak manusia sudah mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan kaitannya dengan tindakan.

1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring⁸, analisis dapat diartikan atau didefinisikan, berikut ini:

- (1) Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- (2) Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- (3) Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.
- (4) Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

2. Pengertian Analisis Kebijakan

Berdasarkan beberapa ahli berikut ini, analisis kebijakan didefinisikan sebagai⁹:

- (1) Dunn: mengungkapkkan analisis kebijakan sebagai sebuah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bersangkutan tentang masalah-masalah kemasyarakatan beserta dengan tindakan pemecahannya.
- (2) Patton: analisis kebijakan sebagai suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.

⁸ KBBI daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

⁹ Sumber daring: <http://fadhlillah1.blogspot.com/2015/11/analisis-kebijakan-pendidikan-kejuruan.html>

- (3) Duncan MacRae: analisis kebijakan dilihat sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.
- (4) Stokey dan Zeckhauser: analisis kebijakan adalah suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik rasional.

Melalui pengertian tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian dari analisis kebijakan yaitu, cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap serta untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Sementara, jika kedua pengertian atau definisi dari analisis dan kebijakan pendidikan digabungkan akan dapat ditemukan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan dengan menggunakan pemahaman dari manusia itu sendiri.



Gambar 35: Revitalisasi sebagai hasil analisis kebijakan pendidikan

3. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Berdasarkan Rupert Evans (1971), pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu dan bisa bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.

Undang-Undang No. 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Ditambahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah yang diutamakan adalah pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Oleh karena itu, dari uraian pengertian dan definisi pendidikan kejuruan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan kejuruan diartikan sebagai pendidikan yang berperan dalam mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan pekerjaan dengan satu keahlian khusus.



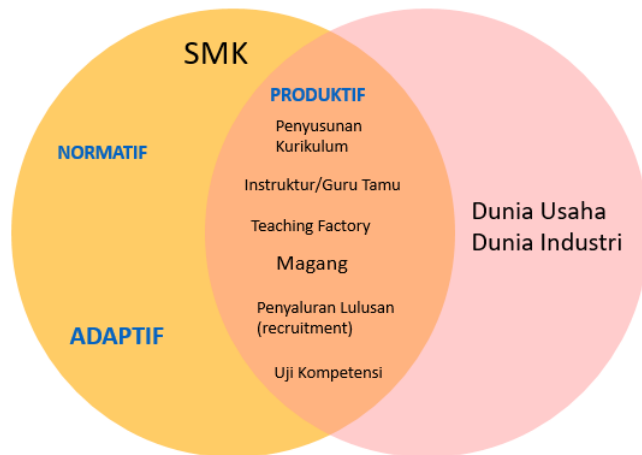
Gambar 36: Contoh keahlian di Sekolah Kejuruan

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kejuruan

1. Tujuan Pendidikan Kejuruan

Tujuan dari pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu yang sesuai dengan minat dan bakat sehingga peserta didik yang bersangkutan mampu bekerja atau memiliki kinerja demi khususnya masa depannya sendiri dan umumnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk meraih tujuan ini yang harus dilakukan adalah membekali peserta didik atau siswa dengan pengetahuan teori dan

keterampilan praktis, serta sikap dan pola tingkah laku sosial. Selain itu, peserta didik perlu juga dibekali dengan wawasan politik tertentu. Semuanya patut diberikan sebagai bekal dan tuntunan yang berharga guna meraih sukses dalam rangka memasuki dunia kerja, baik sebagai pegawai yang bekerja di perusahaan maupun sebagai wirausaha yang mandiri dan untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab (Schippers & Patriana, 1994)



Gambar 37: Gambaran proses belajar di Sekolah Kejuruan

2. Karakteristik Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan tentu saja berbeda dengan pendidikan umum jika ditinjau dari kriteria pendidikannya, substansi pelajarannya, dan lulusannya. Kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh pendidikan kejuruan, antara lain:

- (1) Orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja.
- (2) Justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan.
- (3) Fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif.
- (4) Tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah.
- (5) Kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja.
- (6) Memerlukan sarana prasarana yang memadai.
- (7) Adanya dukungan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kejuruan

- (1) Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja.
- (2) Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja
- (3) Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri
- (4) Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi
- (5) Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya
- (6) Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya
- (7) Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan
- (8) Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut
- (9) Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja)
- (10) Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai)
- (11) Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut
- (12) Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya
- (13) Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang

- memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan
- (14) Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut
 - (15) Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar
 - (16) Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi
4. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Kejuruan

Berdasarkan Keputusan Mendiknas RI Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2000-2004 mengenai pendidikan kejuruan dalam upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan dapat diraih dengan melakukan di antaranya:

- (1) Reformasi kurikulum kejuruan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (2) Analisis dan pengkajian potensi wilayah sehingga dapat menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja tamatan sekolah kejuruan menurut sektor ekonomi jenis okupasi atau status pekerjaan.
- (3) Penelitian dan kajian dengan intensif dan menyeluruh terhadap efektivitas sekolah kejuruan yang terutama berkaitan dengan tuntutan lapangan kerja akan keterampilan dan keahlian lulusannya serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah.
- (4) Penataan kembali bidang keahlian di sekolah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan melalui pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah dengan masih mengikuti standar kompetensi yang ditentukan secara nasional dan bertahap mulai memperhitungkan standar kompetensi regional dan internasional.



Gambar 38: Contoh upaya reformasi dan penyelarasan kurikulum

C. Model Kemitraan di Bidang Pendidikan Kejuruan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK merupakan hal yang penting di era globalisasi dan informasi sekarang ini. SDM yang mempunyai kemampuan dalam IPTEK lebih diutamakan sehingga dapat bersaing dalam dunia global. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera disikapi dengan program yang berorientasi pada percepatan peningkatan mutu pendidikan atau kualitas SDM Indonesia dengan salah satunya adalah melalui program kemitraan antara pemerintah daerah, dunia pendidikan (SMK) dan dunia usaha atau industri demi terbentuknya atau terlaksananya link and match (keterkaitan dan kesepadanan) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sebagai upaya nyata untuk mewujudkan dan membangun suasana sinergis dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam era globalisasi sekarang ini.



Gambar 39: Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Link and match ini berdasarkan para ahli dapat diuraikan seperti berikut ini:

- (1) Djojonegoro: kebijakan link and match membuka dan mendorong kemitraan atau kerjasama antara pendidikan kejuruan dengan dunia usaha/industri yang pada dasarnya mendekatkan supply-demand atau antara pasokan alumni dengan kebutuhan tenaga terampil.
- (2) Savas: perusahaan swasta semakin berperan penting dalam mengelola berbagai layanan melalui kontrak dan konsesi atau kelonggaran yang membuat rencana-operasi-transfer, kerja sama patungan atau joint venture antara publik dan swasta, kerja sama informal dengan pemerintah.
- (3) Abdul Wahab: negara kini harus rela berbagi peran, berbagi kekuasaan atau power sharing dan bekerja sama yang saling menguntungkan dengan kekuatan-kekuatan sosial otonomi dalam masyarakat.
- (4) Tjokroamidjojo: melalui teori “good governance” yang banyak dikembangkan oleh lembaga donor internasional terhadap model umum partnership yang kerap dinyatakan sebagai model segitiga antara tiga sektor yaitu publik, swasta, dan masyarakat umum.

D. Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di SMK

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah Pendidikan Sistem Ganda atau dual system. Melalui sistem ini diusahakan untuk mengintegrasikan kepentingan dunia pendidikan

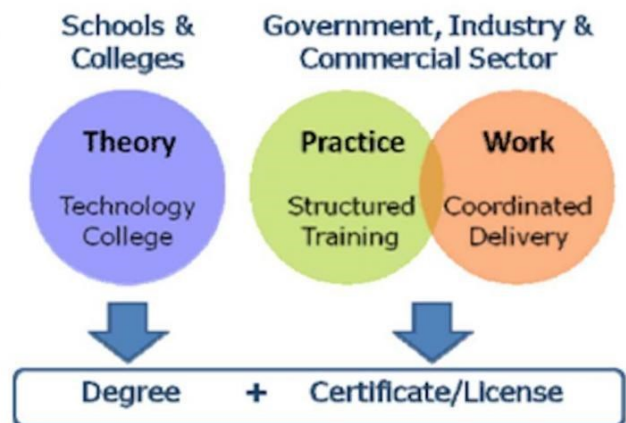
dengan dunia industri. Sistem ganda ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), antara pengetahuan, keterampilan maupun etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lapangan kerja sehingga lulusannya nanti siap untuk masuk ke pasaran kerja atau lapangan pekerjaan. Dengan menerapkan sistem ganda ini, ada kesesuaian antara mutu dan kemampuan yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja.

Implementasi kebijakan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah diselenggarakannya Pendidikan Sistem Ganda ini. Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda ini bentuknya menekankan pada pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program keahlian yang diperoleh langsung di perusahaan.

1. Formulasi

Acuan dari Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Sekolah Menengah Kejuruan adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan pendidikan sistem ganda ini dikembangkan berdasarkan konsep dual system yang dijalankan di Negara Jerman. Kebijakan *dual system* ini adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dengan tujuan untuk mencapai tingkat keahlian profesional tertentu.

Depdikbud (1997) telah menjadikan Pendidikan Sistem Ganda untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pelatihan bagi siswa SMK yang sedang melakukan praktek kerja industri, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun di dunia usaha atau dunia industri. Menurut Depdikbud (1997), Pendidikan Sistem Ganda ini pada dasarnya adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.



Gambar 40; Pendidikan Sistem Ganda

2. Implementasi

Pada dasarnya Program Pendidikan Sistem Ganda atau PSG ini merupakan program pendidikan yang dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah yang khususnya untuk penguasaan teori dan di tempat-tempat usaha terutama sebagai institusi pasangan untuk keperluan siswa melakukan kerja praktek. Peserta didik akan mendapatkan penilaian dari dua tempat di mana ia bersekolah dan juga dari tempat institusi pasangan yang ia gunakan untuk kerja praktek. Nilai diberikan oleh guru tempat ia bersekolah dan juga dari instruktur yang mengajar praktek di tempat praktek kerja industri.

Di dalam program Pendidikan Sistem Ganda atau PSG ini yang diajarkan meliputi teori kejuruan, praktek dasar, dan praktek kerja industri. Sekolah akan mengajarkan tentang teori kejuruan dan praktik dasar. Sementara, untuk praktek kerja dapat dilakukan di institusi pasangannya. Waktu pelaksanaannya diatur bahwa selama tiga tahun pertama peserta didik wajib memperoleh pendidikan di sekolah dan baru pada tahun keempat peserta didik memperoleh pendidikan dan latihan atau praktek di institusi pasangannya.



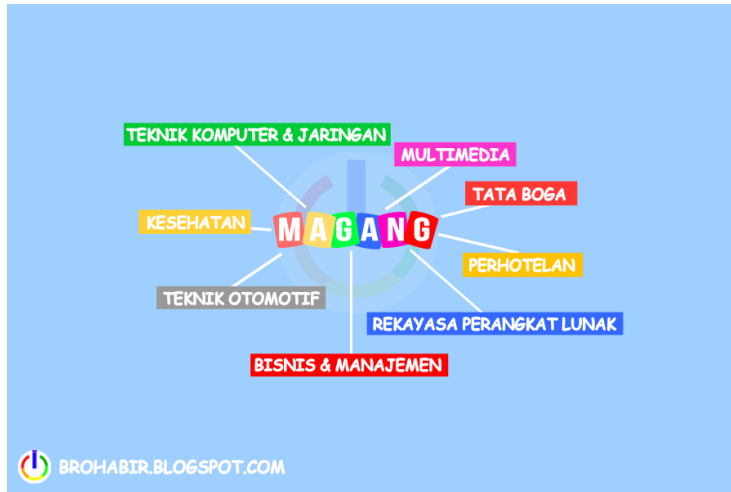
Gambar 41: Skema pelaksanaan dual system di Sekolah Kejuruan

E. Kebijakan Pendidikan Model Sekolah

Berbeda dengan Pendidikan Sistem Ganda, sistem pendidikan model sekolah melaksanakan pembelajaran sepenuhnya di sekolah. Model ini mengasumsikan bahwa segala hal yang terjadi di tempat kerja pun dapat diajarkan di sekolah dan semua sumber belajar sudah dapat ditemukan di sekolah. Model ini banyak diadopsi dan ditemukan dijalankan di Indonesia sebelum Repelita IV.

F. Kebijakan Pendidikan Model Magang

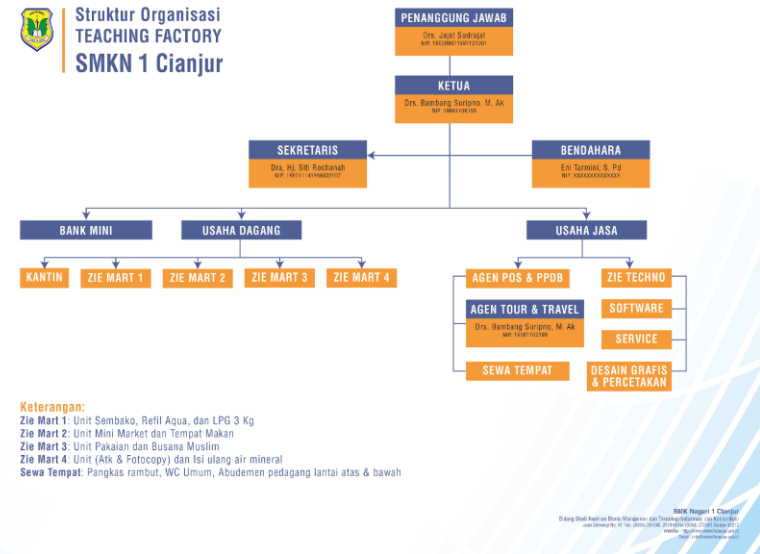
Hampir mirip dengan Pendidikan Sistem Ganda, pada model magang pembelajaran dasar-dasar kejuruan juga dilaksanakan di sekolah dan inti jurusannya diajarkan di industri melalui sistem magang. Murid atau peserta didik dapat mencari sendiri perusahaan di mana ia ingin magang, tidak ada institusi tertentu yang berpasangan dengan sekolah. Model seperti ini banyak diadopsi di Amerika Serikat.



Gambar 42; Magang berbagai jenis kejuruan

G. Kebijakan Pendidikan Model School-based Enterprise

Pendidikan model school-based enterprise ini dikenal di Indonesia dengan nama unit produksi. Pada dasarnya model ini mengembangkan dunia usaha di sekolah menengah kejuruan tertentu dengan maksud selain bertujuan untuk menambah penghasilan sekolah juga untuk memberikan pengalaman kerja yang sungguh-sungguh nyata pada para peserta didik atau siswanya. Model ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada industri.



Gambar 43: Contoh kebijakan unit produksi di SMKN 1 Cianjur

H. Evaluasi Pemahaman

1. Analisis kebijakan adalah sebuah prosedur berpikir yang dalam kurun waktu yang lama telah dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Jelaskan definisi analisis kebijakan!
2. Pendidikan kejuruan dikhususkan bagi peserta didik yang ingin menguasai satu jenis ilmu kejuruan. Terangkan apa pengertian dari pendidikan kejuruan dengan bahasa saudara sendiri!
3. Ada banyak hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan kejuruan. Di dalamnya terdapat tujuan, karakteristik, prinsip, dan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Jabarkan menggunakan bahasa anda sendiri mengenai keempatnya!
4. Terdapat program yang berorientasi pada percepatan peningkatan mutu pendidikan atau kualitas SDM Indonesia dengan salah satunya adalah melalui program kemitraan antara pemerintah daerah, dunia pendidikan (SMK) dan dunia usaha atau industri demi terbentuknya atau terlaksananya *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan). Bagaimanakah berdasarkan pemahaman saudara mengenai *link and match* ini?
5. Ada banyak model kebijakan pendidikan di sekolah kejuruan. Sebutkan beberapa, jabarkan, dan berikan contoh nyata yang ada di dalam masyarakat!

VI

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI

A. *Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Tinggi*

Tujuan dari adanya program pembangunan pendidikan tinggi adalah antara lain untuk:

- 1) meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;
- 2) meningkatkan mutu relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja serta pengembangan IPTEK untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- 3) meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT).

Adapun penjelasan lebih lanjut perihal tujuan dari program pembangunan pendidikan tinggi yang telah disampaikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses
Program pemerataan dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:
 - a. Pemberian bantuan pembiayaan untuk kelompok masyarakat miskin tetapi potensial agar dapat belajar di perguruan tinggi.
 - b. Membangun kemitraan antara LPTK dengan sekolah, untuk memperluas kapasitas dalam menghasilkan guru yang dapat mencukupi.
 - c. Pengembangan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) di perguruan tinggi, dengan proyek percontohan pada empat perguruan tinggi hingga tahun 2009, yaitu UI, UNRI, UNDANA,

UNHAS. Diseminasi proyek ini akan dikembangkan pada UNLAM, UNM, UNHALU, UNCEN.

- d. Pemerataan perluasan akses pendidikan tinggi mentargetkan pencapaian jumlah mahasiswa sebesar 4,5 juta tahun 2009, APK diharapkan dapat ditingkatkan dari 14.62% pada tahun 2004 menjadi 18,00% pada tahun 2009 (Diknas, 2006).

2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada tingkat pendidikan tinggi ini direalisasikan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai tri dharma perguruan tinggi.
- b. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran efektif dalam kelompok mata kuliah, iman, dan takwa serta akhlak mulia, IPTEK, estetika, serta kepribadian.
- c. Pengembangan community college, model pendidikan kejuruan/vokasi yang fleksibel. Penyediaan tenaga terampil untuk kebutuhan industri lokal, nasional dan multinasional, serta pengembangan kewirausahaan.
- d. Target-target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:
- Peningkatan jumlah program studi di perguruan tinggi yang diakreditasi A dan B dari 1000 program studi pada tahun 2005 menjadi 3000 program studi pada tahun 2009. Selain itu, juga akan dikembangkan program studi yang bertaraf internasional.
 - Peningkatan efektifitas waktu studi sehingga kelulusan tepat waktu.
 - Mengupayakan untuk mencapai rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa (enrollment) secara keseluruhan menjadi 20%.
 - Lama waktu menunggu setelah lulus pada keahlian tertentu dapat dipersingkat 6 bulan, mencapai 40%.
 - Peningkatan kualitas daya saing di tingkat Asia, 4 perguruan tinggi masuk 100 besar dan 500 besar perguruan tinggi dunia.
 - Peningkatan status perguruan tinggi negeri menjadi 50% yang berbadan hukum tahun 2009, dan 40% perguruan tinggi swasta.

- Penataan proporsi bidang ilmu IPA : IPS/Humaniora yang pada tahun 2004 berbanding sebagai 30 : 70, diupayakan untuk tahun 2009 menjadi 50 : 50 untuk PTN dan 35 : 65 untuk PTS.
- Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S2/S3 yang baru mencapai 54,55% untuk PTN dan 34,50% untuk PTS pada tahun 2004, menjadi 85% untuk PTN dan 55% untuk PTS pada tahun 2009. Disamping itu, jumlah guru besar yang baru mencapai 3% pada tahun 2004, diupayakan dapat mencapai 10% dari jumlah dosen yang ada pada PTN pada tahun 2009.
- Pelatihan tenaga teknis di perguruan tinggi pada jangka waktu 5 tahun ke depan diupayakan mencapai 100 jenis pelatihan fungsional yang menjangkau 7.500 personal pendidikan tinggi dengan rincian 70% dari PTN dan 30% dari PTS.
- Pelaksanaan penelitian untuk 5 tahun ke depan mencapai 10% dari seluruh anggaran Ditjen Dikti.
- ICT literacy (kemampuan akses, memanfaatkan dan menggunakan radio, televisi, komputer dan internet) 80% untuk kalangan mahasiswa dan dosen.
- Pembangunan dan pembaharuan infrastruktur pendidikan tinggi sehingga tercapai pemenuhan kriteria rasio ruang kuliah 2m² per mahasiswa, rasio ruang laboratorium 9 m² per mahasiswa, ruang dosen 9 m² per dosen.
- Peningkatan kapasitas dan efektivitas layanan perpustakaan mencapai 80% dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi dan layanan perpustakaan mencapai 40 jam per minggu. (Diknas: 2006).

3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik

Program peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik akan dilaksanakan melalui penyusunan perangkat hukum operasional dalam pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai status BHPT, sebagai perguruan tinggi otonom dan akuntabel, serta bersifat *nirlaba*. Ditargetkan sebanyak 50% PTN dan 40% PTS akan berstatus BHPT pada tahun 2009. Penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu mengembangkan vitalisasi internal audit.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dengan model BHPT adalah terbangunnya kelembagaan yang lebih kondusif untuk menciptakan keterbukaan pengelolaan, sehingga menjadi lebih

transparan dan akuntabel. Kondisi ini akan mendorong peningkatan partisipasi melalui pembiayaan, kontrol, dan pengelolaan. Peningkatan kapasitas satuan perguruan tinggi dilakukan melalui berbagai program hibah kompetisi, program kemitraan, hibah penelitian, P3AI. Peningkatan kapasitas pengelolaan akan ditunjang dengan penerapan ICT.

Berdasarkan kebijakan pokok pembangunan pendidikan di atas maka dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi kedepan memiliki tantangan yang semakin berat. Terutama dalam peningkatan kualitas serta relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja. Pembangunan bidang pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standarisasi nasional pendidikan memiliki sejumlah indikator yang harus dipenuhi jika tidak ingin perguruan tinggi tersebut itu ditinggalkan. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana, standar pengelolaan, serta standar penilaian pendidikan. Pendidikan tinggi perlu melakukan reformasi manajemen agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain yang lebih maju.

Beberapa contoh analisis kebijakan dalam bidang pendidikan nasional yang telah dirumuskan dalam rencana strategis pembangunan bidang pendidikan nasional tahun 2005-2009 dan tahun 2010-2025. Kebijakan strategis pengembangan bidang pendidikan nasional 2005-2009 dengan tema "*Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi*". Tema ini melahirkan tiga kebijakan utama dalam pengembangan pendidikan nasional yaitu: pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta penguatan pengelolaan, akuntabilitas, dan pencitraan publik (Depdiknas, 2006: 9).

B. Perguruan Tinggi Kelas Dunia

Tantangan PT kita tidak mudah karena masih tertinggal jauh dari PT di Asia apalagi Barat. Mungkin visi semua PT secara eksplisit atau implisit mengarah ke PT kelas dunia. Yang menjadi masalah adalah apa yang dilakukan sering tidak sejalan dengan visi yang telah ditetapkan.

Salah satu kriteria PT kelas dunia adalah riset-riset unggulan. Jika PT kita tidak mampu mencapai kriteria tersebut, maka tak salah dikatakan bahwa kita bukan individu atau komunitas pembelajar. Untuk mewujudkan PT kelas dunia jelas bukan pekerjaan yang mudah, dibutuhkan kerja keras dan waktu yang lama.

Selain mutu penelitian, kriteria PT kelas dunia adalah mutu dosen. Pemerintah sudah membuat standar mutu dosen dan mutu

penelitian (Permendikbud No. 49 tahun 2014) yang kompatibel dengan standar PT kelas dunia.

Kita memang terkenal dengan banyak peraturan namun lemah dalam tindakan nyata. Visi tidak akan bisa dicapai jika kita tidak mengetahui kondisi kita saat ini. Membaca kondisi PT saat ini menyadarkan kita tentang kelemahan yang harus segera ditingkatkan.

Kelemahan umum PT kita adalah kekurangan profesor dan doktor. Minimnya jumlah profesor karena dosen doktor kita tidak memiliki artikel ilmiah yang dimuat di jurnal internasional. Standar hasil penelitian dosen kita tidak sesuai dengan standar penelitian di luar negeri. Sulitnya menembus jurnal internasional karena dosen kita lemah dalam bahasa Inggris.

Survei oleh Scientific American di tahun 1994 menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan Indonesia pada khazanah pengembangan dunia ilmu setiap tahunnya hanyalah sekitar 0,012%, yang jauh berada di bawah Singapura yang berjumlah 0,179%, apalagi kalau dibandingkan dengan USA yang besarnya lebih dari 20%.

Menurut data Bloomberg Rankings, negara yang paling inovatif di dunia pada 2014 adalah Korea Selatan dan Swedia yang ada di urutan satu dan dua. Kemudian, urutan ketiga sampai sepuluh adalah Amerika, Jepang, Jerman, Denmark, Singapura, Swiss, Finlandia, dan Taiwan. Hongkong berada di urutan ke-26 dan Malaysia berada di urutan ke-34. Indonesia tidak masuk ke dalam 50 besar, hanya berada di urutan ke-67 aspek *manufacturing capability*.

Data tersebut tidak menggembirakan. Kunci mutu PT ada pada pimpinan PT. Mereka mestinya langsung bekerja dengan membuat program-program strategis, di antaranya:

a. Pelatihan bahasa asing

Pelatihan intensif bahasa asing di dalam maupun di luar negeri akan membantu dosen untuk mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri, menulis artikel ilmiah dalam bahasa asing, atau beasiswa *postdoctoral*.

Dosen yang kemampuan bahasa asingnya bagus diwajibkan mengajar menggunakan bahasa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, PT di Indonesia harus menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahan, menulis makalah, *website*, dan aspek-aspek lainnya. Sangat aneh, dosen dituntut bisa *go international* tapi tak pandai bahasa asing, baik lisan maupun tulisan. Di pesantren modern saja diwajibkan berbahasa asing dalam percakapan sehari-hari, mengapa di kampus-kampus kita tidak menerapkan sistem yang sama.

b. Beasiswa S-3

Beasiswa S-3 akan mendorong dosen segera kuliah karena ada kepastian biaya. Dosen dengan status *single income* akan merasa berat jika harus kuliah dengan biaya sendiri. Belajar membutuhkan ketenangan dan fokus. Fokus mahasiswa pascasarjana terbelah antara studi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Beasiswa yang memadai bisa membuat dosen fokus belajar, sehingga bisa selesai tepat waktu.

c. Pelatihan menulis karya ilmiah

Tidak semua dosen terampil menulis karya ilmiah. Kendala bahasa, membuat dosen tidak bisa menikmati karya ilmiah di jurnal internasional. Jika banyak dosen mempublikasikan karyanya di jurnal internasional, maka jumlah profesor akan bertambah.

Mungkin diperlukan pembagian dosen yang tugasnya mengajar dan dosen dengan tugas utama meneliti. Dosen pertama memiliki keterampilan mengajar yang disebut sebagai dosen pengajar dan dosen kedua memiliki keterampilan menulis karya ilmiah yang disebut sebagai dosen peneliti.

Tuntutan tugas dosen sebagai pengajar dan peneliti tidak bisa mendorong PT kita menjadi PT kelas dunia. Di luar negeri, dosen bisa menghasilkan karya ilmiah karena mengajarnya sedikit, atau dibebaskan mengajar untuk sementara waktu untuk menulis. Faktanya, tidak semua orang bisa menjadi pengajar yang bagus, sebagaimana tidak semua orang bisa menulis karya ilmiah. Kemudian, PT mewajibkan dosen menulis dan meneliti tanpa memberikan pelatihan khusus dan terstruktur, jelas tidak akan berhasil.

d. Post-doktoral ke luar negeri

Penyegaran sangat penting bagi dosen yang doktor atau profesor. Prioritas program ini adalah dosen lulusan dalam negeri. Tujuannya agar mereka berwawasan internasional. Kerja sama penelitian antara dosen dalam dan luar negeri akan berhasil jika dosen kita menguasai bahasa dan budaya akademik mereka.

Keempat program tersebut sudah ada di Kemenag dan Kemendikbud, namun kuota per tahunnya sangat terbatas. PT harus membuat sendiri program pengembangan dosen melalui dana pemerintah atau dana PT sendiri. Jika dosen dibiarkan bersaing sendiri untuk mendapatkan beasiswa di Kementerian akan dibutuhkan waktu yang lama untuk peningkatan mutu dosen.

e. Pembukaan program magister dan doktor

Jika jumlah dosen bergelar doktor dan profesor sudah memadai, maka pembukaan program S-2 dan S-3 akan berjalan mulus. Ciri PT

kelas dunia adalah program pascasarjanya lebih besar daripada program sarjananya.

f. Menambah jumlah dosen

Jumlah dosen harus mencukupi sehingga proses belajar dan penelitian di PT akan berjalan sesuai yang diharapkan.

Inilah 6 program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan PT. Pengembangan aspek pendidikan lainnya tidak bisa diabaikan, karena semuanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Mutu dosen akan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat.

Dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemauan memajukan lembaga. Pemimpin dituntut berpikir kreatif dan inovatif. Cirinya adalah kerja nyata melalui pengembangan dosen dan penelitian. Jika tidak, maka PT kelas dunia hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah jadi kenyataan.

C. Membuka Prodi, Menutup Mutu

Program studi baru tumbuh seperti jamur di musim hujan. Banyaknya jumlah prodi baru tidak berarti bahwa pendidikan tinggi kita semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, langkah prodi terseok-seok bahkan jatuh bangun karena beban kerja tidak sesuai dengan dosen, staf, dan fasilitas yang dimiliki.

Berdasarkan data Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam kurun waktu 2008-2014 ada 8.689 usulan prodi baru dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya, rata-rata ada sekitar 1.200 usulan prodi per tahun. Dari total usulan itu, hanya 3.932 yang direkomendasikan untuk mendapat izin dan menerima mahasiswa.

Hal ini sangat beralasan karena yang terjadi di lapangan sangat memprihatinkan.

1) Legalitas formal

Prodi sudah menerima mahasiswa dan menjalankan pembelajaran, padahal izin operasional belum turun. Akibatnya, jika izin tak kunjung turun padahal mahasiswa sudah mau selesai, prodi memindahkan status mahasiswa ke prodi sejenis di PT lain yang sudah punya izin dan/atau akreditasi. Kuliahnya di PT X, tapi skripsi dan ijazahnya di PT Y.

2) Tata kelola yang baik

Pembukaan prodi tidak didahului dengan penyiapan dosen, fasilitas, struktur organisasi, dan sistem yang baik. Dosen yang dimiliki prodi bukan dosen tetap melainkan dosen tetap di prodi PT lain, yang

bisa jadi hanya dimanfaatkan namanya. Dosen pun belum tentu pendidikannya sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

Kelas perkuliahan tidak dibuat nyaman untuk belajar. Ruang dan koleksi buku perpustakaan tidak memadai. Akibatnya, iklim dan budaya akademik tidak terbentuk. Ketua prodi juga bukan dosen yang berlatar belakang pendidikan sesuai prodi. Maka, pengembangan keilmuan konsorsium prodi tidak berjalan mulus.

3) Standar proses dan lulusan

Dari penjelasan sebelumnya, maka rasio dosen dengan mahasiswa tidak seimbang. Penambahan jumlah mahasiswa tidak dibarengi dengan penambahan dosen. Mahasiswa banyak karena tidak selektif. Kualitas pembelajaran dan bimbingan akademik tidak efektif, sehingga lulusan tidak standar dan sulit bekerja. Muncullah istilah prodi atau PT *abal-abal*, artinya prodi yang proses pembelajaran, fasilitas, dan dosennya tidak berkualitas atau tidak sesuai standar nasional pendidikan.

Praktik ini terjadi karena pergeseran orientasi lembaga pendidikan, dari lembaga non profit ke profit yang hanya mengejar kuantitas merupakan kualitas. Membuka prodi seperti membuka toko atau warung. Logikanya untung rugi atau efisiensi, padahal pendidikan adalah investasi bangsa lima hingga sepuluh tahun ke depan agar memiliki generasi yang cerdas dan berperan bagi kemajuan bangsa.

Makna pendidikan ini tidak bisa dicapai dengan model pendidikan yang *money oriented* dan mengabaikan mutu. Artinya, jangan karena ingin punya saldo rekening tabungan banyak, PT mengurangi standar layanan pendidikan. Sebaliknya, PT mengerahkan kemampuannya untuk membangun fasilitas, sistem, dan sumber daya manusianya yang unggul agar lulusannya mampu “membaca dunia dan dibaca dunia”.

Banyaknya jumlah prodi baru yang tidak diikuti dengan mutu akan menimbulkan pengangguran terdidik dan merugikan mahasiswa. Peluang kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Diantara tujuan pembukaan prodi adalah pengembangan keilmuan, bukan sekadar ijazah.

Untuk menyelesaikan masalah di atas tentu tidaklah mudah. Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab PT, tetapi juga pemerintah. Maka, pemerintah melalui lembaga terkait, perlu melakukan beberapa langkah, di antaranya:

1. Tidak mudah memberikan izin operasional prodi baru

Penilaian kelayakan suatu prodi harus objektif berdasarkan dokumen proposal dan observasi langsung. Ini berlaku untuk semua

prodi, baik yang ada di PT negeri maupun PT swasta. Jika ditemukan praktik melanggar aturan pelaksanaan pendidikan tinggi, segera menutup prodi tersebut.

2. Bantuan pengembangan prodi

Bantuan yang mencakup pengembangan fasilitas, dana penelitian, juga pengangkatan dosen PNS. Tidak hanya PT swasta yang mahasiswanya mayoritas kelas menengah ke bawah, PT negeri pun memerlukan pengembangan. Akibatnya, prodi bertambah banyak, tetapi kondisi bangunan dan dosen tidak mengalami perubahan, sehingga lingkungan kampus semakin tidak nyaman.

Artinya, pertambahan prodi dan mahasiswa harus diikuti dengan pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia. Jika tidak, maka pendidikan tinggi kita hanya berkembang aspek kuantitasnya saja, sedangkan kualitasnya tidak. Hal ini sama dengan kita ramai-ramai membuka prodi baru, tetapi menutup rapat-rapat desain mutunya. Bukan karena kita tidak paham tentang mutu, tetapi budaya mutu pendidikan kita masih sebatas manis di mulut dan hiasan dinding.

D. Kurikulum KKNI

Meski sudah ditetapkan sejak lama, tidak banyak PT yang kurikulumnya berbasis KKNI. Perguruan tinggi, khususnya prodi, dituntut merevisi kurikulumnya berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang terbit berdasarkan Peraturan Presiden No 8/2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73/2013 tentang Penerapan KKNI.

Berdasarkan PP di atas, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.

Menyusun kurikulum berbasis KKNI disadari bukan pekerjaan mudah bagi *civitas academica* kampus. Dibutuhkan pemahaman dan komitmen dosen. Di sini peran dan dukungan ketua prodi, dekan, dan rektor sangat penting.

Berikut ini adalah beberapa catatan terkait penyusunan KKNI:

1. Profil lulusan prodi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. *Tracer study* merupakan cara untuk memperoleh data profil dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Masalahnya, meski prodi tahu kompetensi apa saja yang dibutuhkan lulusan, tidak segera diikuti oleh perubahan kurikulum. *Tracer study* sekadar untuk kelengkapan borang akreditasi.

Perubahan kurikulum tidak sebatas mengubah dokumen tertulis, tetapi juga perubahan paradigma dosen, budaya akademik, dan fasilitas kampus yang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di kampus. Selain itu, sinergi dan komunikasi antar-unit di level fakultas dan universitas harus terjalin baik, sehingga pembelajaran dan program prodi, fakultas, dan universitas berjalan baik pula.

Karena setiap kampus, daerah, dan masyarakat pengguna itu unik dan beragam, maka perlu distingsi lulusan prodi yang sama di kampus yang berbeda. Di luar faktor keragaman tadi misalnya, apa bedanya lulusan Prodi Manajemen Pendidikan di bawah Kemenristek Dikti dengan lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam di bawah Kemenag?

Mengenai pengakuan pengguna terhadap kompetensi lulusan, jangkauan bisa diakui dunia atau level Asia, di dalam negeri saja alumni kita sering tidak diakui. Guru di sekolah kelas menengah atas dituntut menguasai bahasa asing, apakah ada LPTK di Indonesia yang alumninya dijamin mampu berbahasa asing? Jika ada, berapa jumlahnya?

2. Perubahan kurikulum bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti: jumlah mata kuliah (MK) dikurangi, nama MK diganti, dan SKS MK ditambah atau dikurangi. Meski sudah dikurangi dan rata-rata 3 sks per-MK, jumlah MK di program S-1 masih banyak. Penyebabnya, satu dosen satu MK atau lebih, bukan *team teaching* seperti S-2 atau S-3. Ada kekhawatiran dosen tidak mendapat jam mengajar. Selain itu, ada MK titipan dari pusat (penciri nasional) seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, juga beberapa MK penciri universitas.

Perluah Pancasila, PKn, dan Akhlak dijadikan MK? Mengajarkan materi nilai, baik-buruk, boleh-tidak boleh, tidak akan berhasil jika budaya di kampus, sekolah, masyarakat, dan rumah, belum baik. Nilai-nilai karakter harus bisa dilihat dan dirasakan oleh pelajar dimanapun mereka berada, sehingga mereka meniru dan menjadi pelaku nilai tersebut. Kegagalan Indonesia dalam pembentukan karakter anak bangsa adalah karena tidak padunya antara yang diajarkan dan tertulis dalam buku-buku teks dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakatnya.

MK Bahasa Inggris dan Bahasa Arab diajarkan di setiap prodi dengan sedikit sks, sehingga tidak akan menjamin kemahiran

bahasa mahasiswa. Karena itu, pengembangan keterampilan bahasa asing mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan MK, tapi integratif dalam proses pembelajaran di kelas dan penciptaan budaya akademik di lingkungan kampus.

Dosen mengajar dengan bilingual, makalah dan referensinya wajib berbahasa asing, *Arabic or English Days*, pengumuman, pedoman akademik, dan lainnya disediakan dalam bahasa asing. Kemampuan Bahasa Inggris adalah tuntutan pengguna lulusan sejak lama sekali, tapi diabaikan oleh banyak kampus negeri maupun swasta.

Sumber dan bahan ajar terbaru penting dalam penyusunan silabus. Meski perubahan kurikulum dilakukan lima tahun sekali, bahan ajar dan sumber serta media bisa diperbarui setiap semester, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Faktor penghambat inovasi dan kreativitas pembelajaran di kampus adalah rendahnya komitmen dan rasa ingin tahu para dosen. Upaya pimpinan kampus sering sia-sia, misalnya, berapa persen dosen yang mengikuti seminar, studium generale, *workshop*, dan menulis naskah prosiding?

Workshop KKNi tidak berbeda dengan seminar karena setelahnya tidak menghasilkan silabus baru. Kecuali jumlah peserta sedikit, dosen yang hadir pun tak serius mengikuti *workshop* hingga akhir. Mungkin, *workshop* perlu disiapkan secara matang dan dilaksanakan jauh dari kampus. Dosen dikarantina untuk menyusun silabus secara mandiri dan/atau kelompok, memaparkannya di hadapan dosen lain, sehingga tidak ada kajian yang sama dari MK yang berbeda, merumuskan capaian program, capaian pembelajaran, dan matriks capaian pembelajaran.

3. Pembelajaran yang menantang kreativitas dan inovasi, serta mendorong mahasiswa untuk berpendapat. Mahasiswa tidak terbiasa mengutarakan idenya di depan kelas, karena tidak dilatih sejak SD hingga SMA. Sulit menemukan makalah yang berisi ide-ide mahasiswa sebagai hasil analisis, melainkan hanya kutipan-kutipan, karena tidak dilatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendidik masih dominan di kelas, sementara pelajar pasif, baik raga maupun pikirannya.

Akhirnya, meski berulang kali melaksanakan *workshop*, belum tentu dosen memahami KKNi, apalagi yang tidak pernah sama sekali. Tidak akan pernah mudah melakukan perubahan, termasuk melahirkan Kurikulum KKNi di kampus. Memiliki

Kurikulum KKNI yang ideal tak ubahnya melewati jalan terjal berbatu. Diperlukan pemimpin yang visioner untuk menarik gerbong dosen yang punya kompetensi dan watak beragam menuju puncak harapan, agar uang tak terbuang sia-sia.

Tantangannya ada di internal kampus sendiri. Sebagian dosen tidak tertarik pada hal-hal baru, maka diperlukan kebijakan yang membuat dosen tidak bisa tidak harus memahami KKNI. Dosen yang sudah tahu pun belum tentu melakukan perbaikan. Kenapa? Karena sistemnya memungkinkan dosen untuk tidak melakukan. Budaya kerja kita adalah sistem kebut semalam (SKS). Ketika menyusun borang akreditasi atau visitasi akreditasi misalnya, kita baru sibuk menghubungi dan mengumpulkan dosen. Sistem dokumentasi kampus kita lemah, maka perlu segera dibenahi.

E. Pengaturan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Bangsa Indonesia terus-menerus melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pendidikannya. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang memasukkan ketentuan tentang pendidikan dalam UUD.

Pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi pencetak sumber daya manusia yang profesional, berdaya guna, dan bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri.

Pembaharuan sistem pendidikan tinggi sangatlah penting dilakukan, mengingat berbagai tantangan luar biasa baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus diubah secara total mengikuti perkembangan yang ada, di antaranya:

- a) Perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang mengikuti arus globalisasi
- b) Penyediaan pendidikan tinggi yang fleksibel, berkualitas, berorientasi pada mahasiswa, mengikuti pangsa pasar, mengikuti perkembangan IPTEK, mencetak lulusan yang berdaya saing, melakukan riset dan menghasilkan inovasi
- c) Perubahan kurikulum pendidikan tinggi
- d) Penyediaan tenaga pengajar, yaitu dosen, guru besar, dan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional.

Untuk mewujudkannya, maka dalam pendidikan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta mengembangkan kurikulum berdasarkan KKNI. Kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur.

Dengan adanya KKNI, bertujuan untuk melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tetapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan.

Kurikulum perguruan tinggi memang seharusnya dilakukan perubahan, saat ini KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

1. Pembaharuan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia

Kebijakan pendidikan tinggi yang selalu berganti dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang dapat bersaing, seperti halnya hasilnya belum tampak memuaskan.

Ijazah pendidikan tinggi saat ini tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dikarenakan daya saing di dunia kerja dengan para pekerja asing sebagai dampak adanya globalisasi. Ditambah lagi, dengan tidak dimilikinya keahlian dalam bekerja, sehingga lebih mempersulit lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, terdapat ketimpangan antara profil lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia belum siap pakai, selama ini perguruan tinggi hanya mengajarkan mengenai ilmu logika atau teori-teori, tanpa adanya pengembangan kemampuan mahasiswa.

Di samping itu, alasan diperlukannya pembaharuan kebijakan pendidikan tinggi adalah semakin banyaknya konvensi internasional yang diratifikasi oleh negara Indonesia, sehingga negara Indonesia harus menyesuaikan dan melaksanakan isi konvensi tersebut. Salah satunya adalah konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan hasil studi Willis Towers Watson yang meneliti tentang praktik terbaik manajemen bakat dan program penghargaan karyawan pada tahun 2014 bahwa 8 dari 10 perusahaan di Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi yang siap pakai. Untuk mengatasi masalah ini, tokoh pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Arief

Rachman mengatakan bahwa kita perlu memiliki konsep pendidikan tinggi yang modern untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan memiliki keahlian yang mumpuni.

Adanya perubahan kurikulum dengan KKNi sebagai acuan pokok, maka diharapkan lulusan perguruan tinggi di Indonesia setara dan diakui kualifikasinya dengan sumber daya manusia dari luar negeri, sehingga sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan sumber daya manusia luar negeri.

2. Model pembaharuan sistem kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik (mahasiswa), maka dapat dilakukan tidak hanya melalui pendidikan formal, akan tetapi perlu pula perguruan tinggi bekerjasama dengan instansi terkait agar mahasiswa dapat melakukan kuliah kerja, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar memperoleh pengalaman kerja, melakukan praktik profesi, maupun belajar secara mandiri, sehingga nantinya dapat dideskripsikan capaian pembelajaran dari ukuran kemampuan mahasiswa dengan KKNi sebagai acuan dengan melihat penguasaan ilmu pengetahuan, sikap, kemampuan kerja, serta tanggung jawab dari mahasiswa.

Komisi Internasional UNESCO, memasuki abad ke-21 merekomendasikan 4 pilar belajar, yaitu:

a. Learning to know

Suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan cara untuk memperoleh pengetahuan.

b. Learning to do

Suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didiknya untuk sampai pada tingkatan penggunaan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret.

c. Learning to live together

Suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didiknya untuk menumbuhkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka.

d. Learning to be

Apabila ketiga pilar sebelumnya berhasil dengan memuaskan akan muncul adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik yang hasil akhirnya adalah manusia yang mampu mengenal dirinya.

Manusia yang utuh yang memiliki kemantapan emosional dan intelektual, mengenal dirinya, mampu mengendalikan dirinya, konsisten dan memiliki rasa empati. Inilah makna *learning to be* yaitu muara akhir dari tiga pilar belajar.

Dengan kebijakan pendidikan tinggi yang baru, diharapkan nantinya perguruan tinggi di Indonesia dapat melakukan suatu inovasi atau terobosan baru agar lulusannya memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, semangat untuk berwiraswasta perlu ditumbuhkembangkan, sehingga lulusan perguruan tinggi tak hanya mampu sebagai tenaga kerja yang memiliki skill dan profesional, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Agar dapat menetapkan kebijakan pendidikan tinggi yang baik, maka pemerintah dan perguruan tinggi dapat mengikutsertakan pihak swasta untuk menyusun kurikulum yang tepat bagi perguruan tinggi. Pihak swasta dapat memberikan masukan dan apa yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, karena pihak swasta memiliki pengalaman di lapangan.

Tidak kalah penting dari adanya peningkatan kemampuan lulusan pendidikan tinggi adalah karakter manusia Indonesia. Hal ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang memiliki etos kerja tinggi, kedisiplinan, moral, tanggung jawab, rasa hormat akan tegaknya hukum, kemampuan dalam menguasai dan menerapkan IPTEK, sikap demokratis, dan daya saing global.

F. Evaluasi Pemahaman

1. Sebutkan tujuan program pembangunan pendidikan tinggi!
2. Jelaskan tujuan program pembangunan pendidikan tinggi tentang pemerataan dan perluasan akses!
3. Jelaskan salah satu program strategis yang bisa mengantarkan pendidikan tinggi kita menjadi kelas dunia!
4. Bagaimana seharusnya cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah tentang banyaknya pembukaan prodi yang justru menurunkan mutu pendidikan tinggi?
5. Sebutkan dan jelaskan 4 pilar belajar yang direkomendasikan Komisi Internasional UNESCO dalam memasuki abad ke-21!

VII

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negara. Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan di sekolah cenderung disebut sebagai pendidikan formal, pendidikan di keluarga sering disebut pendidikan informal, dan pendidikan di tengah masyarakat sering disebut sebagai pendidikan nonformal

Pendidikan informal sendiri dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri di lingkungan keluarga. Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang dalam sisdiknas disebut dengan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan Luar Sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem sekolah yang sudah ada. Dalam Pendidikan Luar Sekolah terdapat hal-hal yang sama pentingnya bila dibandingkan dengan Pendidikan di Sekolah, seperti: bentuk pendidikan, tujuannya, sasarannya, pelaksanaannya dan sebagainya.

Alasan terselenggaranya Pendidikan Luar Sekolah dari segi kesejarahan, tidak bisa lepas dari lima aspek yaitu:

- Aspek pelestarian budaya

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga dimana (melalui berbagai perintah, tindakan dan perkataan) ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga.

- Aspek teoritis

Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan PLS adalah teori yang diketengahkan Philip H. Coombs (1973:10), tidak satupun lembaga pendidikan: formal, informal maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial.

- Dasar pijakan

Ada tiga dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu: UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 dan peraturan pemerintah RI No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.

- Aspek kebutuhan terhadap pendidikan

Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas.

- Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah

Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya.

Sebagaimana suatu sub-sistem dalam dunia pendidikan, maka Pendidikan Luar Sekolah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan pendidikan sekolah. Namun kedua sub-sistem pendidikan tersebut yakni pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah saling menunjang dan melengkapi satu sama lain.

B. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah

Berikut beberapa pengertian Pendidikan Luar Sekolah menurut:

a. Komunikasi Pembaruan Nasional Pendidikan

Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan

efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

b. Phillips H. Combs

Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.

c. Peraturan Pemerintah RI nomor 73 tahun 1991

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.

Pendidikan luar sekolah bertujuan untuk:

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

C. Jenis-jenis Pendidikan Luar Sekolah

Adapun jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.

- 1) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga belajar dalam bidang tertentu.
- 2) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- 3) Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.
- 4) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- 5) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu

Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya.

Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan luar sekolah mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana (1989:107) mengemukakan peran pendidikan luar sekolah adalah sebagai "*pelengkap, penambah, dan pengganti*".

D. Peranan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai pelengkap pendidikan sekolah

Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan peserta didik. program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Programnya bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olah raga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi dan kelompok pencinta alam.

Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program PLS pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

Sebagai penambah pendidikan sekolah

Pendidikan luar sekolah sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:

1. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah.

Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menggunakan ruang kelas di sekolah yang bersangkutan atau di tempat lain. Materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Para pendidik pada umumnya adalah

guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan sangkutan atau sumber belajar lain yang ada di masyarakat.

2. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh.

Kebutuhan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu:

- a. Memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kebutuhan ini biasanya dilakukan melalui bimbingan studi, bimbingan tes, kursus-kursus dan kelompok belajar;
 - b. Menambah pengetahuan tentang materi belajar yang dirasakan penting sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Kebutuhan ini dilakukan melalui kursus-kursus, diskusi, seminar lokakarya, penelitian dan studi kepustakaan.
3. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Upaya ini dikaitkan dengan keterampilan kerja dan berusaha.

Pendidikan luar sekolah sebagai penambah ini diarahkan untuk membekali para lulusan dan mereka yang putus sekolah untuk memasuki dunia kerja.

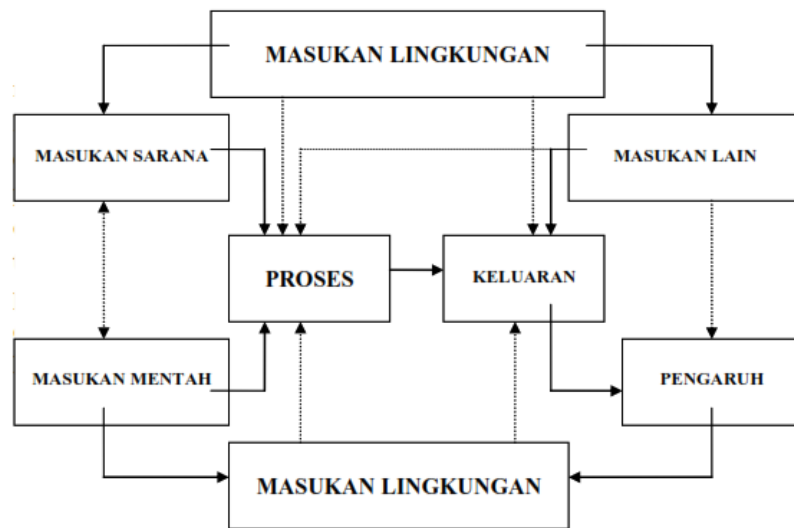
Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan luar sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah, umumnya sekolah dasar. Program pendidikan ini sering diselenggarakan di daerah-daerah terpencil atau daerah yang disebut kantong terasing yang belum memiliki sekolah dasar.

Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya. Kegiatan ini sanya dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan sosial yang mempunyai tugas pelayanan pada masyarakat.

E. Komponen-komponen dalam Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung antara yang satu yang lainnya. Sudjana (1989: 50) menggambarkan hubungan fungsional antara komponen-komponen tersebut.



Gambar 44: Komponen-komponen pendidikan luar sekolah

Masukan sarana, (*instrumental input*) meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan atau kelompok melakukan kegiatan belajar. Masukan mentah (*raw input*) yaitu peserta didik dengan berbagai karakteristiknya. Masukan lingkungan (*environmental input*), yaitu faktor lingkungannya program pendidikan. Proses, menyangkut interaksi antara masukan sarana dan peserta didik (masukan mentah), keluaran, (*output*) yaitu kuantitas lulusan yang disertai kualitas perubahan tingkah laku yang di dapat melalui kegiatan belajar membelajarkan. Masukan lain (*other*) adalah daya dukung lain yang memungkinkan para peserta didik dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk kemajuan hidupnya. Pengaruh, (*impact*); menyangkut hasil yang dicapai peserta didik.

Dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilan, pendidikan luar sekolah tetap mengacu pada tujuh komponen pendidikan luar sekolah.

a. Masukan Sarana

Masukan sarana meliputi para pengelola program, instruktur, fasilitas serta tujuan program pelatihan keterampilan.

Tujuan program pelatihan yaitu:

- 1) Mempersiapkan dan membantu peserta didik/masyarakat dengan memberikan kesempatan dan kemudahan agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan rohani, jasmani maupun sosialnya;
- 2) Menumbuhkan meningkatkan keterampilan kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan secara wajar.

Fungsi program pelatihan keterampilan dimaksudkan untuk menggali, mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan potensi dan sumber yang dimiliki peserta didik/masyarakat memberikan pelayanan yang bersifat bimbingan pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan keterampilan.

b. Masukan Mentah

Masukan mentah yaitu peserta didik yang berkala. Mereka para peserta didik dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, juga menyangkut berbagai karakteristik. Karakteristik internal berupa motivasi (dorong, kebutuhan, minat, sikap dan aspirasi). Karakteristik eksternal berhubungan dengan status sosial ekonomi dan cara kebiasaan belajar.

c. Masukan lingkungan

Dalam upaya meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap penerimaan pelayanan, maka para pengelola program pelatihan keterampilan berusaha mendayagunakan semua sarana prasarana dan fasilitas yang ada, baik di lingkungan pemukiman maupun lingkungan desa. Lingkungan disini merupakan segala sesuatu yang memberi dukungan atau hambatan bagi terwujudnya potensial dari individu, untuk mengembangkan bakat, minat, aspirasi dan kreativitas.

d. Proses

Proses terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Tahap pendekatan awal:
 - (1) orientasi dan konsultasi;
 - (2) identifikasi;
 - (3) motivasi;
 - (4) seleksi.
2. Tahap penerimaan:
 - (1) registrasi;

- (2) penelaahan dan pengungkapan masalah
- (3) penempatan pada program.
3. Tahap pendidikan dan penyuluhan:
 - (1) bimbingan pengetahuan dan teknologi tentang kesehatan lingkungan dan pemukiman;
 - (2) bimbingan perilaku hidup sehat;
 - (3) bimbingan keterampilan.
4. Tahap pembinaan lanjut:
 - (1) bimbingan peningkatan usaha;
 - (2) bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat.

Proses belajar membelajarkan pelatihan keterampilan menggunakan metode ceramah sebagai pengantar dalam pembelajaran teori. Menurut hasil-hasil penelitian, cara pengajaran merupakan faktor yang menentukan keberhasilan siswa. Beard (1978) mengutip hasil eksperimen Joyce dan Weatherall yang mengatakan bahwa ceramah adalah metode yang paling efisien untuk pengajaran. Untuk pelajaran praktek keterampilan peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 10 orang.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suzanne Kindervatter bahwa pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process*, memiliki ciri-ciri dalam pendekatannya, yaitu "*small group structure*" yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 5-10 orang. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan minat.

Pendekatan belajar dalam Pendidikan Luar Sekolah dikemukakan dalam beberapa konsep, diantaranya:

1. Konsep Ivan Illich

Ivan Illich menggambarkan tentang adanya masyarakat yang bebas dari ikatan ikatan pendidikan sekolah. Illich mengemukakan bahwa sistem pendidikan formal harus ditolak, karena menitikberatkan produknya pada lulusan yang hanya didasarkan atas hasil penilaian dengan angka-angka dan ijazah. Sekolah telah mengaburkan makna belajar dan mengajar, dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi.

Proses pendidikan didominasi oleh guru yang pada gilirannya merampas harga diri peserta didik, yang mengakibatkan kurang kreatif dan rasa ketidak-bebasan untuk mengembangkan kemampuan diri dan potensi yang ada. Guru sering memainkan perannya dalam empat macam kekuasaan, yaitu sebagai hakim; penganjur ideologi; dokter dan peramal rahasia kehidupan peserta didik di masa depan. Hal ini

mengakibatkan tumbuhnya sikap ketergantungan peserta didik kepada pihak lain yang lebih berkuasa.

Pada bagian lain Illich mengemukakan bahwa, pendidikan sebagai pranata sosial yang ada memiliki hubungan yang mantap dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan mempunyai peranan yang mendasar untuk memanusiakan manusia. Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa "manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan". Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan adalah menumbuhkembangkan potensi peserta didik untuk dapat berkreativitas karena kreativitas merupakan lambang suatu masyarakat yang mampu mengungkapkan diri secara bebas, kritis terhadap lingkungannya, serta mampu berfikir dan bertindak di dalam dan terhadap dunia kehidupannya.

2. Konsep Suzanne Kindervatter

Suzanna Kindervatter dalam studinya yang berjudul "pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process*" mengajukan suatu pemikiran pembaharuan pada perkembangan ketiga yang diidentifikasinya sebagai *empowering process* dengan maksud bahwa pendidikan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu/ kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya di dalam masyarakat. Program belajar didesain untuk memberi kesempatan pada masyarakat guna menganalisis kehidupan mereka dan untuk mengembangkan keterampilan yang mereka kehendaki dalam merubah keadaan ekonominya. Suzanna Kindervatter mengajukan solusi masalah dengan "humanisasi" yaitu menempatkan insan pembangunan sebagai pelaku dan bukan sebagai penderita pembangunan. Salah satu cara humanisasi adalah melalui pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process*.

Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process* meliputi:

- 1) Need oriented, merupakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik;
- 2) Endogenous, yang berorientasi pada perubahan yang ada dalam masyarakat;
- 3) Self-Reliant, pendapatan yang mengutamakan rasa percaya diri;
- 4) Ecologically Sound, pendekatan yang berorientasi pada struktur atau sistem.

Pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process* mencakup delapan karakteristik, yaitu:

- 1) Terdiri dari kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang dengan berdasarkan atas kesamaan minat,
- 2) Sumber belajar berangsur-angsur menyerahkan tanggung jawab kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik,
- 3) Sedapat mungkin kepemimpinan diserahkan kepada peserta didik,
- 4) Sumber belajar mempunyai peranan sebagai fasilitator,
- 5) Kegiatan belajar senantiasa bertolak dari pengalaman dan masalah yang dihadapi peserta didik,
- 6) Metode yang dipilih memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif (misalnya bengkel kerja, permainan, belajar bersama dan ekspresi diri)
- 7) Semua keputusan dibuat secara musyawarah, tanpa adanya suatu hirarki,
- 8) Bahan belajar diarahkan pada kebutuhan dan kenyataan hidup.

Semua model ideal pendidikan luar sekolah sebagai *empowering process* berisikan dimensi pragmatis spesifik seperti tercantum pada uraian di bawah ini:

- a. Struktur; menekankan otonomi dan aktivitas kelompok kecil. Para anggotanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama.
- b. Waktu; ditentukan oleh peserta didik.
- c. Peserta didik; melatih kekuatan bersama-lama
- e. **Masukan Lain**

Masukan lain pada pelatihan keterampilan ini memanfaatkan sumber-sumber di lingkungan dalam maupun luar. Untuk mendukung hal tersebut di atas, perlu adanya kerjasama yang terpadu antara berbagai pihak terkait kunci keberhasilan pendidikan keterampilan sedikit banyak terkait dengan suksesnya kerjasama dengan dunia Industri.

f. **Keluaran**

Komponen keluaran merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik hasil pendidikan dan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pemukiman. Kualitas dan kuantitas yang dimaksudkan disini ditujukan pada aspek perubahan pola hidup dan perilaku hidup sehat yang terjadi pada para peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.

Dalam kajian ini Warren (1967:2) mengemukakan bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan kemampuan penalaran di samping keterampilan tangan, dan perhatian yang sama harus diberikan

pada perkembangan peserta didik di kawasan kognitif, psikomotorik dan afektif.

g. **Pengaruh**

Komponen pengaruh atau dampak merupakan tujuan dari program pendidikan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pemukiman. Penekanan utama bagi program pendidikan penyuluhan ini bagi peserta didik adalah agar mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, perilaku hidup sehat, sehingga dengan demikian mereka dapat berperan serta dalam pembangunan, menuju masyarakat sehat sejahtera, aman sentosa.

Ruang lingkup PLS tercermin pada istilah pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat dan tujuan pendidikan pada dasarnya sama, yaitu mengembangkan potensi manusia. Jika dibedakan, perbedaannya hanya terletak pada jumlah subyek didiknya. Subyek didik pemberdayaan masyarakat adalah komunitas, sedangkan subyek didik pendidikan adalah individu. Hal ini berkonsekuensi pada perbedaan pola atau dinamika interaksi dan kompetensi yang dituntut pada pihak petugasnya.

Komunitas adalah sekelompok individu yang hidup dan bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama. Di dalam kehidupan bersama tersebut selalu ada masalah yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga dituntut adanya kesadaran bersama dan kebersamaan tindakan dalam menanggulangnya. Untuk itu lahir kebutuhan belajar pada komunitas yang bersangkutan.

Dengan demikian ruang lingkup PLS jauh lebih luas ketimbang ruang lingkup pendidikan persekolahan, bahkan menjangkau ke kehidupan masyarakat secara luas. Keluasan lingkup garapan ini menyebabkan PLS memiliki jenis dan program yang sangat beraneka ragam, memiliki permasalahan dan dinamika tersendiri, dan memerlukan penanganan yang serius agar seluruh cakupan kegiatannya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ruang lingkup Program Pendidikan Non Formal (PNF):

1. Pendidikan Kecakapan Hidup
2. Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pendidikan Kepemudaan
4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
5. Pendidikan Keaksaraan
6. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
7. Pendidikan Kesetaraan

8. Pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

F. Program-program Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat

Berikut beberapa penjelasan singkat beberapa program yang tengah berkembang pesat di masyarakat:

1) Program Pendidikan Keaksaraan

Program keaksaraan adalah sebuah program yang dulu dikenal sebagai program Pemberantasan Buta Huruf atau PBH. Saat ini program tersebut bernama program Keaksaraan Fungsional atau KF. Di tataran internasional program tersebut disebut Literacy Program. Sesuai dengan namanya, program ini dimaksudkan untuk membantu warga masyarakat yang buta huruf untuk menjadi melek huruf. Buta huruf disini diartikan sebagai buta aksara dan angka Latin. Setelah mengikuti program ini peserta didik diharapkan mampu membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dan memanfaatkan kemampuan baca tulis tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

2) Program Pelatihan dan Kursus

Di dunia perusahaan, training dan sumber daya manusia dikesankan sebagai hal yang sama. Keduanya sebetulnya tidak sama persis. Training merupakan kegiatan pengembangan potensi sumber daya manusia khususnya tentang kompetensi, sedangkan pengembangan sumber daya manusia berarti bagian yang mengurus ketenagaan perusahaan, sehingga relain mengurus training juga peraturan ketenagaan, pendataan, penerimaan, penempatan, dan sebagainya.

Kursus agak berbeda dari pelatihan. Jika pelatihan terkait dengan kebutuhan organisasi, maka kursus terkait dengan kebutuhan individu terlepas dari kepentingan organisasi. Oleh karena itu kursus tumbuh dalam rangka memenuhi aneka ragam kebutuhan belajar masyarakat, meskipun yang telah berkembang luas di Indonesia adalah bidang-bidang yang terutama terkait dengan kepentingan mencari pekerjaan, membuka usaha, dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan pelatihan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan peningkatan SDM organisasi atau perusahaan.

3) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program PAUD adalah program pendidikan yang diperuntukkan anak usia dini (0-6 tahun). Secara kelembagaan, program tersebut mencakup TPA (Taman Penitipan Anak) untuk anak usia 0-2 tahun, Kelompok Bermain atau Playgroup untuk anak usia 3-4 tahun, dan Taman Kanak-kanak (TK) untuk usia 5-6 tahun.

Layanan pendidikan anak usia dini merupakan layanan pendidikan yang sangat berbeda dari pendidikan untuk kelompok usia yang lain, seperti anak usia Sekolah Dasar, usia remaja, ataupun orang dewasa.

Persoalan besar yang sedang menjadi fenomena up to date dan autentik di Indonesia saat ini terkait dengan PAUD adalah sebagian besar orang tua kurang paham tentang apa dan bagaimana seharusnya mendidik anak mereka. Padahal fungsi pendidikan di dalam keluarga bagi setiap anak terutama pada usia dini adalah pendidikan informal, sebuah jalur pendidikan yang dipandang sebagai pihak pertama dan utama yang memberikan landasan pembentukan bagi kepribadian manusia Indonesia.

4) Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)

Istilah kecakapan disini diartikan sebagai sesuatu yang lebih luas dari sekedar keterampilan. Istilah kecakapan mengandung unsur-unsur kecekatan, kesigapan, dan kecepatan, bahkan kreativitas, kepekaan, ketepatan, ketuntasan, dan kecerdasan dalam bertindak, sedangkan istilah keterampilan cenderung lebih menekankan aspek motorik dan dikaitkan dengan kejuruan atau vokasional (keterampilan kerja). Dengan demikian pendidikan kecakapan hidup mengarah ke pencapaian tingkat kecakapan yang profesional.

Pendidikan kecakapan hidup mencakup empat ranah, yaitu (a) kecakapan personal, (b) kecakapan sosial, (c) kecakapan akademik, dan (d) kecakapan vokasional. Kecakapan personal diartikan sebagai kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh setiap orang guna menghadapi persoalan-persoalan pribadi, seperti kecakapan-kecakapan mengenali, menilai, mengendalikan, menyadarkan, dan memperbaiki diri; kecakapan-kecakapan menjaga kesehatan diri, menjaga keamanan diri, membagi waktu, mengambil keputusan, menentukan sesuatu yang paling urgen bagi diri sendiri, dan mengatasi kebingungan diri sendiri; kecakapan-kecakapan menentukan, mengarahkan, dan memperbaiki tujuan hidup; kecakapan-kecakapan mengenal, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas keyakinan dan pengabdian terhadap tuhan; dan sebagainya.

Kecakapan sosial diartikan sebagai kecakapan-kecakapan berinteraksi dengan orang lain, seperti kecakapan memahami orang lain, kecakapan bertutur kata secara lisan maupun tertulis, kecakapan membawa acara, kecakapan berorasi, kecakapan menyesuaikan kecakapan memotivasi orang lain, kecakapan membantu sesama, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kecakapan akademik berarti kecakapan-kecakapan yang terkait dengan urusan akademik,

mulai dari kecakapan-kecakapan kognitif seperti memahami, membedakan, mengingat, mengaitkan sesuatu, berfikir logis, menganalisis, merangkai pengertian, menyimpulkan, menilai, mengembangkan penalaran, dan memecahkan masalah, hingga kecakapan-kecakapan menangkap dan menemukan konsep, prinsip ataupun teori, serta kecakapan-kecakapan menganalisis, menemukan, dan mengembangkan gagasan ataupun teori baru.

Selanjutnya kecakapan vokasional adalah kecakapan-kecakapan yang terkait dengan pekerjaan atau profesi, seperti kecakapan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, kecermatan dalam memeriksa pelaksanaan tugas, kepekaan terhadap masalah-masalah pekerjaan, kesigapan dalam mengatasi masalah keselamatan kerja, kreativitas dalam mengembangkan bidang tugas, dan kearifan dalam memimpin lembaga kerja.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (community development) atau pembangunan masyarakat desa (rural development). Program tersebut saat ini mengacu ke istilah yang baru, yaitu *community empowerment*. Secara konseptual, program ini sejalan dengan tipe program *developmental* yang diketengahkan oleh Boyle (1981). Yang menjadi sarannya adalah komunitas dan yang menjadi inti kegiatannya adalah membantu untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi bersama. Cara yang ditempuh dalam hal ini adalah mengembangkan potensi, kapasitas, atau kemampuan komunitas yang bersangkutan, baik kapasitas individu, kelompok, ataupun kelembagaannya, sedangkan target keluarannya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

Oleh karena itu yang diberdayakan adalah kapasitas komunitas, termasuk potensi individu, organisasi, dan lingkungannya. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pembimbingan ke arah pemecahan masalah dan bukan dalam bentuk pemberian solusi siap pakai, atau "hidangan siap santap". Komunitas digugah kesadarannya terhadap masalah yang sedang mereka hadapi dan dampaknya bila masalah tersebut tidak segera diatasi, serta potensi yang mereka miliki atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan, dimotivasi untuk bersedia dan berupaya mengatasi masalah tersebut, dibantu mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang ada pada diri mereka dan di lingkungannya, dan dibimbing ke arah penemuan solusi yang tepat, serta diberi pendampingan dalam proses penuntasan masalahnya.

6) Program Pengentasan Anak Jalanan

Masalah anak jalanan di Indonesia dewasa ini semakin mengemuka, terutama di kota-kota besar. Jumlah mereka semakin bertambah. Rujukan penanganannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Implementasi penanganannya telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun secara keseluruhan belum menampakkan hasil yang berarti. Segi-segi penanganan yang dibutuhkan beraneka ragam, di antaranya adalah sosial-ekonomi, keamanan, budaya, dan keagamaan. Masalah anak jalanan di Indonesia tampaknya merupakan masalah yang sangat kompleks karena terkait dengan ketidakberdayaan sosial ekonomi, sosial psikologis, kultural, edukatif, dan bahkan sumber daya manusia nasional. Oleh karena itu untuk bisa mengatasinya secara lebih tuntas diperlukan pemikiran yang lebih serius dan penanganan yang lebih menyeluruh.

7) Program Pendidikan Kesetaraan dan Homeschooling

Hasil pendidikan informal diakui setara dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Program *homeschooling* merupakan sekolah yang dilaksanakan di rumah. Fungsinya adalah sebagai pendidikan kesetaraan, sedangkan pelaksanaannya menggunakan format hybrid atau perpaduan antara pendidikan informal dan nonformal. Selain ditangani sendiri oleh orang tua di rumah, keluarga juga mengundang guru-guru privat untuk membantunya. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan mulai dari tingkat prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan lanjutan. Untuk memperoleh pengakuan atas pencapaian hasil belajar anak pada setiap tingkat pendidikan, keluarga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan sekolah afiliasi.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Kejar atau kelompok belajar adalah pendidikan masyarakat formal yang difasilitasi pemerintah yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, sasaran pendidikan kesetaraan adalah:

- 1) Penduduk tiga tahun di atas usia SD/MI (13-15) Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTS (16 -18) Paket B
- 2) Penduduk usia sekolah yang bergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dll
- 3) Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena:
 - Ekonomi terbatas
 - Waktu terbatas
 - Geografis (etnik minoritas, suku terasing)
 - Keyakinan seperti Ponpes
 - Bermasalah, (sosial, hukum)
- 4) Penduduk usia 15-44 yang belum tuntas wajar Dikdas 9 tahun
- 5) Penduduk usia SMA/MA berminat mengikuti program Paket C
- 6) Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti Program Paket C karena berbagai alasan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang acuan standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang meliputi:

- Standar Kompetensi Lulusan
SKL Pendidikan Kesetaraan sama dengan SKL pendidikan formal akan tetapi memiliki kekhasan sendiri meliputi:
 1. Paket A lulusannya memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup
 2. Paket B, memenuhi tuntutan dunia kerja
 3. Paket C, memiliki keterampilan berwirausaha
 - Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Pendidik Kesetaraan harus memiliki Kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik dan andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial
Kualifikasi Akademik: Paket A (SMA), Paket B (DII), Paket C (S1)
 - Standar Sarana Dan Prasarana
Proses belajar mengajar pendidikan kesetaraan dapat dilakukan di berbagai lokasi yang memiliki standar Standar sarana pendukung

meliputi: lahan dan bangunan, buku pelajaran, buku perpustakaan, alat peraga, media pembelajaran

- Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan kesetaraan merupakan standar minimal meliputi: perencanaan program, penyusunan Kurikulum, kegiatan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, penilaian hasil belajar dan pengawasan. Pengelolaan pendidikan menerapkan, manajemen berbasis satuan pendidikan dengan ciri; kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas

- Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan kesetaraan terdiri atas:

- Biaya investasi
- Biaya operasional
- Biaya personal

- Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan meliputi:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah
Jika ditinjau lebih jauh ada beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan program kejar paket saat ini.
 - Kekuatan (*Strength*)
 - a. Kejar paket merupakan salah satu usaha untuk mensukseskan sistem pendidikan nasional (wajib belajar 9 tahun)
 - b. Banyak warga yang berminat mengikuti kejar paket, terutama yang belum lulus pendidikan dasar.
 - c. Terdapat banyak instansi yang menyelenggarakan program kejar paket.
 - d. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program kejar paket cukup besar.
 - e. Pemegang ijazah program paket memiliki hal eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah pendidikan formal.
 - Kelemahan (*Weaknesses*)
 - a. Berlakunya ijazah program kejar paket dengan program sekolah reguler yang tidak sama, dalam arti lulusan program kejar paket selalu menjadi yang nomor dua.
 - b. Sistem manajemen dan birokrasi program kejar paket masih kurang tertata dengan baik.
 - c. Tidak ada seleksi ketat bagi calon peserta program paket sehingga input yang masuk hanya seadanya.

- d. Standar sarana dan prasarana untuk menunjang program kejar paket yang ada di lapangan masih kurang.
 - Peluang (*Opportunities*)
 - a. Penyamaan standar keberlakuan ijazah program kejar paket dengan ijazah program pendidikan reguler.
 - b. Lulusan kejar paket ada yang sudah masuk ke perguruan tinggi dan sukses dalam berkarir.
 - c. Adanya lulusan program kejar paket yang sudah siap kerja sehingga peluang untuk mencari peserta baru cukup besar.
 - Ancaman (*Threats*)
 - a. Program kejar paket rata-rata terancam ditutup karena hasil pembelajarannya kurang signifikan.
 - b. Program kejar paket banyak mendapat sorotan dari lembaga pendidikan formal karena sistem pendidikannya yang cukup mudah dan tidak memberatkan siswa.
 - c. Lulusan pendidikan program kejar paket tidak mampu untuk menguasai teknologi bahkan materi yang disampaikan tidak dikuasai dengan sempurna.

Pendidikan luar sekolah yang sangat mendasar sifatnya adalah pendidikan keluarga. Meskipun pendidikan keluarga amat penting, yang bahkan meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup sebagai anggota masyarakat, pengaturannya merupakan wewenang keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang memerlukan bantuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lingkungannya dapat memperoleh bantuan melalui keikutsertaan orang tua dalam kelompok belajar atau kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri.

Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih besar daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung semakin cepat menimbulkan kebutuhan yang beraneka ragam, semakin luas dan semakin banyak untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan.

Kemakmuran yang bertambah luas memungkinkan lebih banyak anggota masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan budaya. Banyak kegiatan pendidikan dalam bidang kebudayaan tidak dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Banyak kegiatan pendidikan dalam kehidupan keagamaan juga tidak dapat

diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah. Bahkan berbagai bentuk kegiatan pendidikan Pondok Pesantren, Majelis Taklim, kelompok pengajian telah ada lama sebelum pendidikan sekolah diadakan, sedangkan berbagai bentuk pendidikan dalam kehidupan keagamaan yang baru di luar sekolah lahir sebagai akibat terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan industri serta pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil menengah maupun besar menuntut tersedianya:

1. Tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan,
2. Tenaga kerja yang terlatih untuk dapat menyelenggarakan kegiatan tertentu.

Pendidikan sekolah pada umumnya tidak menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi lulusan yang siap latih. Oleh sebab itu, pendidikan luar sekolah juga merupakan jembatan antara pendidikan sekolah dan dunia kerja. Berbagai kursus dan bentuk latihan kerja yang lain memungkinkan lulusan sekolah-sekolah jenis tertentu memperoleh kemampuan kerja yang diperlukan di dunia kerja.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah pada umumnya tidak terpusat, lebih terbuka dalam penerimaan peserta didik dan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah diadakan juga untuk memungkinkan anggota masyarakat yang tidak mendapat kesempatan bersekolah di jenjang pendidikan dasar memperoleh pendidikan dasar melalui program-program yang khusus diadakan untuk mereka, sehingga wajib belajar bagi warga negara sesuai dengan usia yang bersangkutan dapat terwujud sepenuhnya.

Pendidikan luar sekolah seiring dengan pendidikan sekolah memungkinkan manusia Indonesia sepanjang hayatnya mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan bilamana ia memerlukannya. Kebanyakan kegiatan pendidikan luar sekolah diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pihak-pihak yang bersangkutan. Peluang amat luas dalam jalur pendidikan luar sekolah untuk mengajar, membimbing dan/atau melatih di satu pihak serta untuk belajar dan berlatih di lain pihak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang tidak dapat diperoleh di jalur pendidikan sekolah.

Sistem pendidikan nasional memungkinkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dengan mudah dapat berpindah dari jalur pendidikan luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah dan sebaliknya. Upaya Pemerintah di jalur pendidikan luar sekolah terwujud sebagai

program-program pendidikan masyarakat, seperti program pemberantasan buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar, serta pemberian bantuan keuangan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang memerlukannya bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah diadakan untuk memberi jaminan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bersangkutan atas dasar anggapan bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di luar sekolah harus mendapat kebebasan seluas mungkin. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah ini juga berusaha agar dalam dunia pendidikan terpelihara ketertiban, maka Peraturan Pemerintah ini harus dapat melindungi masyarakat terhadap kemungkinan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah yang dapat merugikannya.

G. Evaluasi Pemahaman

1. Jelaskan secara singkat tentang implementasi kebijakan pendidikan luar sekolah!
2. Setelah mengkaji kebijakan pendidikan luar sekolah, berikan saran yang dapat diterapkan untuk peningkatan program kejar paket sebagai bentuk akses pendidikan yang bermutu seperti yang diamanatkan kementerian pendidikan dan kebudayaan!
3. Jelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat!
4. Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri.
5. Jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan kaitan penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jabatan kerja!
6. Pendidikan Luar Sekolah dirancang dari kebutuhan masyarakat dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keragaman karakteristik, maka isi programnya selalu mengarah pada fleksibilitas. Dalam rangka merencanakan program-program PLS, jelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh!

VIII

EVALUASI PEMAHAMAN TENGAH SEMESTER

A. Soal pilihan ganda

1. Jenis pendidikan yang mengharuskan peserta didiknya untuk menghadiri kelas adalah...
 - a. Pendidikan informal
 - b. Pendidikan formal
 - c. Pendidikan nonformal
 - d. Pendidikan publik
2. Bagaimana pendidikan diturunkan secara turun-temurun?
 - a. Pengajaran
 - b. Rekaman
 - c. Pelatihan
 - d. Penelitian
3. Dampak positif dari perubahan sosial budaya, kecuali...
 - a. Sebagai pedoman dalam hubungan manusia dengan komunitasnya atau kelompoknya.
 - b. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, seperti tingginya tingkat kriminalitas.
 - c. Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya.
 - d. Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.
4. Menurut Max Webber perubahan sosial budaya adalah...
 - a. perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya.
 - b. perubahan segenap cara berpikir dan bertingkah laku, yang ditimbulkan karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif.
 - c. perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama.

- d. semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial yang dimaksud tersebut mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
5. Melalui proses pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk...
 - a. Sosialisasi kebudayaan
 - b. Interaksi nilai-nilai masyarakat
 - c. Memelihara hubungan timbal-balik
 - d. Kesenjangan sosial
6. Berikut ini pengertian analisis, kecuali...
 - a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
 - b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
 - c. Penarikan kesimpulan berdasarkan rumor
 - d. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya
7. Analisis kebijakan didefinisikan oleh Patton dengan...
 - a. mengungkapkan analisis kebijakan sebagai sebuah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bersangkutan tentang masalah-masalah kemasyarakatan beserta dengan tindakan pemecahannya
 - b. analisis kebijakan dilihat sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik
 - c. analisis kebijakan adalah suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik rasional.
 - d. analisis kebijakan sebagai suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan
8. Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, kecuali...
 - a. Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja
 - b. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri
 - c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi
 - d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia mengutamakan teori dan tidak terlalu memusingkan tentang kerja praktek
9. Pendidikan model unit produksi sebenarnya adalah...
 - a. Model Sekolah
 - b. Model Magang
 - c. Model School-based Enterprise
 - d. Model Sistem Ganda
10. Implementasi dari model pendidikan sistem ganda, kecuali...
 - a. Mendapatkan teori di sekolah
 - b. Praktik di tempat usaha
 - c. Nilai dari guru
 - d. Nilai dari pelanggan
11. Salah satu model incremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi Negara dalam resesi ekonomi global. Antara lain.....
 - a. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan pertimbangan akan semua factor yang ada
 - b. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya
 - c. Dapat dihitung perbandingan Antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan
 - d. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional
12. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh organisasi public Pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional; maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan public tersebut adalah.....

- a. Incremental
 - b. Institusional
 - c. Rasional-komprehensif
 - d. Mixed scanning (pemindaian campuran)
13. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian (mixed scanning model) untuk menganalisa kebijakan public, adalah.....
- a. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional
 - b. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari perbandingan kebijakan lama dengan yang baru
 - c. Hasil analisisnya banyak bersifat mengobati (remedial) daripada mencegah
 - d. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan public yang kerap dihadapi model rasional dan model incremental
14. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka consensus elit digunakan untuk....
- a. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir
 - b. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir
 - c. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan system elit politik
 - d. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik
15. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah.....
- a. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan
 - b. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan public
 - c. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik
 - d. Perilaku elit politik

B. Soal essay

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan
2. Apa yang dimaksud dengan inovasi serta inovasi pendidikan? Jelaskan juga latar belakang terjadinya inovasi pendidikan!
3. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial budaya!
4. Berikan contoh analisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah!
5. Berikan gambaran tentang analisis kebijakan pendidikan kejuruan!
6. Jelaskan salah satu kebijakan pendidikan tinggi!
7. Jelaskan kebijakan pendidikan luar sekolah beserta contohnya!

IX

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI BERBAGAI TINGKATAN

A. Imbas Globalisasi untuk Sekolah Menengah

Sejumlah SMK dan SMA di beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) yang berlaku secara internasional dalam pengelolaan manajemen sekolah mereka, yaitu SMM ISO 9001:2000; dan banyak diantaranya yang sudah menerima sertifikat ISO.

Globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara, dari keunggulan komparatif kepada keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Kuntowijoyo, 2001: 122).

Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat kosmopolitanisme dimana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara kompetitif under-quality (berkualitas rendah). Kecenderungan ini sudah mulai terlihat pada tingkat perguruan tinggi dan bukan mustahil akan merambah pada tingkat sekolah menengah.

Bila persoalannya hanya sebatas tantangan kompetitif, maka masalahnya tidak menjadi sangat krusial. Tetapi salah satu ciri globalisasi adalah adanya “regulasi-regulasi”. Dalam bidang

pendidikan hal itu tampak pada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tentang sekolah berstandar internasional. Pada jajaran SMK regulasi sekolah berstandar internasional tersebut sudah lama disosialisasikan. Bila regulasi berstandar internasional ini kemudian ditetapkan sebagai prasyarat bagi output pendidikan untuk memperoleh akses ke bursa tenaga kerja global, maka hal ini pasti akan menjadi permasalahan yang serius bagi pendidikan nasional.

Globalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional, tetapi pada waktu yang sama ia juga menghadirkan tantangan dan permasalahan pada pendidikan nasional. Karena pendidikan pada prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari permasalahan pendidikan masa kini.

B. Masalah Pemerataan Pendidikan

Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan se-transparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh

pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.

C. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.

Sarana dan prasarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem. Sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi KBM yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menghasilkan KBM yang efektif dan efisien.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42.

D. Acuan Mutu Pendidikan Nasional

Standar mutu pendidikan nasional sebagai tolok ukur dan acuan mutu pendidikan nasional. Tanpa standar nasional mutu pendidikan, kita tidak bisa mengetahui apa yang harus dicapai, sebab persaingan global yang terjadi sekarang itu adalah bagaimana melihat standar-standar di negara lain.

Regulasi pendidikan menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.20 Tahun 2003 Ps 1). SNP dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (UU No.20 Tahun 2003 Ps 35 ayat 2).

A. Tata Kelola Guru

Mendikbud (2016-2019) percaya untuk melakukan penuntasan masalah guru, kuncinya pada tata kelola guru.

Sistem menata dan mengelola Guru dan Tenaga Kerja sekolah masih belum memiliki formula yang baik. Dari kesejahteraan guru, sistem pelatihan guru, dan sistem perekrutan guru.

B. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurang Inovatif

AJAR pemahaman guru akan pentingnya inovasi pendidikan akhirnya melahirkan metode pembelajaran yang konvensional. Metode pembelajaran itu, nilainya terlalu monoton, tidak kreatif dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan masalah tambahan.

C. Mahalnya Biaya Pendidikan

Dikutip dari CNBC Indonesia-- Berbicara mengenai berinvestasi di pendidikan anak, Indonesia ternyata masuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal menurut survey yang dilakukan oleh HSBC. Indonesia berada di peringkat 13, sementara posisi pertama diduduki oleh Hong Kong.

Para orang tua di Hong Kong merupakan orang tua yang membayar paling mahal untuk pendidikan anaknya, dengan rata-rata biaya lebih dari US\$130.000 untuk biaya mulai dari pendidikan dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Banyak masyarakat yang masih menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih tergolong cukup mahal. Mulai dari sekolah dasar hingga bangku kuliah banyak keluhan mahalnya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya.

Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini

D. Sistem Rekrutmen dan Distribusi Guru

Rekrutmen guru yang adil adalah melakukan persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang sehingga melalui rekrutmen tersebut pemerintah bisa memperoleh guru yang baik. Semakin efektif proses rekrutmen dan seleksi, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan guru yang tepat.

Pengembangan dan perencanaan sistem rekrutmen dan seleksi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah agar proses yang berlangsung cukup lama dan mengeluarkan biaya cukup besar tersebut menjadi tidak sia-sia karena mendapatkan hasil yang berkualitas.

E. Sistem Evaluasi Belajar

Evaluasi pembelajaran yang menjadi wadah pengukuran terkait berhasil atau tidaknya peserta didik menyerap asupan yang diberikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Evaluasi sangatlah berperan penting dalam memberikan follow up terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik.

Sejauh ini evaluasi yang dijalankan dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah-sekolah sangatlah monoton, kalau tidak tes tulis dan tes lisan, paling ya portofolio. Lamanya proses belajar hanya dilihat dari hasil duduk mengerjakan soal dalam waktu yang singkat.

Jujur atau tidaknya dalam mengerjakan soal evaluasi tidaklah menjadi hal yang utama. Ketika hal ini dikaitkan dengan Emotional Quotient, sistem penilaian seperti ini sangatlah kurang dibenarkan, seharusnya aspek-aspek itu bersinergi, bukan berdiri sendiri dan saling melemahkan.

"Kenapa siswa menyontek saat ujian? Jawabannya adalah karena kenyataannya nilai dan peringkat lebih dihargai daripada kejujuran". Kalimat tersebut terkesan guyonan belaka, namun kalimat tersebut mempunyai maksud lain dan menjadi bahan renungan yang menarik.

F. Ketidaksesuaian antara Dunia Pendidikan dengan Dunia Kerja

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Indonesia tergolong rendah kualitasnya sehingga dunia usaha dan industri menghadapi kesulitan untuk merekrut SDM berkualitas dalam waktu cepat. Investor baru dari luar atau dalam negeri yang membawa teknologi khusus menghadapi kesulitan yang serius mencari tenaga kerja yang baik di Indonesia karena ketersediaan tenaga kerja berketerampilan sangat terbatas.

Lulusan dari ribuan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak jumlahnya tetapi tidak membawa

keterampilan yang memadai di bidang teknologi dan industri. Kebanyakan sarjana yang lulus berasal dari bidang humaniora, yang kurang sesuai untuk masuk pasar kerja di bidang ini. Pasokan sarjana sudah atau bahkan terlalu banyak, tetapi pasokan keterampilan masih sangat sedikit.

Yang menyedihkan adalah kebijakan untuk menyambung sistem pendidikan dengan dunia industri tidak pernah benar-benar dijalankan. Kebanyakan pendidikan dan pendidikan tinggi sejak lama mengambil jalannya sendiri, kacamata kuda dan tidak mau tahu kebutuhan dunia di luarnya. Akhirnya lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan kebutuhan masyarakat pembangunan secara umum (mismatch).

G. Kekerasan dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan sejatinya merupakan sebuah proses pendewasaan yang harus dilalui oleh manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Tujuan dari proses pendidikan ini adalah untuk menghasilkan individu yang berkualitas serta memiliki karakter dan juga memiliki keterampilan yang dapat berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Kekerasan seperti; antar guru dengan siswa, tawuran antar siswa masih terjadi di beberapa daerah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil pengawasan dan pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan. Sejak bulan Januari hingga Oktober 2019, tercatat 127 kasus kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Berdasarkan data KPAI, kekerasan seksual berjumlah 17 kasus dengan korban 89 anak, yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Pelaku mayoritas adalah guru 88 persen dan kepala sekolah 12 persen.

H. Pungutan Liar di Sekolah Masih Merajalela

Dalam konteks pendidikan kejadian pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh guru, pegawai atau karyawan, pemimpin sekolah dan sebagainya.

Mereka meminta sesuatu kepada anak didiknya untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa uang dan lain sebagainya melalui berbagai bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada seperti sumbangan masjid yang besarnya tidak biasa, biaya seragam, buku, dan sebagainya.

Pungutan liar yang dipergunakan untuk kesejahteraan pribadi, sebab dana yang digelontorkan pemerintah untuk DAK Fisik dan BOS sangat besar.

I. Sekolah untuk Kelompok Difabel

Dikutip dari CNN Indonesia --- Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus.

Selama ini, penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 di antaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia pun baru 10 persen yang bersekolah di SLB

J. Pendidikan Agama dan Pendidikan Mental Belum Maksimal

Pendidikan mental anak merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus. Sebabnya tentu tidak lain karena orang yang sukses sejatinya mempunyai keadaan mental yang kuat.

Karakter merupakan watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian manusia. Karakter juga merupakan cerminan diri seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, walaupun mereka lahir dari orang tua yang sama, hidup di lingkungan yang sama, maupun sekolah di tempat yang sama.

Baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, anak harus dididik untuk bersikap sopan santun. Pembangunan watak atau karakter sangatlah penting. Kita ingin membangun Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa ini juga ingin menjadi bangsa yang unggul dan berperadaban yang mulia. Peradaban ini hanya bisa kita capai apabila masyarakat kita berkarakter dan menjadi masyarakat yang baik.

K. Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

Bank Dunia (World Bank) menyebutkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, meski perluasan akses pendidikan untuk masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan.

Rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia tercermin dari peringkat Indonesia yang masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara tetangga. Indikator peringkat kualitas pendidikan ini terlihat dalam jumlah kasus buta huruf. Misalnya, 55% anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10% di Vietnam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan memang kualitas pendidikan di tanah air masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Padahal, dari sisi anggaran, dana untuk pendidikan telah mencapai Rp. 444 triliun atau sekitar 20% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

L. Paradigma Peserta Didik yang *Certificate Oriented*

Paradigma ini masih melekat dalam benak kebanyakan peserta didik. Peserta didik masih berfikir bahwa sekolah hanyalah tempat untuk mendapatkan pekerjaan yang bersifat formal semata. Masalah yang lebih serius adalah ketika peserta didik beranggapan bahwa pekerjaan itu bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan menggunakan selebar ijazah. Implikasinya adalah mereka menganggap bahwa ijazah kelulusan adalah segala-galanya.

Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu peserta didik tidak belajar serius selama proses pendidikannya dan tidak memiliki kualitas, terlebih lagi untuk belajar seumur hidup. Sehingga, peserta didik berfikir bagaimana agar bisa lulus ujian bukan bagaimana agar memiliki potensi dan *skill*.

M. Lemahnya Pengakuan Negara atas Pendidikan di Pesantren

Masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan di pesantren dan madrasah (diniyah) hingga saat ini masih menjadi permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadapi Indonesia. Walaupun model pendidikan tersebut sudah berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Peran pendidikan di pesantren dan madrasah (diniyah) sudah termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Sehingga, tidak heran jika belakangan ini kekerasan atas nama agama, SARA, dan benih-benih radikalisme tumbuh subur. Sebab, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadai.

Hal tersebut terjadi karena pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Jadi, sekolah perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang komprehensif (*tafaqquh fiddin*). Untuk itu, RUU madrasah dan pesantren harus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, yang mana tujuan tersebut agar terjadinya kesetaraan dalam bidang pendidikan agama, sehingga meminimalisir terjadinya dikotomi pendidikan agama.

N. Munculnya Benih Paham Radikalisme dan Krisis Nasionalisme

Mungkin tidak terlalu tepat jika disimpulkan bahwa banyak anak didik usia sekolah terpapar ideologi radikal. Namun, jika mengikuti

banyak survei menunjukkan terdapat benih-benih radikalisme dan saat yang sama meningkatnya krisis nasionalisme.

Dua isu inilah yang mesti mendapatkan perhatian dari penataan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan. Karena jika elemen tersebut menguat akan menjadi batu sandungan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat membangun kepercayaan anak didik bahwa Indonesia adalah tempat yang dapat menjamin kehidupan yang damai, bebas menjalankan syariat agama, dan keyakinannya masing-masing tanpa harus meniadakan satu dengan yang lainnya.

O. Masih Rendahnya Kesejahteraan Guru di Indonesia

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik.

Permasalahan rendahnya kesejahteraan guru memaksa guru untuk mencari kerja sampingan. Hal tersebut biasanya akan berimplikasi pada kinerja yang dilakukannya dalam melaksanakan proses pendidikan, dikarenakan melemahnya konsentrasi pada peningkatan kualitas dan kapasitas dirinya.

P. Paradigma Tujuan Pendidikan di Masyarakat Masih Banyak yang Salah

Masyarakat terutama di pedesaan masih memiliki paradigma bahwa pertama, tujuan pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan semata bukan untuk mendewasakan peserta didik, kedua, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ukuran kesuksesan dari pendidikan adalah menjadi PNS, jadi meskipun berhasil dalam bidang materi namun tidak menjadi PNS atau berseragam dinas maka akan dianggap bahwa pendidikannya telah gagal. Paradigma seperti ini yang akan membuat tujuan pendidikan masih memprihatinkan meskipun terkesan sepele namun cukup fatal karena akan membentuk pola pikir anak didik yang salah pula.

Q. Wajib Belajar 12 Tahun Masih Sebatas Retorika

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian tentang orientasi anggaran pendidikan yang berkeadilan pada program wajib belajar 12 tahun. Hasil penelitian menyatakan belum adanya prioritas pemerintah daerah pada program ini.

Seperti yang diketahui, program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu program dari Nawacita. Namun, menurut JPPI hal ini masih belum beranjak dari sekedar retorika saja.

Beberapa daerah masih menggunakan istilah wajib belajar 9 tahun dan belum ada komitmen dalam implementasi wajib belajar 12 tahun. Temuan lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan di daerah belum berorientasi pada kualitas guru.

R. Tertinggalnya Pendidikan di Daerah Terpencil



Gambar 45; Keterbatasan Akses ke Sekolah di Daerah Tertinggal

Desa terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) dan transportasi, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Dengan demikian, maka hal tersebut dapat menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata. Kesenjangan kualitas pendidikan antara di kota dengan di daerah terpencil masih tinggi. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya pendidikan di daerah terpencil. Tiga permasalahan utama yang saling terkait dan perlu diatasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah terpencil, yaitu:

1. Frekuensi kedatangan pengawas dari Dinas Pendidikan terkendala tantangan geografis dan berbanding lurus dengan persentase ketidakhadiran guru.

2. Kurangnya informasi dan transparansi tentang kriteria, mekanisme, dan pembayaran tunjangan untuk guru yang bekerja di daerah terpencil.
3. Tidak adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang terkait langsung dengan keberadaan atau kualitas layanan guru.

S. Kurikulum yang Selalu Berubah-Ubah

Sistem pendidikan atau kurikulum di Indonesia masih sering berubah. Kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sejak 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

1. Kurikulum rencana pelajaran (1947-1968), yang terdiri dari:
 - Kurikulum pelajaran 1947
 - Kurikulum rencana pendidikan 1964
 - Kurikulum 1968
2. Kurikulum berorientasi pencapaian (1973-1997)
 - Kurikulum 1973
 - Kurikulum 1975
 - Kurikulum 1984
 - Kurikulum 1997
3. Kurikulum berbasis kompetensi (2004-2013)
 - Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004
 - Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006
 - Kurikulum 2013 (K-13)

Menurut Muhammadi (2016: 51) menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yaitu:

1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kolonialis.
2. Perkembangan IPTEK yang pesat sekali.
3. Pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia, dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan.

Banyaknya perubahan kurikulum yang ada di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang terdapat dalam bidang pendidikan. Artinya, perubahan kurikulum berkaitan dengan buku pelajaran yang akan digunakan peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Serta harga buku pelajaran atau buku penunjang memiliki harga yang cukup mahal.

T. Kondisi Darurat yang Terjadi Lantaran Banyak Kasus Korupsi yang Berkaitan dengan Anggaran Pendidikan

Catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada rentang waktu 2005-2016 terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan

dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun dan senilai suap Rp 55 miliar.

Pelakunya melibatkan kepala dinas, guru, kepala sekolah, anggota DPR/DPD, pejabat kementerian, dosen, dan rektor. Kasus terbanyak terjadi di Dinas Pendidikan.

Adapun yang menjadi objek terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sarana dan prasarana, dana BOS, dana buku, dan infrastruktur sekolah.

U. Kurangnya Keteladanan

Masalah pendidikan saat ini, disamping terkait materi ataupun metodologi pembelajaran, hal terpenting adalah kurangnya keteladanan. Seharusnya para guru bersungguh-sungguh menjadi pendidik yang mampu memberikan keteladanan, bukan sekedar hanya menjadi pengajar.

V. Minimnya Fasilitas Penunjang Belajar di Sekolah

Masalah ini sudah tidak asing lagi bagi yang sering menonton berita di TV. Di zaman ini, perkembangan IPTEK sudah semakin pesat dan ini memacu laju pengetahuan manusia. Kurangnya fasilitas belajar yang tersedia di sekolah juga memberi pengaruh besar dalam masalah pendidikan di Indonesia.

Menurut Welkis (Selasa (10/01/2017): Timur Express) menjelaskan tentang fakta yang menjadi minimnya fasilitas pendidikan adalah sekolah-sekolah yang terdapat di perkotaan lebih memiliki fasilitas yang memadai dan mendukung dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil atau pelosok.

Melihat gedung sekolah yang hanya beratapkan dedaunan, beralaskan tanah, dinding bangunan yang sudah berlubang dan hampir bocor, serta tidak adanya jaringan ke internet menjadi bukti nyata lalainya pemerintah dalam mendukung proses pendidikan. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan karena saat ini harus mengejar ketertinggalan.

W. Kontroversi Diselenggarakannya Ujian Nasional (UN)

Perdebatan mengenai dilaksanakannya UN sudah terjadi saat kebijakan tersebut mulai digulirkan pada tahun ajaran 2002/2003. Setidaknya pasti ada faktor yang menyebabkan penyimpangan selama kebijakan UN.

Menurut Welkis (Selasa (10/01/2017) : Timur Express) ada empat yang menunjang penyimpangan kebijakan UN, yaitu:

1. Dalam ilmu pendidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Akan tetapi yang menjadi penilaian dalam UN hanyalah satu aspek yaitu

kognitif, sedangkan dua aspek lainnya tidak dilakukan ujian sebagai penentu kelulusan.

2. UN hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.
3. Aspek sosial dan psikologis, dimana para murid akan merasa tertekan dengan adanya UN karena soal-soal tersebut bukan dibuat oleh sekolah mereka.
4. Aspek ekonomi, yaitu belum dibuatnya sistem yang jelas untuk menangkal penyimpangan finansial dana UN.

Pemerintah perlu mencari jalan keluar dalam masalah ini, karena tidak adil bagi para murid yang hanya dinilai berdasarkan pengetahuan saja, sedangkan sikap maupun keterampilan dibiarkan begitu saja.

X. Pendidikan Tidak Berbasis Cita-Cita Peserta Didik

Masalah yang paling fatal dalam pendidikan adalah sampai saat ini pendidikan sama sekali tidak dengan sungguh-sungguh ingin mencerdaskan dan ingin mendidik supaya generasi muda mendapatkan masa depan yang jelas. Manajemen pendidikan belum memperhatikan dan belum menganggap penting untuk mengembangkan anak sesuai dengan potensinya.

Harus diakui bahwa peserta didik mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak, meskipun beberapa peserta didik ada yang mempunyai cita-cita tetapi mungkin hanya bersifat semu dan hanya pengakuan verbal semata. Yang terjadi adalah peserta didik belajar secara mengambang dan tidak memiliki arah yang jelas, serta bagi peserta didik tersebut yang terpenting adalah berangkat ke sekolah. Satu hal yang tak kalah penting adalah manajemen pendidikan tidak mengarahkan peserta didik untuk mewujudkan cita-citanya, namun bagaimana peserta didik agar bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali.

Y. Diskriminasi Status Guru

Masih adanya kesenjangan pendapatan, tunjangan, dan fasilitas oleh guru tidak tetap (honor), menunjukkan bahwa pemerintah melakukan diskriminatif.

Hal tersebut terjadi karena pemerintah menggolongkan guru menjadi beberapa kelompok, yaitu Guru PNS, PNS Depag, PNS DPK, Guru Bantu, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Tidak Tetap. Penggolongan inilah yang mengakibatkan ada perbedaan pendapatan, tunjangan, dan fasilitas yang diterima oleh guru.

Menurut Akuntano (Jum'at (25/11/2011) : Kompas.com) menjelaskan kesenjangan pendapat dilihat dari penghasilan yang diterima oleh guru PNS bisa mencapai Rp6 juta per bulan. Sementara

itu, fasilitas lain yang diterima oleh para guru PNS adalah tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lainnya.

Berbanding terbalik yang diterima oleh guru honorer. Guru tidak tetap (honorer) hanya mendapatkan honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya bervariasi, mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan. Tidak hanya itu, guru honorer sulit memperoleh kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi.

Z. Budaya Mencontek

Pendidikan di Indonesia yang hanya menilai dari hasil akhir tanpa peduli prosesnya membuat peserta didik menginginkan hasil akhir yang sebesar-besarnya. Hal ini membuat peserta didik mau melakukan apapun demi mendapatkan nilai yang tinggi, salah satunya yaitu dengan mencontek, baik membawa contekan maupun melihat jawaban teman.

Menurut Masada dan Rahmiati (2016 : 228) mengatakan bahwa kegiatan memanipulasi dan aksi berbuat curang serta membodohi diri sendiri dilakukan ketika guru melakukan evaluasi, ujian, dan ulangan mulai diadakan.

Jika kegiatan budaya mencontek bagi peserta didik terus berlanjut maka hal tersebut akan berdampak pada kehidupannya. Artinya, berbuat curang dengan cara meniru sesuatu dari tingkat sekolah dasar, hingga lanjut ke perguruan tinggi, bahkan bila sudah dianggap biasa dan menjadi jalan pintas untuk mendapat sesuatu tanpa harus bekerja. Hal ini berakibat pada hilangnya kegiatan berpikir kreatif yang berguna dan kesadaran diri atas baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan. Nilai moral bagi peserta didik sudah tidak berlaku lagi.

AA. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan seperti (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Contohnya, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah, dalam hal ini prestasi siswa Indonesia jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga terdekat.

Anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai materi bacaan dan sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin terjadi karena siswa Indonesia sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

BB. Kasus Bullying di Kalangan Peserta Didik

Kasus bullying biasa dilakukan senior terhadap junior (kakak kelas terhadap adik kelas) ataupun terhadap teman sejawat. Biasanya bullying hanya dilakukan sebagai candaan maupun untuk menindas korbannya. Terkadang kasus bullying dianggap wajar dalam pergaulan sehari-hari, namun apabila dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan trauma bagi korbannya.

Menurut Masdin (2013 : 82) menjelaskan bahwa dampak bullying terhadap korban (dalam hal ini peserta didik) berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga dapat menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis para peserta didik.

CC. Tingginya Angka Putus Sekolah

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Menurut Muhammad, Madani, dan Risfaisal (2016 : 184-185) mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan putus sekolah seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, dan karena adanya faktor lingkungan (pergaulan). Pemenuhan hak pendidikan tersebut diperoleh secara formal di sekolah, secara informal melalui keluarga. Khususnya pendidikan formal tidak semua anak mendapatkan haknya karena kondisi-kondisi yang memungkinkan orang tuanya tidak dapat memenuhinya.

Selain itu, angka putus sekolah juga dipengaruhi oleh Program BOS, BSM, dan KIP yang perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah. Pendistribusian yang

lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga penyelewengan dana turut menyelimuti implementasi program tersebut.

DD. Rasio Guru dan Murid

Tak kalah pentingnya dalam permasalahan di bidang pendidikan yang dialami Indonesia adalah banyaknya murid dalam satu kelas. Sementara setiap anak memiliki permasalahan dan karakter yang berbeda-beda, hal inilah yang membuat guru menjadi kewalahan.

Berdasarkan data *Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)*, rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia merupakan yang paling terendah di dunia. Hal itu dipengaruhi perekrutan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan melampaui jumlah pendaftaran murid di segala aspek tingkat pendidikan. Dalam hal ini yang mendapat dampak secara langsung adalah murid, dikarenakan terlalu banyaknya murid yang akan belajar dengan satu guru akan dapat memecahkan konsentrasi anak.

EE. Sistem Seleksi CPNS Tidak Berbasis Kompetensi Bidang Studi

Disinilah mungkin awal mula keterpurukan dunia pendidikan. Seleksi CPNS keguruan sampai saat ini tidak berbasis kompetensi bidang studi, namun dengan sistem generalisasi, semua disamakan. Akibatnya peluang CPNS Keguruan yang lolos bukan berdasarkan kompetensinya sangat terbuka.

Menurut Syam dan Bahfiarti (2016 : 336) memaparkan bahwa proses penerimaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia masih sangat buruk dan menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Proses pendaftaran yang rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis, “*superficial*” serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh.

Hal ini mengakibatkan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Sehingga, masalah tersebut dapat berakibat fatal bagi peserta didik apabila guru tersebut tidak dapat menguasai dengan baik bidang studi yang akan dijalankan.

FF. Evaluasi Pemahaman

1. Berikan satu permasalahan pendidikan yang ada di daerah Anda!
2. Berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut!
3. Sebutkan kurikulum apa saja yang diterapkan di Indonesia!
4. Bagaimana menurut Anda tentang permasalahan pendidikan yang saat ini kita hadapi selama pandemi COVID-19?
5. Bagaimana kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia?

X

BERBAGAI PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS PERMASALAHAN PENDIDIKAN

A. Pendekatan Analisis Permasalahan Pendidikan

Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam analisis permasalahan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Istilah yang digunakan oleh Cohn mengenai pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu State of Art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan adalah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan.

Dunn menambahkan satu pendekatan lagi sejalan dengan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan evaluatif, yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program.

Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah terletak pada penggunaan kriteria. Pendekatan deskriptif menekankan atau pendekatan positif dimaksudkan untuk menerangkan suatu gejala dalam keadaan tidak adanya kriteria, sebaliknya pendekatan evaluatif dimaksudkan untuk menerapkan kriteria atas terjadinya gejala tersebut. Contoh, meningkatnya mutu pendidikan ialah suatu gejala yang dipersepsikan setelah diadakan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian pendekatan evaluatif menekankan pada pengukuran

sedangkan pendekatan deskriptif lebih menekankan pada penafsiran terjadinya gejala yang bersangkutan.

Dalam analisis kebijakan, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pemakai informasi, khususnya para pengambil keputusan, sebagai bahan masukan bagi proses pengambilan keputusan, baik berbentuk indikator kualitatif atau indikator kuantitatif agar para pengambil keputusan dapat membuat kesimpulan sendiri tanpa bantuan dari analisis kebijakan. Dari pemahaman itu, diharapkan para pengambil keputusan dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan keadaan dan masalahnya itu sendiri. Bahkan dalam keadaan yang mendesak, biasanya para pengambil keputusan lebih tertarik dengan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari satuan-satuan informasi daripada satuan informasinya itu sendiri. Namun, para analis kebijakan menyediakan kedua-duanya, baik dalam bentuk sajian satuan-satuan informasi maupun kesimpulannya.

2) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau "resep" yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Dengan norma tersebut diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan.

Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan suatu kebijakan. Informasi yang normatif atau preskriptif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesuai, baik dengan argumentasi teoritis maupun data dan informasi.

Informasi yang bersifat normatif ini oleh Penelaah Sektor Pendidikan Balitbang-Depdikbud 1986 disebut informasi teknis, karena merupakan hasil analisis data berdasarkan informasi yang berkaitan dengan suatu isu kebijakan yang sedang atau ingin disoroti (Soetjipto, 1997: 22).

Pendekatan deskriptif dan normatif ini hanyalah merupakan sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Para ahli seperti Patton dan Sawicki, 1986; Stokey and Zeckhauser, 1985 menyatakan bahwa analisis kebijakan hanya meliputi dimensi rasional. Dunn (1981) berpendapat bahwa analisis kebijakan meliputi seluruh dimensi rasional maupun politik (Suryadi dan Tilaar, 1994: 48). Namun, sepanjang analisis kebijakan juga menggunakan pendekatan normatif maka keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pengambilan keputusan merupakan subyek yang perlu dipelajari dalam analisis kebijakan. Suatu masalah kebijakan publik, seperti pendidikan dapat dipandang secara multidisipliner, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, proses politik dari analisis kebijakan merupakan proses yang diteliti di dalam analisis kebijakan pendidikan.

3) Pendekatan Sistem

Berkembangnya ilmu teknologi yang begitu pesat dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang positif maupun negatif. Tak jarang perubahan negatif menimbulkan masalah tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan masalahnya pun tak hanya dari satu sudut pandang saja, berbagai disiplin ilmu yang kompleks sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, pendekatan sistem dapat memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat untuk memberi kerangka berpikir memecahkan masalah secara menyeluruh dan terpadu, baik dalam dunia pendidikan maupun kehidupan masyarakat yang lain.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan, karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendekatan sistem didefinisikan sebagai gabungan-gabungan dari elemen-elemen. Elemen tersebut mencakup objek, manusia, informasi, dan lain sebagainya yang dihubungkan oleh suatu proses dan berfungsi sebagai kesatuan organisatoris dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pendekatan sistem digunakan untuk menganalisis keadaan, baik keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang.

a) Konsep sistem

Sesuatu dapat dinamakan sistem bila terjadi hubungan atau interelasi dan interdependensi baik internal maupun eksternal antar subsistem. Interaksi, interelasi, dan interdependensi itu disebut hubungan internal. Bila interaksi, interelasi, dan interdependensi itu terjadi antar sistem, hubungan itu disebut hubungan eksternal.

Pada dasarnya sistem terdiri atas dua jenis, yaitu sistem tertutup dan terbuka. Salah satu konsep yang penting dipahami dalam membicarakan konsep sistem adalah konsep entropi. Salah satu konsep yang erat kaitannya dengan entropi adalah konsep keseimbangan dinamik (Van Gigch, 1974). Di dalam suatu sistem yang tertutup, sistem bergerak menuju ke suatu sistem yang bersifat entropi. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka terjadi kecenderungan dan gerakan yang mengarah pada diferensiasi yang makin lama makin luas.

b) Analisis sistem

Analisis sistem hanyalah merupakan suatu teknik pengambilan keputusan dan bukan merupakan pengganti pengambilan keputusan. Menurut pendapat Enthoven yang dikutip Suriasumantri (1977) adalah bahwa analisis sistem merupakan pendekatan yang rasional terhadap permasalahan yang bersifat kompleks dan penuh ketidakpastian. Suriasumantri (1977) menegaskan bahwa analisis sistem lebih ditujukan kepada upaya pencarian kebenaran yang dapat diterima oleh para pengambil keputusan, dimana kebenaran obyektif bukan satu-satunya tujuan dalam pengkajian analisis sistem, melainkan metode untuk mencari konsensus. Dengan meminjam pendapat Wight, Suriasumantri (1981) mengemukakan bahwa analisis sistem merupakan kegiatan intelektual yang paling demokratis dengan bersedia menggunakan metode apa saja yang berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat.

Langkah-langkah dalam sistem analisis bersifat sistematis, analitis, rasional, dan tersurat. Pada tahap-tahap tertentu dalam sistem analisis penelitian ilmiah bisa membantu analisis dengan memberikan

masukan yang kemudian digunakan sebagai premis atau fakta bagi analisis selanjutnya.

Tentu saja sifat sistemik, rasional, analitis, dan tersurat berdasarkan kepada data atau informasi yang objektif tetap merupakan kerangka dasar pengkajian sistem analisis, tetapi hal ini dilakukan dengan semangat kerjasama dan demokratis yang merupakan jiwa dari pengambilan keputusan dalam organisasi yang modern.

c) Desain sistem

Desain sistem adalah tahapan berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah sistem.

Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama, yaitu:

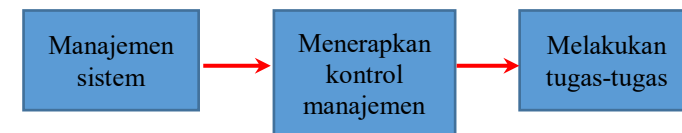
- a. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tujuannya lebih condong pada desain sistem yang terinci, yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap yang nantinya digunakan untuk pembuatan program komputernya.

Menurut Tavri D. Mahyuzir dalam bukunya Pengolahan Data menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pada proses desain sistem adalah:

- Menganalisa masalah dari pemakai (user)
- Studi kelayakan
- Detail desain
- Penerapan
- Pemeliharaan dan evaluasi

d) Manajemen sistem

Kegiatan selanjutnya dalam pendekatan sistem adalah sistem manajemen. Manajemen sistem merupakan kegiatan yang menuntut minat dan perhatian besar dari administrator sekolah.



Gambar 46 : Alur manajemen sistem

Kita melaksanakan kontrol manajemen dengan menyisipkan detektor ke dalam sistem pada bagian-bagian penting yang memberi informasi tentang bagaimana sistem-sistem itu berfungsi dibanding

dengan standar kriteria. Jika kita ingin mengetahui kemajuan siswa dihubungkan dengan tujuan performance, detektornya adalah tes kriteria.

Kebanyakan pendekatan sistem menunjuk evaluasi sebagai sebuah fungsi terpisah. Adanya kepercayaan yang kuat bahwa evaluasi itu terjadi selama semua komponen berfungsi dan harus dilaksanakan sebelum operasi dimulai.

Kendala-kendala kontrol manajemen berarti segala sesuatu yang mempengaruhi umpan balik informasi yang bagus, evaluasi yang akurat, atau efektivitas koreksi penyimpangan sistem. Keabsahan dan kepercayaan detektor dan evaluator di sini merupakan hal yang sangat penting. Keabsahan adalah tingkat kepada bagaimana kita memantau performance yang diarahkan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Kepercayaan adalah tingkat kepada bagaimana alat-alat pemantauan kita konsisten dengan laporan mereka.

e) Aplikasi Pendekatan Sistem untuk Pengembangan Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, Pancasila merupakan prinsip-prinsip yang terpuji yang menjadi arah tujuan-tujuan kemasyarakatan. Tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Sumber-sumber yang terbatas harus dialokasikan secara berencana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disusun menurut skala prioritas tertentu. Perencanaan yang sistematis merupakan suatu harapan dari setiap masyarakat, tetapi merupakan hal yang sangat sulit karena memiliki sumber-sumber yang sangat terbatas. Penyusunan rencana terdiri atas tindakan yang spesifik.

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya sangat kompleks, seperti ditunjukkan dengan elemen seperti di bawah ini:

1. Masalah dan kebutuhan
2. Tujuan
3. Sumber dan kendala
4. Alternatif-alternatif
5. Masukan bagi pengambil keputusan
6. Keputusan
7. Rencana Implementasi

Contoh menganalisis masalah pendidikan melalui pendekatan sistem:

Banyak anak yang tidak bisa sekolah karena kendala biaya, mereka rela bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari daripada sekolah. Proses belajar akan berlangsung seumur hidup, akan

tetapi marilah kita mulai dengan wajib belajar 12 tahun, kesuksesan kelak berawal dari kesadaran diri kita sekarang.

Langkah-langkah yang diambil secara garis besar adalah:

- 1) Mendefinisikan masalah
- 2) Mengumpulkan data
- 3) Identifikasi alternatif solusi
- 4) Pemilihan alternatif terbaik
- 5) Implementasikan solusi dan tindak lanjut
- 6) Evaluasi

Wajib belajar 12 tahun dikatakan sebagai suatu sistem maksudnya adalah merupakan seperangkat komponen atau unsur-unsur atau sub sistem yang saling berinteraksi antara satu dengan lain yang tujuannya untuk memfasilitasi siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Program ini juga sebagai bentuk kesinambungan dan konsekuensi pemerintah dari program wajib belajar 9 tahun.

"Beberapa studi juga menunjukkan bahwa proses demokrasi bisa berjalan dengan baik ketika didukung oleh tingkat pendidikan masyarakatnya dan wajib belajar 12 tahun menjadi penting karena memiliki hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"

Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas, tentu saja hal ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem yang berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar.

Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran perlu dirancang dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, penetapan media evaluasi pembelajaran. Prinsipnya adalah berorientasi pada peserta didik yang artinya adalah dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi dari peserta didik.

Prinsip pemanfaatan sumber belajar berarti dalam pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu kegiatan pendidikan adalah bagaimana peserta didik dapat belajar, dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Dengan demikian upaya

pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah dengan mendayagunakan sumber belajar.

4) Pendekatan Analisis Nilai (Values Analysis Approach)

Pendekatan analisis nilai adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemikiran logis dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi, sosial, atau politik.

Zakaria (2001) menegaskan bahwa, pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya adalah pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial, sedangkan pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan.

Wibowo (2001) mengemukakan bahwa pendekatan analisis nilai memungkinkan siswa menggunakan berpikir logis dan penalaran ilmiah untuk dapat memecahkan konflik moral yang ada kaitannya dengan isu-isu pribadi, sosial, ataupun politik. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendekatan analisis nilai juga membantu siswa untuk menggunakan proses rasional analitik dalam mengintegrasikan dan mengonseptualisasi nilai-nilai mereka.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendekatan analisis nilai merupakan suatu pendekatan dengan siswa yang menekankan berpikir logis, untuk menilai, menganalisis isu-isu pribadi, sosial, ataupun politik sehingga dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah sosial.

Menurutnya, dalam *pendekatan analisis nilai terdapat dua tujuan utama pendidikan* yaitu:

- a. Membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu.
- b. Membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka.

Selanjutnya, metode-metode pengajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional (**Superka, dkk, 1976**).

Dalam pendekatan analisis nilai ini terdapat enam langkah analisis nilai yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses pendidikan nilai menurut pendekatan nilai (**Hersh, et. al., 1980; Elias, 1989**). Enam langkah tersebut menjadi dasar dan sejajar dengan enam tugas penyelesaian masalah berhubungan dengan nilai, sebagai berikut:

a) **Langkah analisis nilai:**

- Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait
- Mengumpulkan fakta yang berhubungan
- Menguji kebenaran fakta yang berkaitan
- Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan
- Merumuskan keputusan moral sementara
- Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan

b) **Tugas penyelesaian masalah:**

- Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait
- Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan
- Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang berkaitan
- Mengurangi perbedaan tentang kaitan antara fakta yang bersangkutan
- Mengurangi perbedaan dalam rumusan keputusan sementara
- Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima

Selanjutnya, pendekatan pengungkapan nilai ini akan membantu siswa untuk menyadari identitas dan nilai-nilai yang dimiliki serta yang dimiliki orang lain. Pendekatan ini juga memungkinkan siswa berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Pendekatan penanaman nilai membantu siswa untuk mempertahankan nilai-nilai yang diinginkan.

5) Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, maupun pendidikan.

Penggunaan jasa ini ditunjukkan agar konsep dan praktik pendidikan dapat dirumuskan dengan komprehensif dan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pernyataan tersebut didasarkan pada dua asumsi berikut ini:

a) **Kepentingan masyarakat**

Pendidikan adalah pemindahan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan dari generasi tua pada generasi muda untuk melanjutkan dan memelihara identitas masyarakat itu. Dalam pemindahan tersebut,

psikologi memegang peranan yang sangat penting, karena dahulu, orang menyangka bahwa mengajar itu sebenarnya hanya memindahkan isi kepala seorang guru ke dalam kepala murid. Atau dengan kata lain, bahwa belajar itu sebenarnya hanya memindahkan isi dalam sebuah keranjang ke keranjang yang lainnya. Namun, kajian-kajian dalam psikologi terutama dalam memindahkan pengetahuan, apalagi nilai-nilai dari seseorang pada orang lain, dari satu generasi pada generasi lain, tidak sesederhana itu. Dalam proses belajar mengajar, seorang murid harus aktif, ada respon, dan ada bentuk perubahan. Proses-proses tersebut, juga membutuhkan bantuan psikologi.

b) Kepentingan individu

Dari sudut pandang individu, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya pengembangan potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu bagaikan lautan yang dalam yang memiliki banyak keindahan, namun tidak tampak dari permukaan dan perlu digali supaya keindahannya dapat dimanfaatkan. Begitu juga manusia, manusia memiliki banyak sekali bakat dan kemampuan yang beraneka ragam yang kalau dipergunakan dengan baik, maka akan bisa mengubah batu menjadi emas, alias menjadi kekayaan yang berlimpah ruah. Untuk dapat menggali, mengembangkan, dan memberdayakan kemampuan individu itu, maka pendidikan memiliki peranan yang sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa baik dari segi kepentingan masyarakat maupun individu, keduanya sangat berkaitan erat dengan pemahaman yang tepat terhadap manusia yang memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Sehingga, psikologi sangat berperan dalam membantu memperjelas manusia sebagai subjek maupun objek pendidikan.

6) Pendekatan Spekulatif

Pendekatan secara spekulatif disebut juga sebagai cara pendekatan reflektif yang berarti memikirkan, mempertimbangkan, membayangkan, dan menggambarkan. Ini adalah teknik pendekatan dalam filsafat pada umumnya. Tujuan dari teknik pendekatan ini adalah memikirkan, mempertimbangkan, dan menggambarkan tentang suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Masalah-masalah kependidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikat yang sebenarnya. Untuk melaksanakan fungsi spekulatif ini maka filsafat pendidikan berusaha:

a) Menarik kesimpulan atau merangkum dari berbagai persoalan pendidikan ke dalam suatu gambaran pokok atau Aksioma melalui proses abstrak dan generalisasi.

b) Memahami persoalan pendidikan secara keseluruhan dan dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dunia pendidikan.

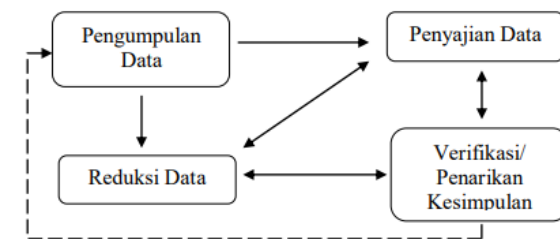
B. Model Analisis Permasalahan Pendidikan

Ada beberapa model analisis permasalahan pendidikan, berikut ini adalah 3 model untuk menganalisis data kualitatif, yaitu:

1) Model Analisis Interaktif (Interactive Model)

Miles dan Huberman (1987) menganjurkan model analisis interaktif (interactive model) yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu:

- pengumpulan data
- penyederhanaan data
- pemaparan data
- penarikan dan pengajuan simpulan.



Gambar 47: Model analisis interaktif

2) Model Analisis Spradley/Studi Etnografi

Model ini menggambarkan bahwa proses penelitian itu mengikuti suatu lingkaran dan lebih dikenal dengan proses penelitian Siklikal.

Jika seorang peneliti mengikuti model ini maka berturut-turut ia melaksanakan pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan analisa tema. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan secara silih berganti antara pengumpulan data dengan analisis data sampai akhirnya keseluruhan masalah penelitian itu terjawab. Karena penelitian ini menggunakan langkah-langkah naturalistik, maka analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data. Analisa data menurut model ini memanfaatkan adanya apa yang dinamakan hubungan semantik. Adapun hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

HUBUNGAN BENTUK CONTOH-CONTOH

- 1) Termasuk X adalah termasuk Y saksi ahli (adalah sebagai) saksi
- 2) Special X adalah satu tempat di Y ruang juri agung (adalah tempat) di pengadilan negeri
- 3) Sebab akibat X adalah hasil Y melayani juri agung (adalah hasil dari) atau karena terpilih
- 4) Rasional X adalah alasan melakukan Y
Sejumlah besar kasus adalah merupakan alasan menggelar pengadilan secara cepat
- 5) Lokasi— X adalah tempat melakukan Y ruang juri agung (adalah tempat duduk tempat— untuk) mendengarkan kasus-kasus
- 6) Fungsi X digunakan untuk Y saksi (digunakan untuk) menyajikan bukti
- 7) Alat-tujuan X adalah cara melakukan Y Bersumpah (adalah cara untuk) melambangkan tugas suci juri
- 8) Urutan X adalah langkah-langkah mengunjungi penjara (adalah tingkat melakukan Y dalam) kegiatan juri agung
- 9) Memberi X adalah pemberian atribut Otoritas (adalah atribut dari) jaksa (ciri-ciri) atribut dari Y

Model analisis etnografis dalam penelitian kualitatif menurut Spradley, yaitu:

- **analisis domain (domain analysis)**

Analisis domain dimaksudkan untuk memperoleh pengertian umum dan relatif menyeluruh mengenai pokok permasalahan. Hasil analisis ini berupa pengetahuan tingkat “permulaan” tentang berbagai ranah atau kategori konseptual secara umum pula.

Analisis domain merupakan penyelidikan unit-unit terhadap pengetahuan budaya yang lebih besar yang disebut domain. Di sini peneliti akan mencari simbol-simbol budaya yang termasuk kategori (domain) yang lebih besar berdasar atas kemiripan. Jadi, analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti.

Ada enam tahap yang dilakukan dalam analisis domain yaitu:

- a) Memilih salah satu hubungan semantik untuk memulai dari sembilan hubungan semantik yang tersedia
- b) Menyiapkan lembar analisis domain
- c) Memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir, untuk memulainya
- d) Mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan

- e) Mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan semantik habis
- f) Membuat daftar domain yang ditemukan (teridentifikasi)

- **analisis taksonomi (taxonomic analysis)**

Pada analisis taksonomik, pusat perhatian ditentukan terbatas pada ranah yang sangat berguna dalam memaparkan gejala-gejala yang menjadi sasaran penelitian. Analisis taksonomik tidak saja berdasarkan data lapangan, tetapi juga berdasarkan hasil kajian pustaka. Beberapa ranah yang sangat penting dipilih dan dijadikan pusat perhatian untuk diselidiki secara mendalam.

Analisis taksonomik meliputi pencarian struktur internal domain serta membentuk identifikasi susunan yang bertentangan. Setelah selesai analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Hasil terpilih untuk memperdalam data telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Dari hasil wawancara terpilih, dimuat dalam catatan lapangan yang terdapat di buku lampiran.

Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Tahap ini diperlukan analisis taksonomik. Analisis taksonomik adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Tujuh langkah yang dilakukan dalam analisis taksonomik yaitu:

- a) Memilih salah satu domain untuk dianalisis
- b) Mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama yang digunakan untuk domain itu
- c) Mencari tambahan istilah bagian
- d) Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis
- e) Membentuk taksonomi sementara
- f) Mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan
- g) Membangun taksonomi secara lengkap

- **analisis komponensial (componential analysis)**

Analisis komponensial dilakukan untuk mengorganisasikan perbedaan (kontras) antar-unsur dalam ranah yang diperoleh melalui pengamatan dan atau wawancara terseleksi.

Analisis komponensial merupakan pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam sebuah domain. Dalam analisis komponensial, peneliti mencari ciri spesifik

pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Berbeda dengan kedua analisis tersebut, analisis komponensial tidak mengorganisasikan kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan atau wawancara terseleksi. Masing-masing warga dari suatu domain sesungguhnya mempunyai atribut/karakteristik tertentu yang diasosiasikan dengannya.

Atribut itulah yang membedakan satu dari yang lain. Analisis ini biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup suatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Ada delapan langkah dalam analisis komponen ini yaitu:

- a) Memilih domain yang akan dianalisis
- b) Mengidentifikasi seluruh kontrol yang telah ditemukan
- c) Menyiapkan lembar paradigma
- d) Mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua nilai
- e) Menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
- f) Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada
- g) Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
- h) Menyiapkan paradigma lengkap

- **analisis tematik (thematic analysis)**

Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi. Beberapa sub-topik disusun secara deduktif dengan mendahulukan kaidah-kaidah pokok yang diikuti dengan kasus dan contoh-contoh. Sub-topik selebihnya disajikan secara induktif dengan memaparkan kasus dan contoh untuk ditarik kesimpulan umumnya.

Analisis tematik mencari hubungan di antara domain dan bagaimana domain itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan (Spradley, 1997). Analisis tematik atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanapiah Faisal, 1990).

Tujuh cara untuk menemukan tema yaitu:

- a) Melebur diri
- b) Melakukan analisis komponensial terhadap istilah acuan
- c) Menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain dalam pandangan budaya
- d) Menguji dimensi kontras seluruh domain yang telah dianalisis
- e) Mengidentifikasi domain terorganisir
- f) Membuat gambar untuk memvisualisasi hubungan antar domain

- g) Mencari tema universal

3) **Model Analisis Strauss dan Corbin**

Cara atau model ketiga disarankan oleh Strauss dan Corbin (1990) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- open coding
- axial coding
- selective coding
- the generation of a conditional matrix.

Pada tahap ini peneliti melakukan simpulan kajian yang meliputi kegiatan penafsiran dan penyatupaduan (*interpreting and integrating*) temuan ke dalam bangunan pengetahuan sebelumnya.

Pada tahap ini peneliti menulis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian, bisa dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Temuan penelitian disebarluaskan ke khalayak akademik untuk memperoleh masukan dan memberikan sumbangan bagi kemaslahatan umum. Dari temuan penelitian, kegiatan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan.

C. **Evaluasi Pemahaman**

1. Jelaskan pengertian dari pendekatan deskriptif!
2. Apa tujuan dilakukannya pendekatan normatif?
3. Apa tujuan analisis sistem menurut Suriasumantri?
4. Jelaskan pendekatan analisis nilai!
5. Sebutkan dan jelaskan model analisis etnografis dalam penelitian kualitatif menurut Spradley!

XI

PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN POLITIK KAJIAN REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Politik

Kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *polis* yang memiliki arti sebagai kota negara (*city state*). Pada masanya, Aristoteles menyebut politik sebagai *zoon politicon* yang dalam perkembangannya menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (yang berhubungan dengan negara), *politika* (pemerintahan negara), serta *politikos* (kewarganegaraan). Plato menganggap bahwa politik merupakan bentuk suatu usaha agar dapat mencapai sebuah masyarakat politik yang baik.

Miriam Budiardjo menambahkan bahwa politik sebagai bermacam kegiatan di dalam sistem politik yang merupakan proses penentuan tujuan dari sistem tersebut sekaligus melaksanakannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik sebagai segala urusan yang berkenaan dengan negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik dalam menentukan tujuan dari sistem tersebut serta berbagai cara dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati tersebut.

Tujuan-tujuan dari politik itu sendiri di Indonesia, secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bertujuan agar kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola dan diterapkan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
- b. Dapat menciptakan kekuasaan yang demokratis dalam masyarakat atau pemerintah.
- c. Membantu penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan masyarakat berdasar atas prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Guna mensejahterakan semua lapisan masyarakat Indonesia

- e. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin pelaksanaan semua kewajiban warga negara.
- f. Menjaga keamanan dan perdamaian negara.
- g. Menjamin keseimbangan kehidupan sosial bagi kemajuan bangsa.

Menurut Prof. Sri Sumantri, sistem politik adalah suatu pelebagaan hubungan antar manusia yang berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik. Dimana suprastruktur politik terdiri atas lembaga legislatif negara, lembaga eksekutif negara, dan lembaga yudikatif negara. Infrastruktur politik merupakan lima komponen pendukung, yaitu tokoh politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, juga alat komunikasi politik.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis umum sistem politik yang dikenal dan digunakan, diantaranya:

1. Sistem Politik Liberal
2. Sistem Politik fasisme
3. Sistem Politik Komunisme
4. Sistem Politik Monarki
5. Sistem Politik Totaliteralisme
6. Sistem Politik Oligarki
7. Sistem Politik Demokrasi

Selain tersebut di atas, masih ada beberapa jenis lain yang digunakan di negara-negara lain. Banyaknya jenis sistem politik yang ada dikarenakan setiap negara-negara di dunia memiliki sistem politik yang berlaku berbeda satu dengan yang lainnya.

Di Indonesia, sistem politik yang berlaku menggunakan sistem politik demokrasi. Hal ini dikarenakan berdasarkan oleh tujuan yang ingin dicapai di Indonesia, sistem politik demokrasi inilah yang dirasa tepat dan mampu membantu merealisasikan tujuan negara dengan baik dan tepat. Sistem politik demokrasi ini memberikan kesempatan dan kebebasan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat serta aspirasi mereka sebagai perwujudan kontribusi dan keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan politik negara.

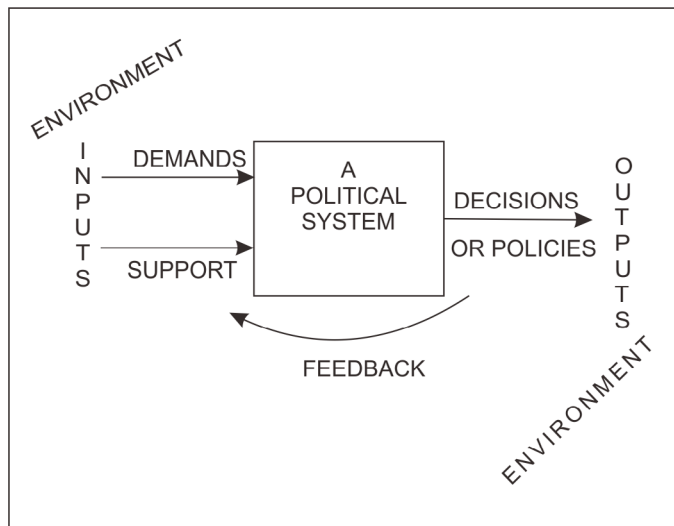
A. Pengertian Kebijakan Politik

Setelah mengerti apa itu politik, kita dapat memahami apa itu kebijakan politik. Yang dimaksud dengan kebijakan politik adalah segala sesuatu yang merupakan hasil keputusan baik dalam sebuah sistem politik yang selalu berhubungan dengan setiap keputusan-keputusan pemerintah. Setiap keputusan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-

instrumen pemerintah. Instrumen tersebut dapat berbentuk hukum, pelayanan, pajak dan anggaran-anggaran. Dengan arahan-arahan yang bersifat otoritatif dalam pelaksanaan tindakan-tindakan pemerintah dalam lingkup yurisdiksi nasional, regional, municipal maupun lokal. Kebijakan politik tidak dapat diartikan terlepas dari pengertian tentang kebijakan publik. Kebijakan politik dapat sebagai bagian dari kebijakan publik. Thomas Dye mengartikan kebijakan publik sebagai segala pilihan pemerintah terhadap apa yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan James E. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Subarsono, 2005). Dengan demikian, kebijakan publik merupakan apa yang diputuskan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu.

Dengan kaitannya terhadap bidang politik, kebijakan yang diputuskan mengandung unsur-unsur kepentingan politik di dalamnya. David Easton (Suharno, 2010) dalam *Political System* menjelaskan bahwa perumusan kebijakan dalam model sistem politik didasarkan kepada konsep-konsep teori informasi serta memandang kebijakan publik sebagai suatu bentuk respon oleh sistem politik atas pengaruh-pengaruh luar di sekitarnya. Informasi yang dimaksudkan disini dapat berupa *inputs*, *withinputs*, maupun *feedback* terhadap suatu permasalahan. Berbagai bentuk pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan, diantaranya yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan lain-lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kebijakan publik yang merupakan sebuah hasil (*outputs*) atas respon dari suatu sistem politik merupakan hasil akhir dari proses sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat dimana proses mengubah masukan (*inputs*), baik itu berupa tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan (*supports*) dan berbagai sumber (*resources*) untuk dijadikan sebagai keputusan atau kebijakan otoritatif (*outputs*) bagi seluruh anggota masyarakat.



Gambar 48; Model Sistem Politik menurut David Easton

B. Hubungan Pendidikan dan Politik

Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang dinamis. Keduanya saling mempengaruhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, berbagai aspek pendidikan mengandung unsur-unsur politik. Hal yang sebaliknya juga terjadi, dimana segala aktivitas politik selalu melibatkan aspek-aspek kependidikan. Meskipun pada realitasnya, kegelisahan dan keserasahan tumbuh untuk mengurangi keterlibatan politik di dalam pendidikan. Keinginan untuk mengurangi dan mengikis elemen politik dan memisahkannya menjadi dua wilayah terpisah. Hal ini berkaitan dengan harapan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari genggaman berbagai kepentingan politik para penguasa.

Pendidikan berkaitan dengan proses penyampaian ilmu pengetahuan dan budaya, juga mengenai perkembangan keterampilan dan pelatihan. Sedangkan politik berkecimpung dalam praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas, sekaligus keputusan-keputusan otoritatif berkaitan dengan alokasi nilai-nilai dan sumberdaya. Keduanya memiliki kesamaan dalam aspek proses alokasi dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat. Sehingga akan sedikit tidak mungkin untuk memisahkan pendidikan dan politik secara jelas.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam mengembangkan potensi manusiawi para peserta didik. Baik itu berupa

potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsa di mana potensi tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam hidup. Karena dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal, pendidikan memiliki tujuan mulia dengan menyiapkan pribadi yang seimbang, organis, harmonis, dan dinamis dalam mencapai tujuan hidup.

Semakin tinggi kesempatan tiap warga individu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, meningkatkan kesempatan mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik di dalam masyarakat. Hal ini menegaskan kembali bahwa budaya politik seseorang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh individu tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang individu, maka semakin besar individu tersebut mengerti sekaligus terlibat dalam sistem politik dalam masyarakat. Kunci utama dalam pendidikan politik masyarakat terletak pada politik pendidikan masyarakat itu sendiri.

Pola Hubungan Politik dan Pendidikan

Hubungan antara politik dan pendidikan yang dinamis telah mencapai tingkatan yang tidak dapat dipisahkan, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat berkembang. Hubungan politik dan pendidikan bermanifestasi dalam aspek-aspek bermasyarakat, yang diantaranya adalah tercermin dari tiga hal utama, yaitu: sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*unemployment*), serta peran politik para cendekia (*political role of the intelligentsia*).



Gambar 49 : Relasi Politik dan Pendidikan

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kehidupan bermasyarakat, pola hubungan antara politik dan pendidikan juga tentu saja mengalami perubahan pula. Hal ini dikarenakan dengan semakin

maju pendidikan dan kehidupan bermasyarakat, semakin tinggi pula tingkat pola hubungan antara politik dan pendidikan dalam suatu masyarakat.

Sesuai perkembangannya, pola hubungan antara politik dan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Pola dalam masyarakat primitif

Dalam masyarakat primitif, kehidupan bermasyarakat pada masa primitif masih sangat sederhana dan belum ditemukan sebuah tujuan politik yang kompleks. Dalam tipe masyarakat ini, pendidikan berada di bawah kendali keluarga dan ditangani langsung oleh orang tua. Orangtua disini berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pendidik utama.

2. Pola dalam masyarakat berkembang

Perkembangan zaman berdampak terhadap perubahan masyarakat yang semula sederhana menjadi lebih maju dan berkembang. Pada tahap ini, pola hubungan politik dan pendidikan juga ikut mengalami perubahan menyesuaikan tuntutan dalam masyarakat. Pola hubungan yang awalnya sederhana menjadi lebih modern, dimana politik dan pendidikan menjadi sentral figur dalam menentukan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

3. Pola dalam masyarakat modern

Pada masyarakat modern, politik dan pendidikan sudah bukan lagi dua hal yang terpisah dan hanya bersinggungan saja. Pada pola ini, hubungan politik dan pendidikan berubah dimana pendidikan menjadi sebuah peluang komoditi bagi kegiatan politik masyarakat.



Gambar 50 : Perubahan Pola Hubungan antara Politik dan Pendidikan

C. Pendidikan dan Kebijakan Politik Era Reformasi

Masa Reformasi membuka peluang dan ruang bagi perumusan kebijakan pendidikan yang baru yang mengusung semangat reformatif dan revolusioner. Banyak perubahan dan pengembangan yang dilakukan terhadap berbagai aspek dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari perubahan bentuk pelaksanaan pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik hingga kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 dalam pengaturan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Pada tahun 1999 melalui UU No 22 Tahun 1999, pemerintah memperkenalkan “Manajemen Berbasis Kompetensi” dan membuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” untuk mengimbangi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan adanya keputusan tentang anggaran pendidikan yang ditetapkan 20% dari APBN dan APBD, reformasi dalam dunia pendidikan yang berhubungan dengan pemberian dana bantuan pendidikan seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun serta peningkatan standar penghasilan Guru, program sertifikasi guru, bantuan pendidikan (beasiswa) dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan sebagainya menjadi salah satu hasil nyata dari reformasi pendidikan. Meski sudah banyak kelonggaran, ternyata masih banyak potensi penyelewengan melalui dalih demokratisasi dan desentralisasi.

Hal ini semakin memperjelas keterpurukan masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan tinggi. Berbagai permasalahan pun mulai muncul satu demi satu. Sebagai contoh, implementasi kebijakan pendidikan demokratis dan mengedepankan potensi daerah, sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam dunia pendidikan hingga banyaknya bentuk penyimpangan dalam proses pendidikan sudah menjadi sejarah kelam dunia pendidikan di Indonesia pada era reformasi.

D. Permasalahan Kebijakan Politik Bidang Pendidikan

Berbagai kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, mulai dari penerapan kurikulum yang terus berganti hingga pelaksanaan Ujian Nasional. Berbagai permasalahan tersebut dapat dilihat dalam berbagai refleksi berikut:

a. Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang menjadi target desentralisasi menjadikan pendidikan terutama pada tingkat TK hingga SMA menjadi tanggungjawab urusan kabupaten/kota. Sementara pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Permasalahan seperti kepentingan urusan guru yang sarat dengan banyaknya kepentingan politik maupun ekonomi yang campur aduk di dalamnya dikarenakan banyaknya jumlah guru yang tersedia. Hingga saling lempar tanggung jawab dalam pembangunan gedung sekolah antara pemerintah pusat dan daerah yang disebabkan oleh besarnya dana pembangunan yang dibutuhkan.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Bagi pendidikan tinggi dan menengah, KTSP merupakan sebuah angin segar bagi dunia pendidikan, karena pelaksanaannya yang disusun dan dilaksanakan oleh oleh masing-masing satuan pendidikan. Meskipun terdapat kelonggaran, tiap satuan pendidikan tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh BNSP.

Meski dalam prakteknya, kesempatan ini tetap akan mendapatkan tantangan yang tidak kalah berat. Yaitu kendala dalam jumlah guru dan kepala sekolah dengan kemampuan menyusun kurikulum. Bahkan dapat terjadi kemungkinan bahwa komite sekolah atau orang Kemendikbud belum secara jelas memahami tatacara penyusunan kurikulum yang baik. Hingga tingkat kebingungan dalam menerjemahkan dan melaksanakan KTSP. Kerancuan dan ketidaklogisan KTSP yang dilakukan oleh tiap satuan pendidikan namun tetap saja evaluasi nasional yang tetap dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah Ujian Nasional (UN) yang menentukan kelulusan siswa menjadi sebuah kebingungan masal. Ditambah lagi dengan seringnya pergantian aturan seiring pergantian pemimpin yang baru.

c. Ujian Nasional

Pro dan kontra perlunya Ujian Nasional tidak dapat dihindari. Bagi mereka yang mendukung adanya Ujian Nasional, hal ini dianggap sebagai salah satu sarana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Namun bagi mereka yang menolak keberadaan UN berpendapat bahwa itu hanya akan menambah beban siswa dalam belajar. Yang selalu menjadi perdebatan adalah mengenai peran UN sebagai penentu utama kelulusan siswa. Meskipun pada hakikatnya, UN memiliki peran penting dalam membantu pemetaan kualitas satuan pendidikan secara nasional.

E. Kebijakan Politik Pendidikan Terkini: Merdeka Belajar

a. Pemahaman Definisi Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan Merdeka Belajar ini mengusung esensi akan pentingnya kemerdekaan berpikir, dimana kemerdekaan ini harus terlebih dahulu diprakarsai oleh para guru sebelum mereka mulai mengajarkannya pada para siswa-siswi mereka. Dalam rangka terselenggaranya pembelajaran, maka harus ada suatu proses penerjemahan atas kompetensi dasar serta kurikulum yang ada oleh para guru di berbagai level kompetensi.

Bukan hanya dalam bidang kompetensi, dalam bidang sistem pengajaran juga akan mengalami perubahan. Perubahan suasana dalam pembelajaran menjadi langkah awal dalam menerapkan kebijakan Merdka Belajar ini. Nuansa pembelajaran yang nyaman dengan perubahan tempat belajar yang semula di dalam kelas menjadi *outing class* dirasa akan membawa kebaikan bukan hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi para guru dan tenaga pendidik lainnya.

Kebijakan ini terbit sebagai respon terhadap hasil penelitian dari Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019, yang menyatakan hasil penelitian terhadap para siswa Indonesia dalam bidang matematika dan literasi yang menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi dengan menyesuaikan kondisi dimana proses belajar mengajar berlangsung. Baik itu dari sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun dari segi infrastruktur.

b. Konsep Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Konsep Merdeka belajar didasari oleh keinginan untuk menciptakan suasana belajar nyaman tanpa memberikan beban tersendiri dengan konsep pencapaian skor atau nilai. Untuk mencapai harapan tersebut, disusunlah pokok-pokok kebijakan yang tertuang dalam paparan Mendikbud RI di depan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se Indonesia pada Desember 2019 lalu. Keempat pokok tersebut adalah:



Gambar 51: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1. Ujian Nasional

Dalam kebijakan Merdeka Belajar ini, diputuskan bahwa Ujian Nasional untuk tahun 2020 akan menjadi praktik terakhir. Untuk tahun 2021 kedepan, UN akan digantikan dengan Program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Program Asesmen ini memberikan penekanan terhadap kompetensi penalaran literasi dan numerik menggunakan dasar praktik PISA. Asesmen akan dilakukan pada jenjang pendidikan di kelas 4, 8, dan 11. Harapannya agar hasil dari praktik ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi sekolah dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya.

Hasil ujian tidak untuk digunakan sebagai tolok ukur seleksi siswa ke jenjang studi selanjutnya. Arah kebijakan atas standarisasi ujian akan mengacu kepada level internasional yang mengikuti tolok ukur penilaian dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dengan memasukkan muatan kearifan lokal. Penilaian PISA digunakan dalam melakukan penilaian atas kompetensi di bidang literasi, matematika dan sains. Sedangkan acuan TIMSS menekankan pada kompetensi di bidang kemampuan penilaian matematika dan sains sebagai indikator kualitas pendidikan.

Mendikbud menyebutkan bahwa materi Asesmen Kompetensi Minimum dibagi dalam dua bagian: (1) Literasi; bukan saja kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut; (2) Numerasi; yang merupakan kemampuan menganalisa serta menggunakan angka-angka. Jadi ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten, atau materi. Namun ini didasarkan

kepada kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar, apapun mata pelajarannya.

2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 2, ayat 1; menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

Proses penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ini akan secara penuh diserahkan tanggungjawabnya kepada sekolah. Sekolah memiliki keleluasaan untuk menentukan bentuk dan kriteria penilaian. Sesuai pasal 5, ayat 1, yang menyatakan bahwa; bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirasa cukup dibuat sederhana dan tidak perlu terlalu panjang. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses administrasi. Dengan demikian, waktu guru yang seharusnya tersita untuk melengkapi proses administrasi dapat dialihkan dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kompetensi belajar. Disamping itu, penyusunan RPP: (1) dilakukan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa; (2) komponen inti dari 13 RPP dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*) merupakan kewajiban guru, selebihnya adalah pelengkap; serta (3) keleluasaan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri dalam menjamin keberhasilan belajar siswa.

4. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penyelenggaraan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru akan diperluas (tidak termasuk pada daerah 3T). Bagi para calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, PPDB menawarkan kesempatan yang lebih banyak dengan adanya sistem zonasi ini. Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan teknis dalam menentukan pembagian daerah zonasi.

Sesuai yang tertuang dalam Permendikbud baru Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, dalam pasal 11, persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen).

Setidaknya terdapat dua hal penting yang menjadi perbaikan PPDB 2020: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

c. Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, merupakan langkah awal dalam merealisasikan tujuan pendidikan negara yang bercita-cita menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tanpa meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan yang mampu bersaing dan kompeten. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan lanjutan, yaitu Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang mengatur tentang aspek-aspek pokok dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Tentu saja, sebagai sebuah kebijakan baru, tidak ayal kalau kebijakan Merdeka Belajar ini menemui beberapa rintangan dan tantangan. Beberapa tantangan yang harus ditaklukkan oleh kebijakan Merdeka Belajar ini diantaranya adalah:

1. Pemerataan serta memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran

Berbagai pendekatan yang ada memberikan hasil dalam berbagai bentuk teknik dan inovasi di berbagai daerah serta disetiap sekolah dan siswa. Segala bentuk inovasi tersebut hanya dapat menghasilkan tingkat pencapaian yang maksimal hanya dengan bantuan adanya dukungan dari penerapan teknologi. Dengan kata lain, teknologi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar. Berbagai macam bentuk teknologi yang kita ketahui dan pergunakan sekarang akan menjadi media yang akan kita pergunakan sebaik mungkin dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19 saat ini justru memberikan dorongan akselerasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Keadaan ini telah membantu mengungkap suatu masalah signifikan yang telah terjadi di Indonesia

selama ini. Faktanya adalah terdapat selisih yang besar antara warga negara yang memiliki akses terhadap teknologi dengan mereka yang memiliki keterbatasan bahkan sama sekali tidak memiliki akses terhadap teknologi. Ironisnya, teknologi merupakan sarana penting dalam proses pemerataan akses maupun kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap materi dan pembelajaran yang sama secara merata.

2. Kondisi Birokrasi Pusat maupun Daerah¹⁰

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah dituntut untuk melakoni peran sebagai mediator atau penyedia jasa pendidikan. Dimana peran ini membutuhkan kesanggupan para pemimpin dan jajaran pegawai di seluruh birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengesampingkan mental birokrasi penguasa. Mengubah pemikiran dari pihak yang selalu memberi perintah menjadi pelayan masyarakat. Dari eksekutor program pendidikan menjadi fasilitator program dan mengubah peran dari pengawas pelaksanaan pendidikan menjadi pendamping pelaksanaan pendidikan. Hal ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi demi mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar.

Menurut Praktisi Pendidikan dan Ketua Kampus Guru Cikal Budi Setiawan Muhamad, dalam menghadapi masalah tersebut, dapat dilakukan melalui dua pola. Pertama, dengan memberikan edukasi birokrasi pendidikan. Kedua, melalui penguatan gerakan guru dan pendidik dari akar rumput (*grassroot teachers and educators*). Melalui dua alternatif pola ini, diharapkan dapat membantu efektivitas kebijakan Merdeka Belajar dalam melahirkan generasi penerus yang kompeten, berkualitas dan mampu bersaing.

3. Tantangan implementasi kegiatan “pertukaran pelajar” dalam kebijakan Kampus Merdeka¹¹

Dalam kebijakan Kampus Merdeka, menyebutkan empat paket kebijakan untuk pendidikan tinggi, yaitu: i). Kemudahan pembukaan program studi baru, ii). Sistem akreditasi perguruan tinggi, iii).

¹⁰ Lestari, R., 2019. Ini Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar Menteri Nadiem. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191214/15/1181341/ini-tantangan-kebijakan-merdeka-belajar-menteri-nadiem>

¹¹ Latuconsina, H., 2020. Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” bagi Institusi Pendidikan Tinggi. <https://duta.co/tantangan-dan-peluangkebijakan-merdeka-belajar-bagi-institusi-pendidikan-tinggi>

Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum, dan iv). Hak belajar tiga semester di luar program studi (Merdeka Belajar).



Gambar 52; Konsep Pokok Kampus Merdeka

Respon negatif dan positif diterima oleh kebijakan baru ini dari penyelenggara pendidikan tinggi tanah air. Bagi perguruan tinggi besar yang telah mapan dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi, keberadaan kebijakan ini disambut positif, karena merasa akan lebih mudah dalam mengkolaborasikan kebijakan internal mereka dengan kebijakan baru ini. Berbeda halnya dengan perguruan tinggi kecil yang merasa bahwa kebijakan baru ini dinilai akan ‘membunuh’ secara perlahan dengan keberadaan persyaratan pembukaan program studi baru. Sekaligus persyaratan ajib melakukan kerja sama dengan program studi dari perguruan tinggi ternama (seratus besar terbaik di dunia) untuk mendukung kinerja tridharma dari program studi yang akan dibuka.

Selain itu, paket kebijakan ‘Merdeka Belajar’ mewajibkan pemberian hak bagi mahasiswa secara sukarela, untuk: i) dapat mengambil SKS (jam kegiatan) di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS), dan ii) dapat mengambil SKS pada Program Studi yang berbeda di Perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Dengan demikian dapat dihitung bahwa jumlah SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester, dan 3 semester sisanya dapat diambil di luar program studinya. Kegiatan di luar program studi dapat berupa magang/praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Salah satu bentuk implementasi berupa pertukaran pelajar antar institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai konsumen strategis diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan,

skill dan pengalaman yang belum maksimal diperolehnya pada program studi asalnya. Sehingga menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan menjadi lulusan yang kompetitif.

Lima tantangan dalam program pertukaran pelajar yang perlu diantisipasi oleh institusi pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap program studi dituntut agar mampu mengembangkan keunggulan dari komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan karakter yang kuat sebagai pencari sekaligus pembeda terhadap program studi lainnya baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Serta dituntut agar dapat melakukan ‘branding’ sehingga dikenal dan menjadi daya tarik bagi mahasiswa dari luar kampusnya,
- b. Prodi harus memiliki sarana dan prasarana pembelajaran memadai yang dapat mendukung keunggulan kompetitifnya berbasis teknologi informatika. Hal ini agar dapat menunjang sistem pembelajaran jarak jauh mahasiswa dari luar institusinya, serta mampu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mendukung tri dharma perguruan tinggi yang lebih optimal.
- c. Prodi dengan SDM (dosen) yang unggul, didukung oleh rekam jejak pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang linear dan berkelanjutan. Juga mendukung program unggulan yang telah dikembangkan, dan didukung dengan rencana induk penelitian yang sesuai unggulan program studi.
- d. Prodi diharuskan memiliki sifat terbuka melalui pengembangan informasi akademik berbasis website, dan memiliki SDM (tenaga kependidikan) yang handal guna mewujudkan pelayanan prima sebagai pendukung kegiatan akademik yang berkelanjutan dan lebih bermutu.
- e. Tantangan teknis yang sekaligus menjadi peluang, yaitu: *pertama*; peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tinggi sebagai prasyarat mutlak dalam melanjutkan pembelajaran lintas institusi. *Kedua*; mahasiswa yang ingin belajar di luar prodi, sudah harus memiliki perencanaan terkait kompetensi utama maupun kompetensi pendukung yang ingin diraih, sebagai tolak ukur program studi tujuan dalam penerimaan. *Ketiga*; persyaratan akademik bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar kampus asalnya, meliputi: standar nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kemampuan akademik dan non akademik pendukung, serta melalui mekanisme seleksi yang ketat secara internal, sebagai bentuk penjaminan mutu akademik dari

mahasiswa bersangkutan. *Keempat*: syarat terpenting yaitu sebaiknya mendukung rencana risetnya di akhir studi, sehingga ada kewajiban kolaborasi riset mahasiswa di bawah bimbingan dosen antar program studi.

Pengembangan program “Sister Campus” yaitu menggandeng 2 kampus yang berbeda lokasi, dengan tujuan menjalin kerja sama tridharma perguruan tinggi, merupakan salah satu alternatif dalam implementasi program pertukaran pelajar ini. Peluang pengembangan Program “Sister Campus” bukan saja mendukung pertukaran mahasiswa, namun juga pertukaran dosen dan tenaga kependidikan serta pengembangan kolaborasi riset dan publikasi secara berkelanjutan.

F. Evaluasi pemahaman

1. Jelaskan bagaimana hubungan antara pendidikan dan politik (kebijakan politik)
2. Jelaskan bagaimana pendidikan dan kebijakan politik saling mempengaruhi satu sama lain?
3. Mengapa reformasi pendidikan sangat dibutuhkan? Terutama pada masa pandemik COVID-19 saat ini.
4. Berikan contoh reformasi pendidikan yang terjadi di Indonesia pada era reformasi dan jelaskan alasannya.
5. Apa yang saudara ketahui tentang kebijakan Merdeka Belajar?
6. Seperti apa kebijakan Kampus Merdeka pada tataran pendidikan Tinggi diselenggarakan?

XII

PENDIDIKAN ABAD 21 DAN PERMASALAHANNYA

A. Pendahuluan

Dampak globalisasi menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia termasuk pendidikan. Kurikulum pendidikan terus berubah untuk memenuhi tuntutan pendidikan abad 21. Menurut PBB dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tantangan pendidikan abad 21 yaitu membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledge based society*) yang memiliki keterampilan melek TIK dan media; keterampilan berpikir kritis; keterampilan memecahkan masalah; keterampilan berkomunikasi efektif; dan keterampilan bekerja sama secara kolaboratif. Peran guru, sekolah, masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21.

Infrastruktur merupakan salah satu penyebab suatu daerah berkembang atau tetap menjadi daerah terpencil. Daerah terpencil merupakan gambaran geografis dimana kawasan pedesaan terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana perhubungan dan komunikasi. Daerah berkembang adalah daerah yang mengalami peningkatan sarana dan prasarana sehingga mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan di daerah itu. Oleh karena itu, untuk mendorong pendidikan abad 21 di era Revolusi 4.0 maka pemerintah perlu membangun dan menyempurnakan infrastruktur baik fisik maupun non fisik.

Tak hanya soal infrastruktur, sebagai institusi, pendidikan pada prinsipnya memikul amanah “etika masa depan”. Etika masa depan timbul dan dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap anak manusia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Hal ini berarti bahwa, di satu sisi, etika masa depan menuntut manusia untuk tidak mengelakkan tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya sekarang ini. Di sisi lain, manusia dituntut untuk mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-

prioritas dalam suasana yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi mangsa dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka di kemudian hari (Joesoef, 2001: 198-199). Selain masalah infrastruktur dan institusi itu sendiri, masih banyak lagi permasalahan yang ada di Indonesia.

B. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21

Cita-cita setiap bangsa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, serta hidup sejajar dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan bangsa Indonesia yang bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, serta dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia global dalam abad 21 ini. Semua ini dapat dan harus dicapai dengan kemauan dan kemampuan sendiri, yang hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh anak bangsa. Kata kunci dalam pendidikan ini adalah kemandirian.

Pendidikan Nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Dengan kata kesejahteraan tercakup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan dan kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan.

Terwujudnya kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan dalam kehidupan suatu masyarakat tercermin dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang nyaman. Mulai dari lingkungan rumah tangga sampai ke lingkungan antar bangsa dengan saling hormat menghormati. Ini semua hanya akan tercapai bila masing-masing anggota masyarakat berpegang pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatan, yang antara lain saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa kebersamaan, empati, dan sebagainya. Di samping itu, masing-masing anggota masyarakat itu juga memiliki sikap-sikap yang terpuji, seperti kesediaan dan kemauan untuk saling membantu dan berbuat untuk kemanfaatan bersama, termasuk di dalamnya menaati kesepakatan bersama yang dapat terungkap mulai dari berbagai aturan dalam keluarga sampai dengan peraturan dan perundangan lokal dan nasional, serta antar bangsa.

Kesejahteraan material atau hidup berkecukupan adalah kehidupan yang terbebas dari kemiskinan, walaupun tidak harus berupa kemewahan. Ini akan dapat terwujud bila masing-masing warga negara memiliki dan menguasai kecakapan dan keilmuan, yang disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu.

Uraian di atas dapat dipandang sebagai kunci untuk mengelaborasi dan menjabarkan lebih lanjut pengertian sumber daya manusia yang berkualitas yang diungkapkan dalam tujuan pendidikan yang dikemukakan di atas. Dari sini pulalah dapat dirumuskan paradigma pendidikan nasional kita, yang kalau diringkaskan adalah menanamkan nilai-nilai luhur serta menumbuh-kembangkan sikap hidup yang terpuji, di samping memberikan pengetahuan dan kecakapan yang mengikuti perkembangan zaman.

Dalam abad 21 terdapat berbagai kekhususan yang utama. Yang pertama adalah terwujudnya masyarakat global yang menjadi kesepakatan antar bangsa, yaitu terbukanya mobilitas yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain dalam berbagai hal. Yang kedua adalah abad ini akan lebih dikuasai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih dan berpadu pula dengan ilmu sosial dan humaniora. Agar mampu berkompetisi dalam masyarakat global tersebut, setiap bangsa bukan hanya harus menguasai perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga mempunyai penguasaan yang cukup pula atas sains sosial dan humaniora serta perkembangannya.

Dalam abad ini masing-masing ilmu tidak lagi harus bekerja sendiri, melainkan berbagai cabang ilmu dapat bekerja sama. Bukan hanya dalam sesama kelompok ilmu, teknologi, atau sains sosial dan humaniora saja, melainkan dalam banyak hal antara beberapa kelompok. Walaupun perkembangan sains dan teknologi canggih adalah konsumsi perguruan tinggi, namun kesiapan mahasiswa menyerapnya sangat ditentukan oleh hasil pendidikan pra universitas, mulai jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan menengah, bahkan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Dengan demikian rangkaian setiap jenjang pendidikan, sekurang-kurangnya mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, dan sedapat-dapatnya mulai dari PAUD haruslah merupakan rantai-rantai yang masing-masing terdiri dari mata rantai dengan ciri khasnya dan semuanya tersambung secara utuh. Walaupun demikian, pada rangkaian rantai suatu jenjang ke rantai jenjang berikutnya perlu diberi cabang, yaitu rantai yang mengarah ke

pendidikan lanjut (pendidikan akademik) dan rantai yang mengarah ke persiapan memasuki masyarakat (pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesi).

Demikian pula, untuk menghadapi dunia global ini usaha meningkatkan mutu pendidikan sampai bertaraf internasional adalah suatu keharusan, namun bukan dengan mempertentangkan atau membedakan yang satu dengan yang lain dengan berbagai sebutan. Sekalipun demikian, menanamkan rasa kebangsaan dan penghayatan dan kemampuan menghargai budaya nasional merupakan butir yang harus selalu dilakukan di setiap jenjang pendidikan.

C. Empat Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21

Prinsip-prinsip ini digagas Jennifer Nichols yang dapat dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini:

1. *Instruction should be student-centered*

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat.

Pembelajaran berpusat pada siswa bukan berarti guru menyerahkan kontrol belajar kepada siswa sepenuhnya. Intervensi guru masih tetap diperlukan. Guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal (*prior knowledge*) yang telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. Selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing, yang berupaya membantu siswa ketika menemukan kesulitan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya.

2. *Education should be collaborative*

Siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek,

siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka.

Begitu juga, sekolah (termasuk di dalamnya guru) seyogyanya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan (guru) lainnya di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tentang praktik dan metode pembelajaran yang telah dikembangkannya. Kemudian, mereka bersedia melakukan perubahan metode pembelajarannya agar menjadi lebih baik.

3. *Learning should have context*

Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata (*real word*). Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata.

4. *Schools should be integrated with society*

Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya.



Gambar 53: Prinsip Pokok Pembelajaran Abad ke-21

D. Pembelajaran Abad 21 Bagi Daerah Terpencil

Mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran di sekolah merupakan salah satu upaya mencapai tujuan pendidikan abad 21. Namun, pengintegrasian ini memiliki tantangan bagi sekolah daerah terpencil. Oleh karena itu, pembelajaran abad 21 di daerah terpencil memerlukan perhatian khusus pemerintah.

Hasil analisis sekolah daerah terpencil di Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara diperoleh hambatan untuk menerapkan pembelajaran abad 21. Hambatan tersebut berupa:

- 1) *fasilitas sarana dan prasarana*, selain belum terpenuhinya fasilitas TIK, hambatan lainnya adalah perpustakaan. Beberapa sekolah belum memiliki ruang khusus dan kekurangan buku serta buku yang tersedia tidak terbarukan. Buku terbarukan adalah solusi mendapatkan informasi tanpa internet dan memotivasi siswa belajar mandiri;
- 2) *keprofesionalan guru*, tidak meratanya sebaran guru ataupun kurangnya guru pelajaran tertentu menyebabkan guru mengajar bukan berdasarkan disiplin ilmu. Mengganti kekosongan guru mengurangi fokus guru melahirkan ide-ide kreatif dalam pelajaran yang diampunya;
- 3) *kurikulum*, menyamakan standar dan perlakuan pembelajaran nasional tanpa menyamakan fasilitas sekolah memerlukan pengkajian kembali. Informasi ini memberi titik terang apa yang harus dilakukan pemerintah dan guru dalam mendukung pembelajaran abad 21.

Bagi pemerintah, untuk menyukseskan pendidikan abad 21 di daerah terpencil, perlu:

- 1) mempercepat pemerataan fasilitas TIK pembelajaran di seluruh daerah tanpa terkecuali;
- 2) membangun perpustakaan, menyediakan buku belajar baik fiksi maupun non fiksi untuk mendorong budaya literasi siswa;
- 3) menyediakan alat peraga sebagai visualisasi materi ajar guna mendukung pembelajaran tanpa teknologi;
- 4) melakukan kajian kurikulum khusus daerah terpencil;
- 5) membentuk guru peneliti dari guru-guru daerah terpencil untuk merumuskan strategi pembelajaran sesuai kondisi daerah;
- 6) memprogramkan pertukaran guru antara guru daerah terpencil dengan daerah berkembang untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran serta menyesuaikan kebutuhan guru di sekolah;
- 7) memfasilitasi pelatihan guru untuk meningkatkan kualitasnya terkait pembelajaran abad 21 sesuai kondisi daerah;
- 8) mempercepat program internet masuk ke daerah terpencil.

Bagi guru, pembelajaran dimulai dengan memperbaiki pengetahuan bukan berarti menitikberatkan pembelajaran pada alat TIK. Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan bukanlah sebagai tujuan pendidikan abad 21. Kualitas terbaik guru daerah terpencil menyeimbangkan ketidaksediaan alat TIK dalam pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, efektif, dan efisien serta membekali siswa dengan berbagai *skill*.

Kegiatan pembelajaran yang disusun menganut empat prinsip pokok pembelajaran abad 21 sebagaimana yang dirumuskan Jennifer Nichols dalam Rohim, Bima dan Julian (2016) yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Keempat prinsip pembelajaran abad 21 tersebut diadaptasikan ke dalam pembelajaran oleh guru dengan:

- menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menggambarkan aktivitas siswa, guru, pemanfaatan media pembelajaran, dan proses penilaian;
- memperbaiki pengetahuan sesuai perkembangan zaman;
- menerapkan berbagai strategi pembelajaran untuk memberi variasi pengalaman belajar;
- meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa selalu tertarik ke sekolah.

Mengembangkan keempat kegiatan pembelajaran tersebut mendorong guru menciptakan pembelajaran berasaskan prinsip pembelajaran abad 21. Namun, para guru tetap perlu untuk menguasai teknologi yang terkait langsung terhadap pembelajarannya. Hal ini dikarenakan perubahan adalah sebuah kepastian sekarang ataupun nanti. Oleh karena itu, pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan mengupayakan pemerataan bantuan TIK yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

E. Pembelajaran Abad 21 Bagi Daerah Berkembang

Salah satu misi pendidikan abad 21 yakni membangun keterampilan melek TIK dan media pada siswa. Misi ini dapat tercapai di daerah berkembang walaupun beberapa sekolah belum memiliki fasilitas TIK pembelajaran. Kondisi ini tidak menghambat menerapkan pembelajaran abad 21 karena internet sudah menjangkau daerah berkembang. Kemudahan mendapatkan informasi melalui internet mendukung guru dan siswa membangun keterampilannya seperti keterampilan TIK. Namun, perlu penguatan pendidikan karakter siswa agar pemanfaatan TIK dilakukan dengan tepat.

Bagi pemerintah, solusi pembelajaran abad 21 adalah memanfaatkan portal yang dikembangkan pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (pustekkom) serta beberapa media lain. Salah satu portal pendidikan tersebut dikenal dengan "**Rumah Belajar**". Rumah belajar menyediakan bahan pembelajaran yang interaktif dan memfasilitasi komunikasi serta interaksi antar komunitas. Delapan fitur utama rumah belajar yakni: *sumber belajar*; *buku sekolah elektronik (BSE)*; *bank soal*; *laboratorium maya*; *peta budaya*; *wahana jelajah angkasa*; *pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)*; dan *kelas maya*. Selain itu, ada tiga fitur pendukung yakni: *karya komunitas*; *karya guru*; dan *karya bahasa dan sastra*. Kesebelas fitur tersebut dirancang mendukung pembelajaran abad 21 yang diakses dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.

Bagi guru, selain memanfaatkan portal pendidikan pemerintah perlu memperbaharui pengetahuannya dari berbagai sumber. Penerapan pembelajaran abad 21 di daerah berkembang harus menyesuaikan muatan pendidikan era revolusi industri 4.0 sehingga guru harus melek digital. Muatan pembelajaran diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad 21 yakni:

- 1) pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan inovasi;
- 2) keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media dan literasi ICT;
- 3) karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab (Trilling dan Fadel, 2009). Pada akhirnya pendidikan menghasilkan generasi bangsa yang produktif sehingga permasalahan pengangguran dan daya saing sumber daya manusia terminimalisir.

F. Permasalahan Eksternal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Globalisasi

Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global (Fakih, 2003: 182). Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan. Namun, gejala ke arah itu sudah mulai nampak.

Sejumlah SMK dan SMA di beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) yang berlaku secara internasional dalam pengelolaan manajemen sekolah mereka, yaitu SMM ISO 9001:2000; dan banyak di antaranya yang sudah menerima sertifikat ISO.

Oleh karena itu, dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara, dari keunggulan komparatif (Comparative advantage) kepada keunggulan kompetitif (Competitive advantage). Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Kuntowijoyo, 2001: 122).

Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat

tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat kosmopolitanisme dimana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara kompetitif *under-quality* (berkualitas rendah). Kecenderungan ini sudah mulai terlihat pada tingkat perguruan tinggi dan tidak mustahil akan merambah pada tingkat sekolah menengah.

Bila persoalannya hanya sebatas tantangan kompetitif, maka masalahnya tidak menjadi sangat krusial. Tetapi salah satu ciri globalisasi adalah adanya “regulasi-regulasi”. Dalam bidang pendidikan hal itu tampak pada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tentang sekolah berstandar internasional. Pada jajaran SMK regulasi sekolah berstandar internasional tersebut sudah lama disosialisasikan. Bila regulasi berstandar internasional ini kemudian ditetapkan sebagai prasyarat bagi output pendidikan untuk memperoleh akses ke bursa tenaga kerja global, maka hal ini pasti akan menjadi permasalahan serius bagi pendidikan nasional.

Globalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional, tetapi pada waktu yang sama ia juga menghadirkan tantangan dan permasalahan pada pendidikan nasional. Karena pendidikan pada prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari permasalahan pendidikan masa kini.

G. Permasalahan Eksternal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Perubahan Sosial

Ada sebuah adegium yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya berubah; satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu artinya, perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan, meskipun ada perubahan sosial yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan cepat.

Bahkan salah satu fungsi pendidikan adalah melakukan inovasi-inovasi sosial, yang maksudnya tidak lain adalah mendorong perubahan sosial. Fungsi pendidikan sebagai agen perubahan sosial tersebut, dewasa ini ternyata justru melahirkan paradoks.

Kenyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, perubahan sosial berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya pembaruan dan laju perubahan pendidikan. Sebagai akibatnya, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol,

tetapi tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial secara akurat (Karim, 1991: 28).

Dalam kaitan dengan paradoks dalam hubungan timbal balik antara pendidikan dan perubahan sosial seperti dikemukakan di atas, patut kiranya dicatat peringatan Sudjatmoko (1991:30) yang menyatakan bahwa negara-negara yang tidak mampu mengikuti revolusi industri mutakhir akan ketinggalan dan berangsur-angsur kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara merdeka. Dengan kata lain, ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. Permasalahan perubahan sosial, dengan demikian harus menjadi agenda penting dalam pemikiran dan praksis pendidikan nasional.

H. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Sistem Kelembagaan Pendidikan

Permasalahan sistem kelembagaan pendidikan yang dimaksud dengan uraian ini ialah mengenai adanya dualisme atau bahkan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme atau dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama ini agaknya merupakan warisan dari pemikiran Islam klasik yang memilah antara ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu *ghairu syariah* dan ilmu *syariah*, seperti yang terlihat dalam konsepsi al-Ghazali (Othman, 1981: 182).

Dualisme dikotomi sistem kelembagaan pendidikan yang berlaku di negeri ini kita anggap sebagai permasalahan serius, bukan saja karena hal itu belum bisa ditemukan solusinya hingga sekarang, melainkan juga karena ia, menurut Ahmad Syafii Maarif (1987:3) hanya mampu melahirkan sosok manusia yang “pincang”. Jenis pendidikan yang pertama melahirkan sosok manusia yang berpandangan sekuler, yang melihat agama hanya sebagai urusan pribadi.

Sedangkan sistem pendidikan yang kedua melahirkan sosok manusia yang taat, tetapi miskin wawasan. Dengan kata lain, adanya dualisme dikotomi sistem kelembagaan pendidikan tersebut merupakan kendala untuk dapat melahirkan sosok manusia Indonesia “seutuhnya”. Oleh karena itu, Ahmad Syafii Maarif (1996: 10-12) menyarankan perlunya modal pendidikan yang integratif.

I. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Profesionalisme Guru

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan.

Menurut Suyanto (2006: 1), “guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis alfabetikal maupun fungsional yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya”. Tetapi segera ditambahkan: “guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “digugu lan ditiru”.

Lebih jauh Suyanto (2006: 28) menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu. Kualifikasi dan ciri-ciri yang dimaksud adalah:

- harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat,
- harus berdasarkan atas kompetensi individual,
- memiliki sistem seleksi dan sertifikasi,
- ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat,
- adanya kesadaran profesional yang tinggi,
- memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik),
- memiliki sistem seleksi profesi,
- adanya militansi individual,
- memiliki organisasi profesi.

Dari ciri-ciri atau karakteristik profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sampingan, atau pekerjaan sebagai *moon-lighter*. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya guru terlebih guru honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui sistem seleksi profesi. Singkatnya, di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat banyak, guru yang tidak profesional.

J. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini: Permasalahan Strategi Pembelajaran

Menurut Suyanto (2006: 15-16) era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan.

Paulo Freire (2002: 51-52) menyebut strategi pembelajaran tradisional ini sebagai strategi pelajaran dalam “gaya bank” (banking concept). Di pihak lain, strategi pembelajaran baru digambarkan oleh Suyanto sebagai berikut: berpusat pada murid, menggunakan banyak media, berlangsung dalam bentuk kerja sama atau secara kolaboratif, interaksi guru-murid berupa pertukaran informasi dan menekankan pada pemikiran kritis serta pembuatan keputusan yang didukung dengan informasi yang kaya. Model pembelajaran baru ini disebut oleh Paulo Freire (2000: 61) sebagai strategi pembelajaran “hadap masalah” (problem posing).

Meskipun dalam aspirasinya, sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini terdapat tuntutan pergeseran paradigma pembelajaran dari model tradisional ke arah model baru, namun kenyataannya menunjukkan praktik pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru (Idrus, 1997: 79). Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru.

K. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang paling utama dalam kehidupan. Melalui pendidikan, setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Astuti, 2015). Biaya pendidikan saat ini sering kali menjadi sebuah problema bagi orangtua. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun semuanya itu masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta perlu kesiapan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan

keuangan karena dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal, maka pendidikan yang diberikan pada anak akan terus berlanjut sehingga anak tidak akan putus sekolah. Tanggung jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan karena banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak memperhatikan pentingnya pendidikan bagi sang buah hati. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dialami masyarakat menimbulkan kemiskinan (Suryono & Wesa, 2014). Dampaknya adalah membuat anak putus sekolah, anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah dasar. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Jika masalah ini tidak mendapat perhatian, maka program tersebut tidak akan terealisasi. Banyak anak yang putus sekolah karena orangtua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Permasalahan kemiskinan memang menjadi momok bagi negara Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri salah satu tujuannya adalah adanya pengurangan angka kemiskinan dari negara-negara di ASEAN (Nugroho, 2016).

Kualitas pendidikan di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Apa makna data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Jelas ada masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut memberi andil besar pada HDI tersebut walau pendidikan hanya satu dari lima faktor yang menentukan peringkat HDI (Dananjaya, 2005). Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam 2 (dua) masalah yaitu:

- 1) masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan.
- 2) masalah teknis penyelenggaraan, yaitu berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Mahalnya pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan

hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Orangtua siswa harus berpikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan.

Padahal pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua masyarakat, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

L. Uji Pemahaman

1. Jelaskan tujuan pendidikan nasional abad 21!
2. Jelaskan prinsip pokok pembelajaran “Instruction should be student-centered”!
3. Sebutkan delapan fitur utama rumah belajar!
4. Sebutkan kualifikasi dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional!
5. Sebutkan dan jelaskan permasalahan pendidikan di abad 21 yang ada di daerah Anda!

XIII

BERBAGAI PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN

A. Analisis Kebijakan (Policy Analysis)

Aktivitas kebijakan publik dalam tataran ilmiah disebut analisis kebijakan public yang menurut William N. Dunn (2003: 89)³³ bahwa analisis kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Bill Jenkins, dalam “The Policy Process” kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

William N. Dunn (2003) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1)³⁴ “*The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.*” Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan organisasi publik berkaitan dengan masalah-masalah dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Selain itu analisis kebijakan dikemukakan oleh Suharto (2010:85) yaitu sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

B. Tujuan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi guna membantu para pembuat kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan publik. Analisis kebijakan publik memberikan informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan publik dan memberikan argumentasi berbagai alternatif kebijakan publik sebagai bahan pertimbangan kepada pembuat kebijakan publik.

Berdasarkan kajian kebijakan dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan public berpijak pada permasalahan public semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin tradisional yang mencari pengetahuan tentang sebab-akibat dari kebijakan publik. Analisis kebijakan publik juga bersifat normatif. Tujuannya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Aspek normatif atau kritik-kritik nilai dari analisis kebijakan ini terlihat ketika disadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif.

C. Bentuk Analisis Kebijakan

Dunn (2003: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan dalam ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Terdapat tinjauan terhadap lima tema lintas sektoral, yaitu (a) pemisahan dalam kebijakan; (b) manajemen perubahan; (c) peranan kelompok-kelompok dalam proses kebijakan; (d) kepemilikan dari proses kebijakan; dan (e) alternatif kebijakan. Argumentasi ini adalah model linear kebijakan, ditandai dengan tujuan analisis pilihan dan pemisahan dari pelaksanaan kebijakan, di mana hal ini sangat tidak memadai. Kombinasi antara konsep dari berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk menempatkan beberapa urutan ke dalam permasalahan, termasuk kebijakan narasi, kebijakan komunitas, analisis wacana, rezim teori, manajemen perubahan, dan peran birokrat di tingkat pelaksanaannya.

D. Lingkup Kebijakan

Weimer & Vining (1999) dalam Kartodihardjo (2009) menjelaskan mengenai lingkup kebijakan, terdiri atas riset kebijakan

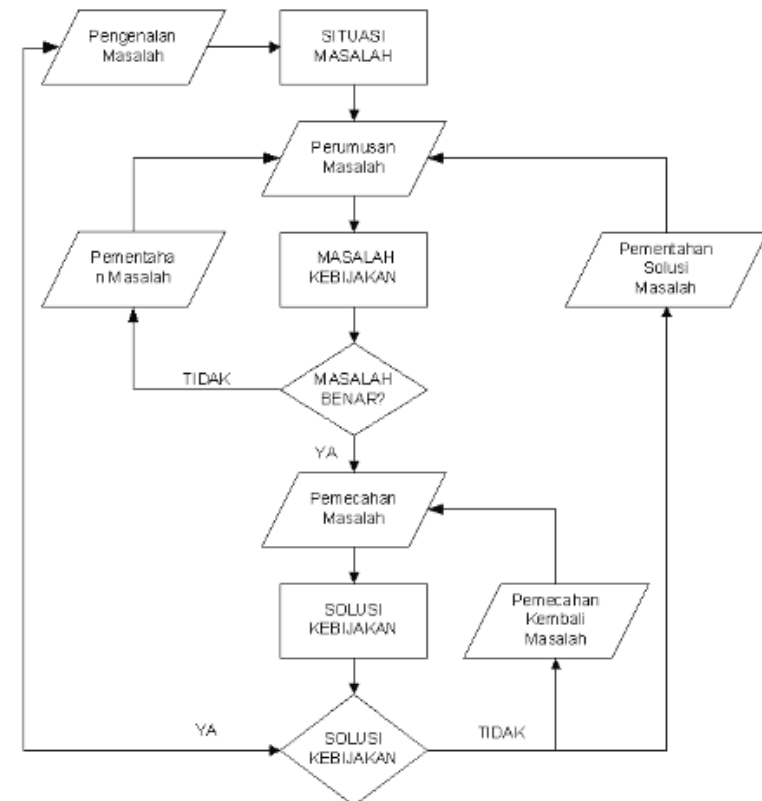
dan analisis kebijakan. Riset kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel akibat perubahan kebijakan untuk aktor dalam arena kebijakan yang relevan melalui metodologi formal. Sementara analisis kebijakan merupakan perbandingan dan evaluasi dari solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah bagi orang atau lembaga tertentu melalui sintesis, riset-riset, dan teori. Sutton (1999) menunjukkan bahwa dengan kajian kebijakan, akan dihasilkan pengetahuan mengenai baik atau buruknya kinerja kebijakan yang dihasilkan saat ini melalui identifikasi arena kebijakan menggunakan metode yang valid.

Tujuan Utama	Klien	Style Umum	Batasan Waktu	Kelemahan Umum	
Riset Ilmu Sosial	Mengembangkan teori untuk memahami masyarakat	'Truth' seperti yang dimaksudkan oleh para akademisi	Metode yang <i>strict</i> untuk membangun dan menguji teori; biasanya dengan melihat masa lalu	Jarang adanya batasan waktu yang bersifat eksternal	Sering tidak relevan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pembuat keputusan
Riset Kebijakan	Memprediksi dampak perubahan ke dalam variabel yang dapat diubah oleh kebijakan publik	Aktor politik; disiplin profesi yang terkait	Aplikasi metodologi formal untuk menanggapi pertanyaan kebijakan yang relevan: prediksi dan konsekuensi	Kadang-kadang batasan <i>dead line</i> , diatasi melalui kemungkinan terjadinya isu berulang	Kesulitan dalam menerjemahkan temuan-temuan ke dalam tindakan pemerintahan
Perencanaan Klasik	Menetapkan dan mewujudkan keadaan masa mendatang yang diinginkan	"Keinginan masyarakat" seperti yang didefinisikan secara profesional	Penetapan peraturan dan norma profesional; penentuan <i>goals</i> dan <i>objectives</i>	Adanya sedikit tekanan waktu karena berurusan dengan hal-hal yang bersifat <i>long-term</i>	Bagaikan punggung merindukan bulan bila proses politik diabaikan
Analisis Kebijakan	Memberikan perbandingan yang sistematis dan penilaian alternatif yang ada untuk mengatasi masalah sosial	Orang atau institusi tertentu sebagai pembuat keputusan	Sintesis riset dan teori yang ada untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif kebijakan	Tekanan <i>deadline</i> yang sangat kuat dari sains analisis; biasanya terkait dengan keputusan spesifik	Kurang adanya imajinasi sebagai akibat <i>client orientation</i> dan tekanan waktu

Gambar 54: Perspektif analisis kebijakan

Penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul diperlukan pengambilan kebijakan yang sesuai kepentingan publik, sehingga kebijakan publik tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Kita

lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Russell L Ackoff dalam Dunn 2003). Berdasarkan pendapat ini, maka penemuan masalah adalah tahapan yang penting sebelum kita melakukan berbagai kebijakan atau solusi terhadap masalah tersebut.



Gambar 55: Diagram alir perumusan masalah

Kartodihardjo (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kekeliruan dalam analisis kebijakan yang menyangkut masalah dan situasi masalah sebagai berikut.

1. *Problem resolving* atau memecahkan kembali masalah dengan analisis ulang pemecahan masalah dari masalah yang sebenarnya telah ditetapkan dengan tepat.
2. *Problem unsolving* atau pementahan solusi masalah dengan membuang solusi karena kesalahan dalam penetapan masalah;

3. *Problem dissolving* atau pementahan masalah dengan membuang masalah yang telah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi belum dijalankan.

Sutton (1999) melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan kebijakan dengan berbagai sudut pandang: antropologi, ilmu politik, sosiologi, hubungan internasional, dan manajemen. Dalam model rasional, langkah-langkah pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah
2. Tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dapat di-rangking
3. Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan
4. Analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif
5. Membandingkan masing-masing alternatif
6. Memilih alternatif yang terbaik

Cook dan Elder (19720) membagi Agenda menjadi dua tipe, yaitu sistemik dan institusional.

Agenda sistemik:

- 1) semua isu secara umum dianggap oleh anggota komunitas politik pantas mendapat perhatian dari otoritas publik
- 2) untuk mendapat akses ke agenda sistemik, sebuah isu harus mendapat perhatian luas dari sebagian besar persepsi publik, sehingga isu itu menjadi perhatian otoritas publik.

Agenda institusional:

- (1) muncul secara eksplisit dan menjadi pertimbangan serius oleh pembuat keputusan
- (2) mungkin merupakan item lama yang muncul karena diulas secara reguler atau menjadi perhatian secara periodik atau mungkin ia merupakan “item” baru. Sebuah isu tidak akan masuk ke agenda institusional jika sebelumnya isu itu tidak muncul di agenda sistemik.

E. Pendekatan Analisis Kebijakan

Kebijakan publik memerlukan analisis dengan berbagai pendekatan. Berbagai model pendekatan sebagai langkah untuk memberikan solusi sehingga mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Fungsi utama model adalah untuk mempermudah menerangkan suatu benda atau konsep. Tetapi dapat juga digunakan untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian dari proses perumusan teori. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasinya sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model membantu untuk kita menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi.
- b. Berfungsi untuk menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan.
- c. Berfungsi untuk memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut.
- d. Berfungsi untuk merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen.

Adapun berbagai **Pendekatan dalam Studi Kebijakan** meliputi:

1. Pendekatan Kelompok

Pendekatan kelompok ini memiliki asumsi bahwa individu – individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kelompok – kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Contohnya adalah pembentukan koalisi antara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari model ini adalah adanya sebuah wadah misalkan partai politik untuk menyalurkan aspirasi individu yang tergabung didalamnya, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya overlapping atau tumpang tindih dalam sebuah kelompok yang bersatu, selain itu persaingan tidak sehat acap kali terjadi dalam model ini.

2. Pendekatan Proses Fungsional

Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Harold Lasswell mengemukakan beberapa kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional.

- a. **Intelegensi:** Bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
- b. **Rekomendasi:** Bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu.
- c. **Aplikasi:** Bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya diberlakukan atau diterapkan.
- d. **Penilaian:** Bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan tau kegagalan itu di nilai.
- e. **Terminasi:** Bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula di dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi.

Pendekatan fungsional memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak adanya keterikatan dengan lembaga – lembaga pemerintah maupun peraturan politik khusus, serta memberikan keuntungan untuk analisis komparasi kebijakan publik. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel- variabel lingkungan karena merupakan proses intelektual.

3. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan, misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik dan sebagainya. Kebijakan publik model ini memiliki beberapa karakteristik yaitu pemerintah mampu memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu bersifat universal artinya menjangkau semua lapisan masyarakat, terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu memonopoli paksa semua masyarakat, dalam artian mampu menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kebijakan. Model ini juga memiliki kelemahan yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antar lembaga – lembaga pemerintahan dan substansi dari kebijakan publik.

4. Pendekatan Peran Serta Warga Negara

Pendekatan peran serta warganegara, kebijakan ini didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik dari John Locke dan pemikiran John Stuart Mill, yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warganegara dalam perkembangan kebijakan publik. Dengan keikutsertaan warganegara dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warganegara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman,

mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkay persepektif mereka diluar batas-batas kehidupan peribadi.

Peran serta warga negara didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan public. menurut teori ini, dibutuhkan warganegara yang memiliki struktur-struktur yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi. setiap warga negara harus memiliki cukup kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah politik, mempunyai sifat kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan lebih penting adalah perasaan mampu.

Beberapa penelitian berkenaan dengan peran serta warga negara mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan lebih responsif terhadap warga negara yang mempunyai peran serta. Disamping itu, mereka cenderung menerima tuntutan –tuntutan pilihan-pilihan agenda-agenda yang diusulkan oleh kelompok warga negara yang berperan serta dalam memecahkan masalah. para pembuat kebijakan lebih responsive dalam suatu masyarakat yang mempunyai tingkat peran serta yang tinggi, dengan tanggapan utama pada masyarakat aktivis, yang biasanya mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan pencapaian pendidikan yang lebih baik , Namun mereka tidak mewakili masyarakat bawah.

5. Pendekatan Psikologis

Pendekatan diberikan pada hubungan antara pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Psikologi banyak memberi kontribusi untuk memahami pembuatan keputusan. Para psikolog seperti Mayo dan Maslow banyak memberi kontribusi untuk perkembangan teori manajemen. Tetapi, meskipun fakta bahwa perkembangan awal dan pendekatan kebijakan banyak berhubungan dengan penggabungan pandangan psikologi ke dalam kebijakan publik, pengaruh psikologi terhadap studi pembuatan kebijakan tidak sebesar pengaruh terhadap manajemen. Dengan munculnya manajerialisme dalam sektor publik, diharapkan bahwa pengaruh psikologi terhadap studi kebijakan publik akan bertambah. Pengabaian konteks psikologis dari analisis kebijakan ini menghalangi pemahaman kita tentang pembuatan keputusan.

Gagasan tentang keputusan dalam ilmu kebijakan pada umumnya didasarkan pada gagasan tentang rasionalitas dan kepentingan diri yang, jika dikaji dari sudut pandang psikologis, seperti ditunjukkan oleh aliran hubungan manusia, adalah konsep yang terlalu

sederhana. Seperti diyakini Harold Lasswell, dimensi psikologis sangat penting untuk memahami politik kekuasaan. Akan tetapi, terlalu banyak teori yang menunjukkan bahwa analisis kebijakan didasarkan pada pandangan yang dangkal dan parsial tentang perilaku “rasional” manusia. Ini terutama kelihatan dalam ilmu ekonomi yang, seperti dikatakan Boulding, memberikan penjelasan yang tidak memadai untuk pembuatan keputusan entah itu di level individu atau kelompok.

6. Pendekatan Proses

Pendekatan proses, yaitu untuk mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian menganalisisnya.

7. Pendekatan Substantif

Pendekatan substantif, yaitu spesialis substantif dalam suatu bidang tertentu, misalnya menganalisa determinan dari perumusan kebijakan lingkungan, implementasi, atau perubahan.

8. Pendekatan Logis-positivis

Pendekatan logical positivism, yaitu pendekatan perilaku *behavioral approach* atau pendekatan keilmuan *scientific approach*.

9. Pendekatan Ekonometrik

Pendekatan ekonometrik, disebut dengan pendekatan pilihan publik (*the public choice approach*) atau pendekatan ekonomi politik.

10. Pendekatan Fenomenologi/Post Positivist

Pendekatan fenomenologi (postpositivist) adalah kekecewaan yang semakin meningkat dengan menggunakan metode-metode keilmuan.

11. Pendekatan Partisipatori

Pendekatan partisipatori adalah, inklusi perhatian yang besar dan nilai-nilai dari berbagai stakeholders dalam proses pembuatan keputusan kebijakan.

12. Pendekatan Normatif/Preskriptif

Pendekatan normatif atau preskriptif, adalah seorang analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan sama seperti orang yang mendefinisikan “end state” dalam arti bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai.

13. Pendekatan Ideologik

Pendekatan ideologik, adalah secara eksplisit mengadopsi pandangan konservatif atau pandangan liberal, Thomas Sowell menamakan pendekatan ideologi ini “visi” (visions) dan mengidentifikasi dua perspektif yang bersaing. Yaitu pertama “visi yang dibatasi” the constrained vision merupakan suatu gambaran manusia egosentrik dengan keterbatasan moral, kedua. “visi yang tidak dibatasi” the unconstrained vision memberikan suatu pandangan

tentang sifat manusia di mana pemahaman dan disposisi manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan sosial.

14. Pendekatan Historis/Sejarah

Pendekatan historis /sejarah, adalah makin meningkatkan perhatian mereka kepada evolusi kebijakan publik melintasi waktu.

Dunn (2000:97-98) berpendapat di dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam suatu kebijakan, maka terdapat tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu:

1. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Disini pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu ada) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Analisis misalnya, dapat mendeskripsikan, menjelaskan, atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, atau jalan-jalan raya.

2. Pendekatan evaluatif

Pendekatan evaluatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Disini pertanyaannya berkenaan dengan nilai (berapa nilainya) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan.

3. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus ini, pertanyaannya berkenaan dengan tindakan (apa yang harus dilakukan) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.

F. Model Analisis Kebijakan

Ada tiga bentuk atau **model analisis kebijakan Dunn** (2000:117-122), yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif sebagai berikut:

1. Model prospektif

Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. Analisis prospektif acapkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.

2. Model retrospektif

Penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis:

a. Analisis yang berorientasi pada disiplin

Pada analisis ini jarang menghasilkan informasi yang secara langsung bermanfaat untuk merumuskan pemecahan atas masalah-masalah kebijakan, terutama karena variabel-variabel yang paling relevan bagi pengujian-pengujian teori ilmiah umum juga jarang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan manipulasi kebijakan.

b. Analisis yang berorientasi pada masalah

Para analisis yang berorientasi pada masalah kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Analisis yang berorientasikan pada masalah jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik dari para pembuat kebijakan.

c. Analisis yang berorientasi pada aplikasi

Menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi mengenai tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik, yang dapat digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternatif kebijakan baru, dan merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah.

3. Model integratif

Model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Model studi kebijakan publik menurut **James Anderson, James P. Lester dan Joseph Stewart**, yakni:

a. Model Pluralis

Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik. Tugas sistem politik adalah untuk mengelola konflik kelompok. Tindakannya adalah:

- 1) Menentukan aturan permainan dalam perjuangan kelompok.
- 2) Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan publik.
- 3) Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan.
- 4) Memperkuat kompromi-kompromi.

b. Model Elite

Model ini merupakan kebijakan publik yang dapat dipandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.

c. Model Sistem

Model ini kebijakan publik adalah keluaran dari sistem (*policy as system output*). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran (*output*) dari sistem politik. Dalam model ini dapat dilihat dari sistem proses pengambilan kebijakan publik, lebih baik dibandingkan dua model terdahulu, mengingat model sistem ini dalam pengambilan kebijakan publik merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik. Yang mana dasar-dasar pengambilan kebijakan publik lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada.

d. Model Rasional

Model ini merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan rancangan guna memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini menekankan pada pembuatan keputusan

yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.

e. Model Inskrementalis

Memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Charles E. Lindblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional – rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konservatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada. Pada umumnya para pembuat kebijakan, menerima legitimasi program yang telah ditetapkan dan secara diam-diam setuju untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang terdahulu.

f. Model Institusional

Menurut Islami (1997) model menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisis tentang hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur dan dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah adalah amat erat. Kebijakan publik tidak akan menjadi suatu kebijakan sebelum diangkat, dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga pemerintah.

Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan publik memiliki 3 (tiga) karakteristik yang berbeda, seperti:

- 1) Pemerintah memberikan legitimasi pada kebijakan.
- 2) Kebijakan pemerintah melibatkan aspek universitas.
- 3) Pemerintah memegang monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.

G. Uji Pemahaman

1. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan apa yang digunakan bagi para pembuat kebijakan publik dalam membuat kebijakan?
2. Kebijakan publik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik yang sifatnya sangat kompleks. Oleh karena itu, sebelum menentukan kebijakan publik, harus dilakukan perumusan masalah publik. Sebutkan karakteristik masalah publik!
3. Buatlah analisis kebijakan di daerah yang kalian anggap paling penting untuk dilakukan. Berikan alasan mengapa kebijakan itu penting untuk dilakukan, apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat?
4. Jelaskan teknis kebijakan yang digunakan pada soal nomor 3 secara sederhana?
5. Salah satu model kebijakan publik adalah model rasional komprehensif. Sebutkan ciri-cirinya dan berikan satu contoh perumusan kebijakan menurut model rasional komprehensif!

XIV

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PENDEKATAN DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN

Terdapat beberapa tipe formulasi kebijakan, yaitu rutin, analogi, dan kreatif. Sementara metode formulasi terbagi menjadi:

- a. Model linier, model rasional, atau common-sense;
- b. Inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki/disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru tersebut);
- c. Model sistem.

Sutton (1999) melakukan analisis terhadap proses-proses pembuatan kebijakan dengan berbagai sudut pandang: antropologi, ilmu politik, sosiologi, hubungan internasional, dan manajemen.

Dalam model inkremental, kebijakan baru hanya mengubah hal-hal kecil dari kondisi sebelumnya. Biasanya pembaruan kebijakan ditetapkan berdasarkan satu hal yang dianggap paling penting. Penetapan kebijakan seperti ini dianggap tidak optimal. Suatu penetapan kebijakan dianggap optimal apabila disepakati oleh segenap pihak yang berkepentingan dan bukan sekadar dikatakan oleh pihak tertentu sebagai kebijakan paling baik untuk dapat menyelesaikan masalah.

A. Kekurangan Dan Kelebihan Pendekatan Analisis Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan ini cenderung mengikuti tindakan serial. Apabila terdapat kesalahan di kemudian hari, akan kembali dilihat masalahnya dan kemudian diperbaiki dengan kebijakan baru. Hal tersebut didasari oleh alasan bahwa perubahan besar dimulai dari yang kecil. Alasan demikian mempunyai kelemahan karena proses perbaikan kebijakan berikutnya biasanya tidak didasarkan oleh kebijakan sebelumnya atau sekadar mencampur-aduk berbagai

perbaikan kebijakan yang ada, tanpa diketahui akibat yang satu terhadap lainnya.

Pendekatan sistem merupakan cara yang dapat membantu manajer untuk memfokuskan sumber daya yang terbatas ke arah terjadinya perubahan. Dalam model ini perhatian difokuskan ke arah hubungan antarbagian dalam suatu organisasi, respons organisasi terhadap situasi eksternal, bagaimana organisasi mempercayai input dari luar organisasi. Total sumber daya di dalam organisasi selalu terbatas, sehingga setiap upaya untuk menghasilkan perubahan harus memperhatikan penyeimbangan kembali prioritas-prioritas yang dilakukan.

Mengingat kelebihan dan keterbatasan masing-masing jenis riset, Cooper dan Schindler (2006) menganjurkan triangulasi, yaitu mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan konsep Complementarism dari Total System Intervention (TSI) yang memperkaya metode riset terpadu dengan kajian melalui pemodelan sistem dan stimulasi. Metode ini masih satu aliran dengan psikologi kognitif dalam pengambilan keputusan di mana seseorang diasumsikan menganalisis semua alternative dan pertimbangan sebelum melakukan sesuatu untuk mencapai nilai (value) maksimum (Norman 1977).

Dalam analisis, metode ini menggunakan model linear, baik uji beda rata-rata dengan t-test, ANOVA, atau MANOVA, menggunakan regresi sederhana atau berganda dengan variabel dummy atau menggunakan regresi multivariat (multivariate regression). Dengan regresi, nilai koefisien regresi yang didapat adalah besarnya pengaruh setiap stimulus terhadap keputusan (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002).

Pendekatan metode policy capturing ini berbeda dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Bhushan dan Rai 2004). Pada AHP, besarnya kepentingan setiap dimensi terhadap suatu keputusan ditentukan dengan pembobotan. Oleh karena itu, seseorang diasumsikan memiliki pemahaman (insight) yang baik terhadap setiap dimensi yang mempengaruhi keputusannya dan besarnya pengaruh setiap dimensi terhadap keputusan, sehingga dia bisa memberikan pembobotan.

Namun kadang-kadang seseorang mempunyai pemahaman yang kurang baik terhadap dimensi-dimensi keputusan (Wiederman 1999). Tidak hanya pemahaman yang kurang baik, kadang bahkan dimensinya pun tidak diketahui.

Jika ini terjadi, metode AHP atau pendekatan kognitif yang lain kurang tepat digunakan untuk menganalisis pertimbangan dalam suatu pengambilan keputusan. Pembobotan tidak tepat karena besarnya pembobotan tidak menyatakan kepentingan yang sebenarnya. Oleh karena itulah pada saat pemahaman terhadap suatu dimensi kurang baik, metode policy capturing lebih tepat digunakan.

Policy capturing memiliki beberapa kelebihan (Wiederman 1999). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, policy capturing mengukur pertimbangan yang sebenarnya, bukan kepercayaan (belief) seseorang terhadap hal-hal yang melandasi suatu pertimbangan. Pembobotan terhadap suatu dimensi yang digunakan dalam AHP adalah kepercayaan seseorang terhadap pentingnya suatu dimensi itu dalam pengambilan keputusan. Namun, kepercayaan ini bukanlah yang sebenarnya terjadi dan jika pemahaman terhadap pentingnya suatu dimensi kurang memadai, maka pembobotan dalam AHP tidak bisa menangkap besarnya kepentingan yang sebenarnya. Selain itu, policy capturing, seperti AHP bisa digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan yang dilakukan individu, kelompok, atau yang lebih umum. Hal ini bergantung dari tujuan penelitian, apakah bersifat ideografis dan nomotetis (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002).

Policy capturing memiliki beberapa kelemahan (Wiederman 1999). Jika yang diteliti adalah pengambilan keputusan yang sudah dilakukan sebelumnya, subjek dituntut untuk mengingat kembali keputusan-keputusan yang sudah dilakukan. Kesimpulannya akan terbatas hanya pada orang yang sudah melakukan pengambilan keputusan yang ingin diteliti. Selain itu, stimuli yang diberikan bersifat buatan, bukan stimuli yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, sehingga tidak bisa mewakili stimuli yang sebenarnya (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002). Selain itu, akan terjadi laboratory effect (Nunnally 1978); lingkungan pada saat eksperimen dilakukan tidak sama dengan lingkungan pada saat stimuli yang sebenarnya terjadi. Konteks juga kadang mempengaruhi keputusan (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002). Terakhir, stimuli yang diberikan bisa sangat banyak, sehingga subjek akan lelah.

Policy capturing banyak digunakan dalam studi manajemen, terutama sumber daya manusia. Policy capturing digunakan untuk menganalisis karakteristik personal dan organisasional yang mempengaruhi seleksi, alokasi reward, atau hal lain dalam hubungan karyawan-perusahaan (Aiman-Smith Scullen dan Barr 2002). Metode ini digunakan untuk menganalisis pilihan pekerjaan oleh pencari kerja (Aiman-Smith Bauer dan Cable 2001; Williamson, Cope, Thompson,

dan Wuensch 2002; Slaughter, Richard, dan Martin 2006), pengambilan keputusan dalam interview calon karyawan (Graves dan Karren 1992), performance appraisal (Hobson dan Gibson 1983), dan penentuan alokasi kompensasi (Beatty McCune dan Beatty 1988; Deshpande dan Schoderbek 1993; Zhou dan Martocchio 2001; Hu, Hsu, Lee, dan Chu 2007) termasuk kepuasan terhadap kompensasi (Law dan Wong 1998), serta keputusan kenaikan kompensasi (Barclay dan York 2003).

Selain manajemen SDM, policy capturing juga digunakan di manajemen logistik dalam penentuan penyedia jasa logistik (Waller dan Novack 1995; Crosby dan LeMay 1998), di manajemen pemasaran dalam penentuan media yang digunakan dalam komunikasi pemasaran (Webster dan Trevino 1995) serta pemilihan produk oleh pelanggan (Brinberg Bumgardner dan Daniloski 2007), di bidang hukum (Knapp dan Heshizer 2001; Sensibaugh dan Allgeier 1996), keputusan dalam penggunaan teknologi baru (Bahmanziari Pearson dan Crosby 2003). Selain itu, policy capturing juga digunakan dalam pendidikan untuk menganalisis efektivitas pengajaran (Carkenord dan Stephens 1994), keputusan penerimaan aplikasi mahasiswa pascasarjana (Kline dan Sulsky 1995).

Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu-sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang factor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian.

	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
Desain	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifik, jelas, rinci • Mantap sejak awal • Menjadi pegangan langkah demi langkah • Ditentukan sebelum memulai • Menggunakan metode tunggal atau campuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Umum • Fleksibel • Berkembang dan muncul dalam proses penelitian • Mungkin menyesuaikan • Sering menggunakan multimetode secara simultan atau sekuensial
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan hubungan antarvariabel • Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif • Menguraikan atau memprediksi untuk membangun teori 	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif • Menggambarkan realitas yang kompleks • Pemahaman mendalam untuk membangun teori
Teknik penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Eksperimen, survei • Kuesioner • Observasi dan wawancara terstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Participant observation</i> • <i>In depth interview</i> • Dokumentasi • Triangulasi
Instrumen Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Tes, angket, wawancara • Instrumen yang telah standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti sebagai instrumen • Catatan, rekaman, kamera, <i>handycam</i>
Data	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan menggunakan instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden
Sampel	<ul style="list-style-type: none"> • Besar • Representatif • Ditentukan sejak awal • <i>Probability</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecil • Tidak representatif • Berkembang selama proses • <i>Non probability: purposive</i>
Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah selesai pengumpulan data • Deduktif • Menggunakan statistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian • Induktif • Mencari pola, model, tema, teori
Hubungan dengan responden	<ul style="list-style-type: none"> • Berjarak, sering tanpa kontak • Peneliti merasa lebih • Jangka pendek • Hanya mengontrol untuk mencegah bias 	<ul style="list-style-type: none"> • Empati, akrab • Sebagai guru/konsultan • Jangka lama • Peneliti menjadi partisipan atau katalis

Gambar 56; Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Pada pendekatan kualitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat penelitian dilakukan.

Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu (*purposive*). Menurut Eriyanto (2007), metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal.

Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis.

Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain (1) hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris-analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal; (2) banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial; dan (3) memungkinkan terjadinya “pencurian” terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal.

Pendekatan etnometodologis, meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memaafkan realita.

Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat.

Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial.

Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (people centered development). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Perencanaan partisipatif dapat dilakukan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat, tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki untuk perencanaan kegiatan partisipatif antara lain melakukan diskusi kelompok terarah dan memfasilitasi analisis pola keputusan yang dilakukan masyarakat dalam proses perencanaan.

Teknik yang banyak digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Dengan kedua teknik tersebut, maka instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan panduan pertanyaan. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang perbedaan kedua teknik yang digunakan, termasuk keuntungan dan kerugiannya, bisa dilihat pada Gambar 50.

Untuk menyaingi kelemahan teknik kuesioner, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- a. Pada saat kuesioner diisi, sebaiknya petugas ada di samping responden untuk mengantisipasi jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau bias.
- b. Kembangkan hubungan baik dengan responden.
- c. Buatlah mereka mengerti betapa pentingnya informasi yang diberikan.
- d. Libatkan responden dalam proses pengumpulan informasi. Yakinkan responden untuk selalu di bawah kontrol dalam proses pengumpulan informasi.

Teknik	Keuntungan	Kerugian
Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa diterapkan kepada kelompok buta huruf atau yang melek huruf ▪ Memberikan kesempatan untuk memperoleh data yang lebih banyak ▪ Menghasilkan informasi yang tidak biasa ▪ Luwes dan bisa disesuaikan menurut responden yang diwawancarai ▪ Lebih mudah dalam mengatasi salah pengertian informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa muncul bias dalam pilihan pertanyaan ▪ Memakan banyak waktu dan biaya ▪ Perlu keahlian khusus dalam menggali informasi ▪ Hanya bisa meliputi sedikit responden ▪ Responden bisa terjebak mengikuti jawaban yang dikehendaki pewawancara ▪ Responden tidak lagi bersifat anonim, tetapi bisa dikenali
Kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa meliputi banyak responden ▪ Murah dalam pembuatannya ▪ Memberikan ruang kebebasan bagi responden dalam menyampaikan informasi, tanpa diiringi rasa takut atau sungkan ▪ Data yang diperoleh lebih mudah disimpulkan ▪ Lebih mudah dalam melakukan revisi dari program ke program 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulit dalam menyusun pertanyaan agar tidak menyinggung perasaan ▪ Bisa jadi responden tidak serius dalam mengerjakan kuesioner ▪ Tidak cocok untuk mereka yang buta huruf ▪ Perlu waktu lama untuk melengkapi isian kuesioner

Gambar 57; Keuntungan dan kerugian dari teknik wawancara dan kuesioner

Teknik wawancara sebaiknya berlangsung dalam suasana informal. Wawancara bisa diawali dengan dialog yang menarik dengan responden, yaitu mengupayakan adanya common ground (kesamaan topik pembicaraan di awal dialog) agar lebih mudah untuk masuk pada wawancara inti. Dengan taktik ini, responden bisa jadi tidak merasa telah diwawancarai.

Instrumen wawancara bisa berupa daftar pertanyaan rinci atau hanya berupa garis besar pertanyaan. Dengan daftar pertanyaan rinci, maka tidak akan ada pertanyaan penting yang terlewatkan. Namun teknik ini tidak memberikan ruang kebebasan antara pewawancara dengan responden, sehingga terkesan kaku dan formal. Teknik tersebut cocok untuk mereka yang belum berpengalaman dalam wawancara.

Berdasarkan berbagai teknik yang ada, dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada teknik yang paling baik. Cara yang paling baik adalah menggunakan berbagai teknik dengan cara mengkombinasikannya. Validitas informasi akan lebih baik apabila diperoleh dari berbagai sumber dan teknik.

Model merupakan representasi teori yang disederhanakan tentang dunia nyata. Ia lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas yang ada. Berbeda dengan teori yang kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian empiris, model didasarkan pada isomorphism, yaitu kesamaan – kesamaan antara kenyataan satu dengan kenyataan lainnya (Brodbeck, 1959).

B. Kekurangan Dan Kelebihan Model Analisis Kebijakan Menurut Para Ahli

Pendekatan dan model yang dikemukakan oleh para ahli mempunyai keunggulan masing – masing. Biasanya model tersebut cocok untuk menjelaskan kebijakan publik suatu kasus tertentu tetapi tidak cocok atau gagal dalam menjelaskan kebijakan publik untuk kasus yang lain

Model studi kebijakan publik menurut **James Anderson, James P. Lester dan Joseph Stewart**, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yakni:

a. Model Pluralis

Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan

publik. Tugas sistem politik adalah untuk mengelola konflik kelompok.

Model pluralis memiliki keunggulan bahwa kebijakan publik yang diambil didasarkan pada kepentingan kelompok dan tidak atas dasar kepentingan pribadi.

Kelemahan pada model ini adalah apabila kelompok tersebut tidak memikirkan kepentingan kelompok lain, maka kebijakan publik yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.

b. Model Elite

Model ini merupakan kebijakan publik yang dapat dipandang sebagai preferensi dan nilai dari elite penguasa. Teori elite menyatakan bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite tersebut.

Model elitis memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan publik tidak menyita banyak waktu dan dapat dikatakan bahwa model ini memiliki efektifitas waktu, sehingga dalam pengambilan kebijakan publik hanya ditentukan oleh kelompok elit dan tidak terlalu banyak melibatkan pribadi atau kelompok lain.

Kelemahan model elitis adalah apabila kelompok elit yang mengambil kebijakan publik hanya didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik. Artinya kebijakan publik yang diambil menurut kelompok elite saja dan merupakan kebijakan publik terbaik akan tetapi bagi publik justru malah menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

c. Model Sistem

Model ini kebijakan publik adalah keluaran dari sistem (*policy as system output*). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Dalam model ini dapat dilihat dari sistem proses pengambilan kebijakan publik, lebih baik dibandingkan dua model terdahulu, mengingat model sistem ini dalam pengambilan kebijakan publik merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik. Yang mana dasar-dasar pengambilan kebijakan publik lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada.

d. Model Rasional

Model ini merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan rancangan guna memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.

e. Model Inskrementalis

Memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong demi sepotong (bersifat inkremental). Charles E. Lindblom sebagai kritik pembuatan keputusan tradisional – rasional. Menurutnya pembuat keputusan tidak pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan keputusan secara lebih konservatif sifatnya menonjol dalam pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada. Pada umumnya para pembuat kebijakan, menerima legitimasi program yang telah ditetapkan dan secara diam-diam setuju untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang terdahulu.

Model ini memiliki kelebihan apabila kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sebelumnya merupakan sebuah kebijakan yang tepat maka model ini tidak akan menimbulkan konflik dan juga efektif dilihat dari waktu serta anggaran. Akan tetapi apabila pengambil kebijakan publik sebelumnya salah dalam mengambil kebijakan dan pengambil kebijakan selanjutnya menggunakan model ini maka akan muncul permasalahan yang kompleks.

f. Model Institusional

Menurut Islami (1997) model menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisis tentang hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur dan dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

Adapun menurut **Permenkes No. 19 Tahun 2014**, Kebijakan Publik menggunakan 4 (Empat) Model yaitu:

1) Model Kelembagaan (Institusionalisme)

Pendekatan institusional model memandang bahwa kebijakan publik merupakan output dari suatu lembaga, kebijakan hanya dapat

dikatakan sebagai kebijakan publik apabila dibuat, dilaksanakan dan ditegakkan oleh lembaga atau institusi di bidang kajian kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga publik memiliki legitimasi hukum yang otoritatif yang bersifat mengikat dan memaksa penerima kebijakan itu untuk mematuhi.

Kebijakan publik yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan. Secara umum kebijakan dipandang sebagai kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga negara. Kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas, dapat menjangkau seluruh warganegara dan dapat menghukum secara sah orang – orang yang melanggar kebijakan tersebut.

Keunggulan model institusional adalah bahwa kebijakan dapat menuntut loyalitas seluruh warganya dan mempunyai kemampuan untuk mengatur seluruh warganegara, dan mempunyai kekuatan untuk memonopoli penggunaan kekuatan secara sah. Kelemahan model kelembagaan adalah bahwa model ini tidak mencurahkan perhatian pada hubungan antar struktur lembaga pemerintah dan substansi kebijakan publik itu sendiri.

Penjelasan Model Kelembagaan pada Kebijakan Publik Permenkes No. 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Permenkes No. 19 Tahun 2014 adalah merupakan output dari lembaga Pemerintah dalam Hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
- Memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dibuat oleh lembaga tertinggi di bidang kesehatan dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Dalam Permenkes No 19 Tahun 2014 ini diatur tentang lembaga formal yang terlibat yaitu FKTP, SKPD dan Kemenkes yang melaksanakan kebijakan publik ini secara berjenjang di tingkat Pemerintah Daerah.
- Permenkes No 19 Tahun 2014, juga mengatur tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaannya, FKTP dibina oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Pengawasannya oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Perundang-undangan.

2) Model Kelompok

Kontributor utama pada model pendekatan kelompok adalah Arthur Bentley (1908), David Truman (1951), dan Earl Latham (1952), menurut mereka teori kelompok ini menggaris bawahi bahwa kelompok – kelompok adalah the ultimate real of politics.

Secara garis besar pendekatan kelompok menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok–kelompok dalam masyarakat. Suatu kelompok merupakan kumpulan individu–individu yang memiliki ikatan kepentingan dan tingkah laku yang sama. Mereka mempertahankan dan membela tujuan kelompok dan bersaing dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik, kelompok–kelompok akan mempergunakan berbagai macam cara seperti uang, prestise, jabatan, informasi, perhatian media massa, kepemimpinan dan keahlian–keahlian dalam berpolitik.

Teori pendekatan kelompok mengatakan bahwa seorang individu hanya dapat dikatakan penting apabila ia merupakan partisan atau wakil dari kelompok tertentu. Individu– individu ini saling mengikatkan diri secara formal dan non formal untuk tujuan yang sama.

Dalam pendekatan kelompok keseimbangan terbaik yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok–kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda–beda. Kekuatan kelompok dipengaruhi oleh jumlah anggotanya, harta kekayaan, kekuatan dan kebaikan organisasi kelompoknya, akses hubungan dengan penentu kebijakan dan kohesi internal pada anggotanya.

Pendekatan Model Kelompok dalam menjelaskan Kebijakan Publik Permenkes No. 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kelompok–kelompok yang dianggap memiliki kepentingan terhadap kebijakan Permenkes No. 19 Tahun 2014 antara lain kelompok Tenaga Kesehatan di FKTP sebagai Kelompok yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan ini.
- Dan kelompok penerima yang terdiri dari Tenaga Medis, Paramedis, Non Medis dan Non Paramedis, serta Tenaga Administrasi yang ada di FKTP milik Pemerintah Daerah. Sedangkan Kelompok yang lain adalah Kelompok Pembuat Kebijakan yang terdiri dari Menteri Kesehatan, Pimpinan Daerah dan Pimpinan SKPD Dinas Kesehatan.

- Kelompok–kelompok yang ada memiliki kepentingan yang berbeda–beda dalam penentuan suatu kebijakan, dalam permenkes No. 19 Tahun 2014, kelompok Pelaksana memiliki kepentingan berupa penjelasan mengenai besaran proporsi jasa pelayanan yang diterima dan ketentuan lain yang merupakan variabel penentu besarnya jasa pelayanan dan biaya operasional yang akan mereka dapatkan dengan adanya kebijakan ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sedangkan kelompok yang lain yang membuat kebijakan ini memiliki kepentingan untuk mengatur proporsi jasa pelayanan dan biaya operasional menurut ukuran mereka sendiri, dan besarnya jasa pelayanan yang ditentukan dengan variabel yang mereka anggap sudah sesuai dengan beban kerja petugas yang ada di FKTP.
- Kelompok Pelaksana dan penerima Kebijakan (para Tenaga yang ada di FKTP) memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan Permenkes No. 19 Tahun 2014 ini karena jumlahnya yang lebih besar, merupakan gabungan dari beberapa kelompok profesional seperti IDI, PDGI, PERSAKMI, PPNI, IBI dll, sehingga pendapat mereka dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan ini, tetapi di pihak lain kelompok penentu kebijakan juga tak kalah kuat karena terdiri dari Lembaga – lembaga formal bidang kesehatan, memiliki kedekatan dengan penentu kebijakan no 1, serta kekuatan organisasi serta kebaikan organisasinya.

3) Model Penambahan (Incremental Model)

Model inkremental lahir dari kritik terhadap model rasional komprehensif, yang berusaha menutupi kekurangan yang ada pada model pendahulunya. Menurut model ini, kebijakan atau keputusan selalu bersifat serial, fragmentary dan sebagian besar remedial. Kebijakan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Dalam kondisi seperti ini keputusan yang bijaksana akan lebih mudah dicapai kesepakatan, apalagi jika keputusan menyangkut perubahan program – program yang sudah pernah ada.

Pendekatan inkremental dianggap paling tepat dalam membuat kebijakan dalam rangka mengurangi konflik dan memelihara stabilitas. Pendekatan model inkremental kadang menjadi pilihan yang tepat manakala berkenaan dengan kondisi – kondisi seperti : Terbatasnya waktu, informasi atau dana untuk melakukan investigasi semua alternatif, Kurangnya dana yang harus di investasi untuk mencari dan menentukan kebijakan yang benar – benar baru, Alasan politik, dimana

masyarakat cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang pernah ada sebelumnya, Pengambil kebijakan adalah orang-orang yang pragmatis, kebijakan diambil berdasarkan alasan dapat dilaksanakan bukan dengan pertimbangan kebijakan yang ideal.

Penjelasan Model Inkremental terhadap Kebijakan Permenkes No. 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan itu bersifat remedial, ini dapat dijelaskan dalam permenkes No. 19 Tahun 2014 bahwa sebelumnya telah ada model penggunaan dana Kapitasi bidang Kesehatan di Indonesia, seperti pada program PKPS-BBM tahun 2002-2005 yang tertuang dalam UU nomor 40 Tahun 2004, Penggunaan Dana Kapitasi Jamkesda Tahun 2012 dan lain sebagainya.
- Kebijakan Formal bersifat Serial, ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun yang sama telah dibuat kebijakan Permenkes no. 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi JKN pada FKTP, tetapi belum diatur sedemikian rupa sehingga dibuatlah permenkes No. 19 tahun 2014 sebagai kebijakan untuk menjelaskan pokok pikiran yang ada pada permenkes sebelumnya.
- Pengambil kebijakan adalah orang – orang pragmatis dimana kebijakan diambil berdasarkan alasan dapat dilaksanakan bukan pada pertimbangan kebijakan yang ideal, terlihat dari proporsi pembagian pembayaran Jasa Pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang hanya menetapkan sekurang-kurang 60% dari penerimaan dana kapitasi, ini menimbulkan adanya perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya dalam menetapkan proporsi tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan, akan lebih baik jika pembuat keputusan menetapkan jumlah yang sama.
- Pembuat kebijakan tidak terlebih dahulu melakukan riset atau ujicoba pelaksanaan kebijakan ini pada daerah percobaan karena keterbatasan waktu dan anggaran, sehingga variabel – variabel penghitungan jasa pelayanan hanya terpaku pada variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan variabel kehadiran sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan jasa pelayanan yang diterima di tingkat pelaksana (Tenaga di FKTP) sebagai contoh tenaga medis (dokter) diberi nilai 150, dan tenaga Ners sebesar 100, sehingga pada perhitungan selanjutnya

menimbulkan kecemburuan karena besaran jasa yang diterima tidak jauh berbeda sedangkan resiko pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima.

4) Model elite (Kebijakan Publik sebagai Preferensi Elite)

Di sebagian besar negara berkembang atau negara dunia ketiga yang mendasarkan pada sistem otoriter, seperti Kuba, Korea utara dan Indonesia pada era Orde Baru, model elite merupakan model yang cukup baik dalam menjelaskan pembentukan kebijakan publik pada negara tersebut.

Teori elite mengatakan bahwa semua lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya dikuasai dan didominasi oleh sekelompok individu yang sangat kuat, yang memanipulasi kebijakan publik untuk kepentingan mereka. Seringkali dikatakan bahwa kebijakan publik merefleksikan tuntutan dan keinginan rakyat, tetapi itu hanya isapan jempol dan mitos yang berkembang karena sebenarnya merefleksikan keinginan kelompok elit.

Menurut Thomas R. Dye, teori elite mengatakan bahwa rakyat mempunyai perilaku apatis dan tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan publik. Kelompok elite yang membentuk opini masyarakat luas, bukan masyarakat luas yang membentuk opini kelompok elite. Dalam pendekatan elite, kelompok birokrat atau pejabat publik hanya sekadar menjalankan kebijakan – kebijakan yang diputuskan oleh kelompok elite. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, dari para kelompok elite ke kelompok masyarakat luas.

Penjelasan Model Elite terhadap Kebijakan Permenkes No. 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kelompok elite mendominasi lembaga pemerintah dan lembaga politik sehingga dapat memanipulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dalam kasus kebijakan Permenkes No. 19 tahun 2014, terindikasi elite yang berkepentingan terhadap penentuan kebijakan yang tercantum dalam permenkes No. 19 tahun 2014. Elite penentu kebijakan yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Jajarannya membuat kebijakan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak banyak elite – elite lain yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkannya.

Kelompok birokrat atau pejabat publik hanya sekadar menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh kelompok elite, hal ini

dapat dijelaskan pada permenkes No. 19 Tahun 2014 bahwa Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya menjalankan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan selanjutnya Para Kepala FKTP di Pemerintah Daerah hanya menjalankan Keputusan yang dibuat oleh Kepala SKPD di Wilayahnya yang bekerja sama dengan Kepala Pemerintahan di daerah tersebut.

Kebijakan menurut Model Elite mengalir dari atas ke bawah, dari kelompok elite ke kelompok pelaksana atau masyarakat luas, ini dapat dijelaskan bahwa Permenkes No. 19 Tahun 2014 ini dibuat dan ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan turunkan ke pelaksana kebijakan di tingkat daerah kemudian dilaksanakan langsung di tingkat FKTP milik pemerintah daerah tersebut.

C. Kesimpulan

Dalam menjelaskan kebijakan publik menurut beberapa model diatas, tidak dapat ditentukan model yang terbaik atau model yang keluar sebagai pemenang dalam menjelaskan sebuah kebijakan publik. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara model yang satu dengan model yang lainnya.

Model hanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kebijakan berdasarkan model yang terpilih untuk memahami kebijakan tersebut berdasarkan sudut pandang model yang digunakan, karena tanpa menggunakan model akan sangat sulit untuk menjelaskan suatu kebijakan publik.

D. Evaluasi Pemahaman

1. Bandingkan secara singkat kelebihan model analisis kebijakan menurut Permenkes No. 19 Tahun 2014!
2. Mengapa kepercayaan terhadap disiplin tradisional cenderung menghindari pendekatan evaluatif dan normatif dalam suatu penelitian?
3. Apakah yang dimaksud dengan analisis retrospektif? Jelaskan kekurangan dan kelebihan analisis tersebut!
4. Analisis kebijakan merupakan awal dari sebuah proses untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan hasilnya. Untuk mencapai tujuan AKP tersebut, AKP harus dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip akademik yang sifatnya ilmiah, bukan hanya berdasarkan intuisi. Berikan argumen yang substantif atas pernyataan tersebut!
5. Jelaskan tentang kelebihan pendekatan model kelompok dan berikan contoh penerapan kebijakan menggunakan pendekatan model tersebut!

XV

STUDI KASUS: KEBIJAKAN, PRAKTIK, DAN PENANGANANNYA

A. Pengertian Studi Kasus

Istilah studi kasus sering dijumpai dan sangat familiar di bidang akademik. Studi kasus ini sering digunakan dalam penelitian sebagai metode untuk melihat suatu fenomena dan termasuk di dalam jenis penelitian kualitatif.



Gambar 58; Jenis penelitian kualitatif

Berikut ini adalah pengertian studi kasus berdasarkan beberapa ahli di antaranya:

1. Yin (1996) menjabarkan studi kasus sebagai suatu proses pencarian pengetahuan yang empiris yang berguna untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi.
2. W.S. Winkel dan Sri Hastuti (2006) melihat studi kasus dari sisi bimbingan pendidikan dan konseling siswa yang mempelajari

keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam dan menyeluruh. Pada studi kasus ini dilakukan oleh guru atau pendidik untuk memahami siswa yang bersangkutan sebagai individu dengan lebih mendalam sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk membantu perkembangan siswa tersebut.

3. Susilo Rahardjo dan Gudnanto (2011) menjelaskan studi kasus sebagai metode yang digunakan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Gunanya adalah agar peneliti bisa mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai individu yang diteliti, berikut masalah yang dihadapi supaya dapat terselesaikan sehingga dapat membuat individu berkembang dengan lebih baik.
4. Stake (2006) menyebutkan studi kasus sebagai sebuah metode penelitian yang mempunyai tujuan yang penting dalam penelitian serta berguna dalam mengungkapkan keunikan dan kekhasan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang tengah diamati atau diobservasi yang mana kasus tersebut yang menjadi penyebab penelitian terjadi dan dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian studi kasus perlu dilakukan penggalian informasi dan juga analisis yang mendalam mengenai segala hal yang berhubungan dengan kasus, baik berupa sifat, sejarah, kegiatan, keadaan lingkungan, dan masih banyak lainnya.

B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang mempunyai sifat umum dan berlaku kepada semua lapisan masyarakat. Dengan kebijakan yang dibuat pemerintah ini, semua hal diatur dan agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan lancar, maka dianjurkan bagi orang-orang untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini termasuk di dalamnya salah satunya adalah kebijakan pendidikan.

1. Fungsi Kebijakan

Kebijakan dapat mempengaruhi dan menentukan perubahan, pengembangan dan juga restrukturisasi dalam suatu organisasi. Jika memang benar-benar ada perubahan yang signifikan menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau pemerintah tersebut berjalan dengan baik dan benar. Yang menjadi inti atau hakikat utama dari kebijakan adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Kebijakan biasanya diformat dalam catatan dan tulisan yang dijadikan pedoman

oleh mereka yang dianggap pimpinan, staf, dan personal suatu organisasi atau pemerintah, berkaitan dengan interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan tidak serta-merta terbentuk, tetapi harus melalui proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dapat diartikan sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan mempunyai hubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Dalam proses pembuatan keputusannya harus memperhatikan faktor-faktor, seperti di antaranya:

- (1) Lingkungan eksternal
- (2) Input (masukan)
- (3) Proses (transformasi)
- (4) Output (keluaran)
- (5) Feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Sedangkan, berdasarkan faktor-faktor tersebut, kebijakan dipandang berfungsi sebagai:

- (1) Pedoman untuk bertindak
- (2) Pembatas perilaku
- (3) Bantuan bagi pengambil keputusan



Gambar 59: Contoh fungsi kebijakan pendidikan: status sekolah 'favorit'

2. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kebijakan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk:

- (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia demi menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi melalui peningkatan anggaran pendidikan yang berarti.
- (2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- (3) Melakukan pembaruan sistem pendidikan terutama termasuk di dalamnya mengenai pembaharuan kurikulum yang dapat berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, dan juga diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- (4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- (5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- (6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, serta menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

- (8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.



Gambar 60; Contoh arah kebijakan: zonasi pendidikan

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik, seperti:

- (1) Memiliki tujuan pendidikan
Tujuan pendidikan harus jelas dan terarah yang gunanya untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- (2) Memenuhi aspek legal-formal
Kebijakan pendidikan harus secara sah diakui oleh suatu wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat konstitusional yang sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah tertentu sehingga kebijakan tersebut dapat dinyatakan sah dan resmi. Dengan begitu, maka kebijakan pendidikan tersebut akan mempunyai legitimasi yang kuat.

- (3) Memiliki konsep operasional
Sebagai panduan yang sifatnya umum, kebijakan pendidikan harus mempunyai manfaat operasional sehingga dapat diimplementasikan.
- (4) Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan tidak boleh dibuat oleh sembarang orang, tetapi mereka yang ahli di bidangnya serta mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Hal ini agar tidak menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan juga lingkungan di luar pendidikan tersebut. Unsur-unsur paling minimal dalam membuat kebijakan pendidikan adalah seperti para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang dinilai berkaitan langsung dengan pendidikan.
- (5) Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan mana yang dinilai tidak sesuai dan harus diperbaiki, atau mana yang dapat dipertahankan dan dikembangkan. Dengan karakteristik yang memungkinkan adanya evaluasi maka kebijakan pendidikan tidak akan berhenti pada satu kondisi saja, tetapi dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
- (6) Mempunyai sistematika
Kebijakan pendidikan adalah sebuah sistem. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan juga mempunyai sistematika yang menyangkut seluruh aspek objek yang akan diatur. Sistematika kebijakan pendidikan dituntut atau diharapkan mempunyai sifat-sifat efektif, efisien, dan sustainable. Sistematika harus benar-benar diperhatikan dengan cermat agar tidak ada cacat hukum ketika kelak sudah diberlakukan menjadi sebenar-benarnya kebijakan. Sementara, kebijakan pendidikan juga harus dapat berjalan bersesuaian atau berdampingan dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, serta kebijakan pendidikan lain yang kemungkinan berada di atas atau di bawahnya.

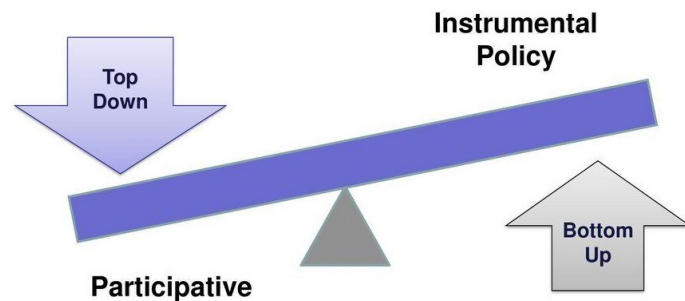
C. Model-Model Proses Pengembangan Kebijakan

Ada banyak model yang bisa diikuti dalam pengembangan kebijakan. Beberapa ahli telah mengemukakan metode atau model yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan. Misalnya, C. Lindblom

dan D.K. Cohen telah membedakan dua macam metode pengembangan kebijakan yaitu model syynotic dan incremental (Madjid, 2018):

- (1) Model syynotic: didasarkan pada satu otoritas perencanaan pusat tunggal untuk keseluruhan masyarakat, yang menggabungkan kontrol ekonomi, politik, dan sosial ke dalam satu proses perencanaan terpadu sehingga tidak diperlukan adanya interaksi berbagai pihak.
- (2) Metode incremental: melihat bahwa interaksi merupakan hal yang sangat penting dan tidak mengandalkan analisis yang menyeluruh pada suatu persoalan yang digunakan untuk membentuk sebuah patokan penyelesaian masalah. Metode ini membuat kebijakan yang dibuat sifatnya tidak tentatif atau sementara sehingga dapat diperbaiki seiring dengan dinamika permasalahan yang sedang terjadi.
Sementara itu, pendekatan yang secara luas digunakan untuk implementasi kebijakan dan perubahannya meliputi pendekatan yang disebut dengan *top-down* dan *bottom-up*:
 - (1) *Top-down*: perancang kebijakan sebagai aktor sentral atau utama dan memusatkan perhatian mereka pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi di tingkat pusat. Kekuatan dari pendekatan ini, salah satunya adalah usaha pengembangan sarana kebijakan yang bersifat umum dan adanya pola perilaku yang dapat dikenali secara konsisten di berbagai wilayah kebijakan. Kelemahan pendekatan ini adalah mengambil perundang-undangan sebagai titik awal dan karenanya tidak mempertimbangkan pentingnya tindakan sebelumnya.
 - (2) *Bottom-up*: aktor sentral dari pendekatan ini adalah kelompok sasaran dan penyampai layanan karena kebijakan dibuat di tingkat lokal. Manfaat dari pendekatan bottom-up ini adalah fokusnya lebih kepada aktor-aktor terpusat yang merancang dan melaksanakan program pemerintah sehingga faktor kontekstual dalam lingkungan pelaksana bersifat penting. Tidak ada saran yang preskriptif yang dihasilkan dari pendekatan ini, melainkan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyulitkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kritik untuk pendekatan bottom-up utamanya adalah tentang pengendalian kebijakan harus dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab serta berdaulat melalui perwakilan terpilih mereka, sedangkan wewenang pemberi layanan lokal tidak demikian,

serta pendekatan ini cenderung terlalu menekankan tingkat otonomi daerah.



Gambar 61; Pendekatan Top Down dan Bottom Up

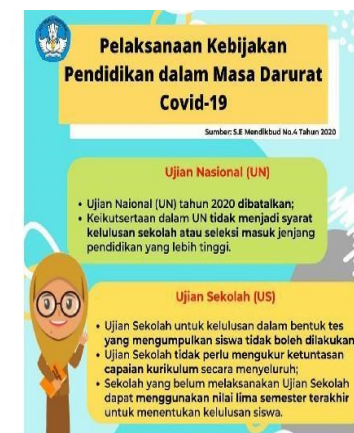
D. Praktik Kebijakan Pendidikan

Bagian integral dari pembentukan kebijakan adalah implementasi yang mana menurut Association for the Development of African Education adalah praktik dari kebijakan itu sendiri. Pada tahapan implementasi ini dapat dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap semua kebijakan dalam rangka mengambil pelajaran dari penerapan kebijakan tersebut.

Praktik atau implementasi kebijakan pendidikan dirumuskan sesuai yang dikemukakan oleh Haddad & Demsky (1995) di antaranya sebagai berikut:

- (1) Menganalisis situasi yang terjadi: aspek yang meliputi konteks sosial, politik, ekonomi, demografi, kebudayaan, dan permasalahan sosial berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan hingga proses implementasinya pada sektor pendidikan sehingga harus dipertimbangkan.
- (2) Membuat beberapa pilihan kebijakan: ketika ada permasalahan maka kebijakan baru dibuat dan dapat dilakukan dengan beberapa model digabung tergantung pada situasinya.
- (3) Mengevaluasi pilihan kebijakan: aspek-aspek yang digunakan untuk evaluasi adalah desirability (kemungkinan), affordability (keterjangkauan), dan feasibility (kelayakan).
- (4) Membuat keputusan tentang kebijakan: menganalisis seberapa jauh atau radikal perbedaan antara kebijakan baru dengan yang lama, konsistensi dengan kebijakan sektor-sektor lain dan apakah kebijakan tersebut bersifat operasional.
- (5) Merencanakan penerapan kebijakan

- (6) Menilai dampak penerapan kebijakan: mempertimbangkan apa saja dampak dari penerapan kebijakan tersebut, apakah dampak tersebut sesuai dengan harapan, apakah perubahan dapat dijangkau, dan lain sebagainya.
- (7) Menentukan siklus kebijakan selanjutnya: biasanya terjadi setelah penerapan kebijakan sebelumnya sudah selesai dan hasilnya sudah tampak sehingga mengarahkan akan kemungkinan adanya siklus pembentukan kebijakan yang baru. Sebagai wujud pembaharuan manajemen di satuan pendidikan, implementasi kebijakan juga mencakup beberapa model:
 - (1) Broad base education (BBE), life skills, dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
 - (2) Manajemen berbasis sekolah (MBS)
 - (3) Penguatan pendidikan luar sekolah (PLS) berbasis pendidikan PKBM dan PKBM masyarakat
 - (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Tahun 2006
 - (5) Perguruan tinggi badan hukum milik negara (BHM) menuju badan layanan umum (BLU)
 - (6) Pengembangan model profesi kependidikan
 - (7) Kebijakan ujian nasional (UN)
 - (8) Antisipasi penolakan pembaruan
 - (9) Kebijakan sertifikasi guru dan dosen
 - (10) Bantuan operasional sekolah (BOS)
 - (11) Pendidikan karakter (Kurikulum 2010)
 - (12) Perubahan IKIP menjadi universitas
 - (13) Kurikulum berbasis sistemik integratif 2013, dll.



Gambar 62: Praktik Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan: Semasa Pandemi Covid-19

E. Hasil dan Penanganan

Hasil dari kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Didalamnya juga terdapat solusi penanganan dari apa yang dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Globalisasi

Di era sekarang ini globalisasi bukanlah suatu hal yang asing. Globalisasi mempercepat dan mempermudah segala hal. Orang-orang semakin mudah untuk bergerak dengan cepat. Begitu pula halnya dengan pergerakan layanan, modal, barang, pemikiran dan pengetahuan antar negara di seluruh dunia. Dengan globalisasi batasan-batasan di seluruh dunia, antar negara sudah semakin mengabur dan menjadi lebih mudah dilalui dengan adanya teknologi yang menjadi penghubungnya.



Gambar 63; Teknologi sebagai penghubung pendidikan secara globalisasi

Hasil kebijakan akibat dari globalisasi adalah kebijakan pendidikan yang diinternasionalkan karena efek dari dominasi ekonomi global terhadap setiap negara. Kebijakan pendidikan di era sekarang dibuat, dibentuk, dan diterapkan dalam konteks global. Dalam konteks ini, banyak negara yang membuat prioritas untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi terhadap negara lain, termasuk dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.

Tentu saja diperlukan penanganan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang mempengaruhi kebijakan ini berupa:

- (1) Menerapkan dan memperbaiki standar pendidikan dasar
- (2) Meningkatkan konsistensi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan
- (3) Lebih memperhatikan mata pelajaran yang bersifat ilmiah
- (4) Memperkenalkan pengajaran komputer di sekolah sebagai pelajaran dasar
- (5) Meningkatkan pembelajaran berbahasa Inggris, dll.

2. Pengaruh Kondisi Negara Berkembang terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan

Kontrol pengeluaran serta proses yang dinilai panjang untuk menyetujui pengeluaran di negara berkembang telah menyulitkan kementerian pendidikan untuk segera menanggapi keadaan yang tengah mengalami perubahan. Karena inilah pelaksanaan proyek reformasi pendidikan yang utamanya membutuhkan dana kontingensi dalam jumlah besar terhambat (Rondinelli, Middleton, & Verspoor, 1990). Penanganannya adalah dengan menentukan prioritas yang mana yang harus diutamakan terlebih dulu. Tetapi, karena adanya banyak permasalahan yang terjadi dalam waktu bersamaan menyebabkan kesulitan untuk memenuhi ini.



Gambar 64: Gambaran pendidikan di negara berkembang

3. Pengaruh Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan aparatur negara yang terlibat di dalam pembentukan dan penerapan kebijakan pendidikan berpengaruh sangat besar. Diperlukan aparatur- aparatur negara yang mampu menerapkan kebijakan pendidikan karena beberapa negara sudah gagal untuk mewujudkan kebijakan itu akibat dari perilaku tidak etis mereka. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Nigeria. Perilaku tidak etis

tersebut adalah korupsi atau penyalahgunaan dana implementasi program, termasuk juga permintaan uang suap untuk pendaftaran siswa ke sekolah tertentu, dan hingga penyalahgunaan fasilitas. Oleh karena itu, penanganan dari kasus ini adalah dengan menyelidiki lebih mendalam jika kebijakan-kebijakan pendidikan ingin berhasil diterapkan. Korupsi adalah sikap yang buruk yang dapat mempengaruhi infrastruktur, pendanaan, standar pendidikan, hingga ke setiap sektor masyarakat secara umum.

F. Evaluasi Pemahaman

1. Dalam dunia akademik, studi kasus adalah kata yang terbilang familiar. Bagaimanakah pengertian dari studi kasus dari berbagai sudut pandang ahli? Jelaskan!
2. Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang mempunyai sifat umum dan berlaku kepada semua lapisan masyarakat. Termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Sebutkan dan jelaskan mengenai arah kebijakan pendidikan dan karakteristik kebijakan pendidikan di Indonesia!
3. Ada banyak model yang bisa diikuti dalam pengembangan kebijakan. Beberapa ahli telah mengemukakan metode atau model yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan. Misalnya, C. Lindblom dan D.K. Cohen telah membedakan dua macam metode pengembangan kebijakan. Terangkan kebijakan yang sudah dibuat oleh C. Lindblom dan D.K. Cohen menggunakan bahasa saudara sendiri!
4. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Bagaimanakah definisi keduanya? Terangkan dan beri beberapa contoh.
5. Hasil dari kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Sebutkan faktor-faktor tersebut dan berikan penjelasan tentang hasil serta penanganannya!

XVI

EVALUASI PEMAHAMAN AKHIR SEMESTER

A. Soal pilihan ganda

1. Kebijakan hendaknya merealisasikan beberapa kriteria kebutuhan dalam membantu mencapai tujuan manusia yaitu, kecuali:
 - a. Kekuasaan (*power*)
 - b. Kesejahteraan (*well-being*)
 - c. Kejujuran (*rectitude*)
 - d. Kepastian (*assuredness*)
2. Diantara fungsi kebijakan berikut, manakah yang menyatakan bahwa kebijakan memberikan pemahaman terhadap target kebijakan
 - a. Kebijakan sebagai penegas
 - b. Kebijakan sebagai keputusan
 - c. Kebijakan sebagai pengaruh
 - d. Kebijakan sebagai output
3. Manakah diantara berikut ini yang merupakan kriteria dari sebuah kebijakan pendidikan:
 - a. Memiliki tujuan yang jelas
 - b. Memenuhi aspek legal-formal
 - c. Memiliki sistematika
 - d. Semua jawaban benar
4. Berikut ini merupakan contoh dari sebuah kebijakan, kecuali:
 - a. Undang-undang
 - b. Keputusan Presiden (Keppres)
 - c. Pedoman Pelaksanaan
 - d. Peraturan Daerah (Perda)
5. Sebuah kebijakan memiliki sebanyak lima komponen penyusunnya, yaitu *goal, plans, program, decision, and effect*. Sedangkan sesuai dengan tataran dan jangkauannya, kebijakan memiliki:

- a. Lima
 - b. Empat
 - c. Enam
 - d. Tiga
6. Sebuah inovasi kebijakan pendidikan terjadi atau dibutuhkan karena adanya beberapa faktor berikut ini, kecuali:
 - a. Perkembangan IPTEK
 - b. Pertambahan penduduk yang eksplosif
 - c. Mutu pendidikan yang masih kurang
 - d. Kewajiban pemimpin setiap periode
 7. Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:
 - a. PP No. 32 Tahun 2013
 - b. PP No. 19 Tahun 2005
 - c. PP No. 8 Tahun 2012
 - d. PP No. 32 Tahun 2009
 8. Standar Satuan Pendidikan merupakan aturan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sistem pendidikan, yang terdiri dari delapan standar acuan atas berikut ini, kecuali:
 - a. Standar isi, proses, kompetensi, pendidik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan standar penilaian
 - b. Standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian
 - c. Standar isi, kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
 - d. Standar isi, proses, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian
 9. Ruang lingkup materi pendidikan yang dirumuskan dalam standar isi sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan memiliki kriteria sebagai berikut, kecuali:
 - a. Muatan wajib
 - b. Konsep keilmuan
 - c. Beban belajar
 - d. Karakteristik satuan dan program pendidikan
 10. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu inovasi kebijakan pendidikan yang memiliki latar belakang sebagai berikut ini, kecuali:
 - a. Solusi menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal
 - b. Jawaban atas tuntutan perkembangan zaman
 - c. Menyesuaikan antara apa yang menjadi harapan dengan apa yang dihasilkan
 - d. Sebagai bagian dari otoritas penguasa
 11. Sebagai sebuah instrumen sosial budaya, peran pendidikan dalam hubungannya terhadap sosial budaya dilihat dari berbagai fungsi berikut ini, kecuali:
 - a. Fungsi kepribadian
 - b. Fungsi transmisi kebudayaan
 - c. Fungsi proses pembudayaan
 - d. Fungsi Pencerahan
 12. Pendidikan dasar merupakan paspor bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan dasar menjadi sebuah jenjang pendidikan wajib (compulsory) berdasar kepada pengertian terhadap universal education, yaitu:
 - a. Pendidikan sebagai sebuah kebutuhan umum
 - b. Pendidikan berdasarkan kebutuhan universal
 - c. Aspirasi pendidikan oleh para orang tua untuk anak-anak usia sekolah
 - d. Pendidikan sebagai tuntutan global
 13. Program wajib belajar 9 tahun di Indonesia membutuhkan sarana penunjang menuntaskan tujuan yang dikehendaki, untuk itu pemerintah membentuk satuan pendidikan yang terdiri atas 10 wahana dan 4 rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, kecuali:
 - a. Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong.
 - b. Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu.
 - c. Rumpun Pendidikan Informal
 - d. Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

14. Jenjang pendidikan menengah di Indonesia sebagai lanjutan dari program pendidikan dasar dengan satuan pendidikan sebagai berikut, kecuali:
- Sekolah Menengah Atas
 - Sekolah Menengah Kejuruan
 - Program Pendidikan Luar Sekolah
 - Madrasah Aliyah
15. Berikut ini pengertian studi kasus berdasarkan Yin...
- mempelajari keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam dan menyeluruh yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk memahami siswa yang bersangkutan sebagai individu dengan lebih mendalam sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk membantu perkembangan siswa tersebut
 - suatu proses pencarian pengetahuan yang empiris yang berguna untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.
 - metode yang digunakan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif.
 - metode penelitian yang mempunyai tujuan yang penting dalam penelitian serta berguna dalam mengungkapkan keunikan dan kekhasan karakteristik yang terdapat dalam kasus yang tengah diamati atau diobservasi yang mana kasus tersebut yang menjadi penyebab penelitian terjadi dan dilakukan.
16. Dalam proses pembuatan keputusan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini, kecuali...
- Lingkungan eksternal
 - Input (masukan)
 - Proses (transformasi)
 - Unggahan media sosial
17. Apakah yang mendasari model syynotic?
- Otoritas perencanaan pusat tunggal untuk keseluruhan masyarakat
 - Otoritas yang hanya mengutamakan ekonomi
 - Kegiatan politik yang condong ke yang menguntungkan
 - Hubungan sosial yang mengutamakan koneksi
18. Metode incremental dapat dipahami sebagai berikut, kecuali...
- Interaksi merupakan hal yang penting
 - Tidak mengandalkan analisis yang menyeluruh pada suatu persoalan
 - Kebijakan yang dibuat tidak tentatif
 - Pusat tunggal sebagai otoritas
19. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya kebijakan pendidikan, salah satunya adalah...
- Masyarakat yang pasif
 - Globalisasi
 - Mata pelajaran
 - Kegiatan di luar sekolah
20. Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar memiliki empat konsep pokok sebagai berikut, kecuali:
- USBN
 - Penyederhanaan RPP
 - Sister Campus
 - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi

B. Soal essay

- Jelaskan pengertian kebijakan pendidikan di berbagai tingkat pendidikan!
- Sebutkan beberapa contoh pendekatan dan model analisis permasalahan pendidikan!
- Jelaskan hubungan pendidikan dan kebijakan politik yang berlaku di Indonesia saat ini!
- Sebutkan beberapa jenis kebijakan pendidikan di abad 21!
- Berikan contoh permasalahan dalam dunia pendidikan pada abad 21!
- Sebutkan dan jelaskan pendekatan dan model yang digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan!
- Apa saja kekurangan dan kelebihan dari berbagai pendekatan dan model analisis kebijakan? Sebutkan 3 contoh!
- Berikan satu contoh kasus analisis kebijakan pendidikan dan jelaskan !

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Bahan Bacaan

- , 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Anzishan, Syafaruddin. 2004. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, Jakarta: Grasindo
- Ari Fitriani. 2017. “Inovasi Pendidikan Islam: Integrasi Agama dan Sains” dalam *Proceedings Books International Conference on Guidance and Counseling 2017* (halaman 343-354). Pontianak: Islamic Guidance and Counseling Department Ushuluddin, Adab and Dakwah Faculty Pontianak Islamic State Institute.
- Arwildayanto, Suling, A., Sumar, W.T. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV Cendekia Press.
- Azyumardi Azra. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Baedhowi, 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Konsep Dasar dan Implementasi, Semarang: Penerbit Pelita Insani.
- Bertrand Russell. 1993. Pendidikan dan Tatanan Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darmaningtyas. 2004. Pendidikan Yang Memiskinkan. Yogyakarta: Galang Press.
- Djohar. 2003. Pendidikan Strategik, Alternatif Untuk Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: LESFI.
- Driyarkara, 1980. Tentang pendidikan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fullan, Michael G. 1991. The New Meaning of Educational Change, Columbia University, NY: Teacher College Press.
- Giroux, Henry A. 1983, Theory & Resistance in Education, Massachusetts: Bergin & Garvey Publishers, Inc.
- Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey: Princeton University Press.

Hamidjojo, Santoso.S. 1974. Inovasi Pendidikan: Meninjau Beberapa Kerangka Analisis Untuk Penelitian dan Pelaksanaannya, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung: IKIP Bandung.

Hussin, Sufean (Ed.). 2002. Revitalising Education Some Prospective Policy Innovation, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD.

Ibrahim. 1988. Inovasi Pendidikan. Jakarta: PPPPTK, Dirjen Depdikbud.

Ihsan, Fuad. 2003. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Ivan Illich, 1999. Deschooling Society

Karabel, Jerome dan A.H. Halsey (ed.), 1977. Power and Ideology in Education, New York: Oxford University Press

Karsidi, Ravik.2005. Sosiologi Pendidikan, Surakarta: UNS Press dan LPP UNS

Krismartini. 2019. Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar). Semarang: Undip Press.

Kumar, Krishna. 2005. Political Agenda of Education, London: Sage Publication.

Markum, M. Enoch. 2007. Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Penerbit UI

Mulyasa. 2014. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.

Mussafah, Jejen. 2016. Analisis Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.

Nicholls, A. 1983. Managing Educational Innovations. London: George Allen & Unwin.

Paulo Freire .1984. Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan, Jakarta: Gramedia.

Suaedi. 2013. Metode Kuantitatif Untuk Analisis Kebijakan. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Tilaar, HAR. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, Magelang: Indonesia Tera.

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang). Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.

Walter Feinberg dan Jonas F. Soltis.1985. School and Society, New York: Teacher College Press Columbia University.

Wen, Sayling. 2003. Future of Education (Masa Depan Pendidikan), Alih bahasa Arfin Saputra dkk., Batam: Lucky Publishers

Sumber Peraturan, Undang-Undang dan Siaran Pers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

SIARAN PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Laman: www.kemdikbud.go.id

Merdeka Belajar. SEKRETARIAT GTK. Direktorat jenderal Guru dan Tenaga kependidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan

Sumber Elektronik

Afifah, N. 2015. Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek pembelajaran). Elementary I (1): 41-47.

Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. **Jurnal MEDTEK**, Volume 2, Nomor 1: 1-13.

Ciwitha, Rahmilya. 2019. “Permasalahan dalam Dunia Pendidikan”, <https://rahmilyaciwitha.wordpress.com/2019/05/19/permasalahan-dalam-bidang-pendidikan/>, diakses pada 10 Juli 2020 pukul 16:41.

Fauzi, Yulia. 2015. “Menganalisis Masalah Pendidikan Dan Memperbaikinya Dengan Menggunakan Pendekatan Sistem”, <https://prezi.com/g5mkisvlnos/menganalisis-masalah-pendidikan-dan-memperbaikinya-dengan-me/>, diakses pada 30 Juni 2020 pukul 10:00.

Fidati, Rindu. 2015. “Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Psikologi”, <https://rindufidati.wordpress.com/ilmu-pendidikan-islam-dengan-pendekatan-psikologi/>, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 13:15.

Hartono, Y., 2016. Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). **JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1: 35-45.**

Hasanan, Nur. 2010. “Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Model Spradley/Studi Etnografi”, <https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif-model-spradley-studi-etnografi/>, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 15:22

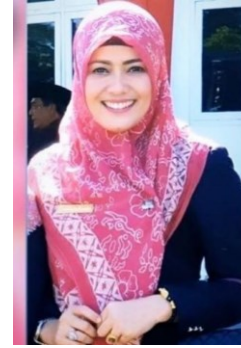
Ibda, Hamidullah. 2014. “Makalah Analisis Masalah-Masalah Pendidikan di Indonesia”,

- <http://histudycentre.blogspot.com/2014/05/makalah-analisis-masalah-masalah.html>, diakses pada 30 Juni 2020 pukul 9:00.
- Indiantoro, Alfalachu. 2017. "Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Dimensi Pendidikan Hukum" dalam *Justitia Jurnal Hukum Volume 1* (halaman 267-278). Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, https://www.researchgate.net/publication/323009085_Perubahan_Sistem_Kebijakan_Pendidikan_Tinggi_Dalam_Dimensi_Pendidikan_Hukum, diakses pada 30 Juni 2020 pukul 10:00.
- Luthfiyah, Fitwi. "Permasalahan Pendidikan Masa Kini", <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/permasalahan-pendidikan-masa-kini/>, diakses pada 5 Juli 2020 pukul 11:23.
- Masdin. 2009. "Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi", <https://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>, diakses pada 1 Juli 2020 pukul 08:00.
- NN. 2011. "Tinjauan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa (UUD 1945 sampai dengan UU Sisdiknas 20/2003)", <https://geoenviron.wordpress.com/2011/12/26/tinjauan-kebijakan-sistem-pendidikan-nasional-dari-masa-ke-masa-uud-1945-sampai-dengan-uu-sisdiknas-202003/>, diakses pada 1 Juli 2020 pukul 09:00.
- NN. 2019. "Pendekatan Analisis Nilai (Values Analysis Approach)", <https://www.trigonalmedia.com/2019/09/pendekatan-analisis-nilai.html>, diakses pada 3 Juli 2020 pukul 14:00.
- Nurlailan, dkk. 2017. "Analisis Kebijakan Pendidikan", https://www.academia.edu/35489664/Analisis_Kebijakan_Pendidikan, diakses pada 30 Juni 2020 pukul 8:00.
- Purnomo, Heri. 2020. "Beberapa Masalah Besar dalam Dunia Pendidikan di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa-masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all#>, diakses pada 10 Juli 2020 pukul 16:33.
- Rahardjo, Mudjia. 2014. "Penelitian Manajemen Pendidikan Islam: (Sebuah Pencarian Metodologik)", <https://www.uin-malang.ac.id/r/140401/penelitian-manajemen-pendidikan-islam-sebuah-pencarian-metodologik.html>, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 14:24.
- Rijal. 2016. "Kebijakan Pendidikan", <https://www.rijal09.com/2016/03/kebijakan-pendidikan.html>, diakses pada 29 Juni 2020 pukul 12:00.
- Salamadian. 2018. PENGERTIAN POLITIK: Konsep, Tujuan, Perilaku & Macam Macam Politik. <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/>
- Siswoyo, Rudi. 2013. "Analisis Filsafat dalam Masalah Pendidikan", http://rudisiswoyo89.blogspot.com/2013/11/analisis-filsafat-dalam-masalah_12.html, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 13:42.
- Supriadi. "Analisis Paradigma Pendidikan Indonesia Tuntutan Abad 21", <http://teoribagus.com/paradigma-pendidikan-indonesia-abad-21>, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 22:07.
- Suryani, Lilis. 2007. Analisis Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF - Vol. 2, No.1: 42-48.*
- Syamsi, Ibnu. 2010. Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Dalam Masyarakat. *Diklus 14 (1): 66-76*
- Tamil, Nurjannah. 2018. "Dinamika Pembelajaran Abad 21 bagi daerah Terpencil dan Berkembang", <https://www.kompasiana.com/nurjannahtamil/5c175d8512ae947182050bca/dinamika-pembelajaran-abad-21-bagi-daerah-terpencil-dan-berkembang?page=all>, diakses pada 4 Juli 2020 pukul 22:09.
- Togatorop, Jainal B. 2020. "Konteks Sejarah Analisis Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan Indonesia", https://www.researchgate.net/publication/339644251_KONTEKS_SEJARAH_ANALISIS_KEBIJAKAN_dan_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_INDONESIA, diakses pada 29 Juni 2020 pukul 11:00.
- U.S. Supardi. (). Arah Pendidikan di Indonesia dalam tataran Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Formatif 2 (2): 111-121. ISSN: 2088-351X*
- Usmanto. 2013. "Inovasi dan Perubahan dalam Pendidikan", <https://usmantobulim.wordpress.com/2013/12/17/inovasi-dan-perubahan-dalam-pendidikan/>, diakses pada 30 Juni 2020 pukul 14:00.
- Widianto, Edi. 2018. "Problematika Pendidikan Abad 21", <https://kumakukurakura.blogspot.com/2018/10/problematika-pendidikan-di-abad-21.html>, diakses pada 5 Juli 2020 pukul 11:49.

Sumber Sitasi

- Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. *Administrative Science Quarterly*, 1-25.
- Depdikbud. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, W. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Prentice-Hall.
- Dunn, W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Evans, R. N. (1971). *Vocational Education*. C.E. Merrill Publishing Company.
- Haddad, W., & Demsky, T. (1995). *Education Policy-Planning Process: An Applied Framework*. UNESCO: International Institute for Educational Planning.
- Jones, C. O. (2007). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Michigan: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kingdon, J. (1983). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: HarperCollins College Publisher.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lindblom, C. (1959). The Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 79-88.
- Madjid, D. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S., & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Rondinelli, D., Middleton, J., & Verspoor, A. (1990). *Planning Educational Reforms in Developing Countries: The Contingency Approach*. Durham: Duke University Press.
- Schippers, U., & Patriana, D. M. (1994). *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Angkasa.
- Stake, R. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. New York: The Guilford Press.
- Tilaar, H. (2009). *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winkel, W., & Hastuti, S. (2006). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yin, R. K. (1996). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd, adalah Dosen Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lahir di Manna, Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada tanggal 03 Mei 1979. Pendidikan Sarjana (S.Pd) ia selesaikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada Program Studi MIPA tamat tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan (M.Pd) di Universitas Bengkulu tamat tahun 2009. Gelar Doktor diperoleh di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 dengan predikat Cumlaude.

Karya ilmiah yang dihasilkan diantaranya, *The Development Strategy of Human Resources Management In Children's Social Welfare Institution (LKSA) (Case Study in LKSA AL-Mubarak Orphanage Bengkulu Budapest International Research and Critics Institute February 2020*, *Effective Competency Based School Model Jurnal Tarbiyah*, 2020, *Evaluation of Coaching Students Based on Dormitory Curriculum in Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bengkulu Tengah Budapest International Research and Critics Institute*, Juli 2020, jurnal Internasional bereputasi dengan judul "*Bridging the way towards sustainability performance through safety, empowerment and learning: using sustainable leadership as driving force*" terbit pada *Journal of Security and Sustainability Issues (JSSI)*, 2020. Konsep pendidikan humanis Dalam pengelolaan pendidikan Di Indonesia CV. Bildung Nusantara, 2020, Manajemen Pendidikan Jarak Jauh; Teori dan Praktek CV. Insan Media 2020, Manajemen Pendidikan Jarak Jauh (Teori dan Praktek), Qiara Publishing, 2020.

TENTANG EDITOR



Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si, adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lahir di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Mei 1961. Pendidikan Sarjana (I.r) diselesaikan di Institute Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian tahun 1983, kemudian melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada Pogram Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan tamat tahun 1998. Gelar Philosophy of Doctor (Ph.D) pada tahun 2012 dari Universiti Sains Malaysia (USM) pada Program Studi Regional Planning.

Sebelum menjadi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1986, pengalaman dalam dunia birokrasi membawa segudang pengalaman berharga dalam karir, sehingga sampai mencapai puncak karir tertinggi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Provinsi yakni menjadi Sekretaris Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) sejak 08 Juni 2018 sampai dengan 31 Mei 2021 (hingga masa pensiun).

Masa pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti kursus/latihan dalam dan luar negeri, di antaranya Diklat PIM 2 (2002), Diklat Pum 1 (2017), dan PPRA 46 Lemhanas 2011, Penguatan Kelembagaan Peningkatan Fungsi Pokja Sanitasi Provinsi (2013), Gender Planning for Equity (2007), *Protecting Children Sexual Exploitation & Sexual Violence in Emergency & Disaster from Situations* (2005) di Thailand, *Gender Mainstreaming Short Course in Australia* (2004) di Australia, *Administration Development for Local Government Officials in*

Indonesia (1999) di Jepang dan *Decentralization of Administrative Structures in Environmental Management* di Jerman (1995).

Beberapa forum ilmiah yang pernah diikuti sebagai pembicara diantaranya, Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang "Revitalisasi Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional" Lemhanas RI Tahun 2020, Seminar Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan Daerah dengan Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh Balai Bahasa Medan, Webinar Nasional dengan Tema: "Refocusing Anggaran Sektor Pertanian di Pusaran Covid-19: Politik dan Kiat Daerah" oleh PARHEPI Medan tahun 2020.

Webinar dengan Tema: "Mencari Pejabat Eselon II yang Profesional dalam Visi Sumut Bermartabat" 2020 oleh DPD LPKAN Sumut, Webinar dengan Tema: "Peran Industri Internet dalam memutus mata Rantai Penularan Covid-19 dan Mendukung Kebiasaan Baru di Sumatera Utara (Implementasi Aplikasi Peduli Lindungi) 2020 oleh Kementerian Kominfo RI, Public Speaking Coach to the Top Level Management 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta.

Beberapa penghargaan atau tanda jasa yang pernah diterima, antara lain Lencana Karya Bakti 2020 diberikan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka, Pancawarsa IV 2019 diberikan oleh Kwarda Gerakan Sumut, Satya Lencana Karya Satya XXX 2018 diberikan oleh Presiden RI, Lencana Melati 2015 diberikan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka, Piagam Penghargaan Predikat Andalan 2011 diberikan oleh Lemhanas RI, Hayati Award 2008 diberikan oleh Yayasan Hati Indonesia, Satya Lencana Karya Satya XX 2007 Presiden RI, Satya Lencana Karya Satya X 2002 diberikan oleh Presiden RI.

Aktif sebagai dosen UMSU memunculkan keinginan untuk membuat buku ajar pada mata kuliah yang diasuh, pada buku pertama ini buku ajar tentang manajemen sumber daya manusia, buku ini diperuntukkan kepada mahasiswa yang belajar tentang MSDM, namun tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang MSDM, karena belajar manajemen SDM sangat bermanfaat bagi individu maupun perusahaan.

— *Buku Ajar* —

KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Buku ini memuat pengertian dan konsep dasar analisis kebijakan pendidikan; inovasi serta perubahan dalam pendidikan; analisis kebijakan di berbagai tingkat pendidikan; pendekatan dan model analisis kebijakan pendidikan; permasalahan pendidikan dan pembelajaran di berbagai tingkatan; pendidikan dan kebijakan politik; pendidikan abad 21; serta kekurangan dan kelebihan pendekatan dan model analisis kebijakan dan permasalahan; hingga contoh kasus sebuah kebijakan pendidikan mulai dari pembentukan, praktik hingga penanganan masalah yang dihadapi.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

